



PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis :

- Sabil
- Muhammad Donal Mon
- Soeharjoto
- Agung Nusantara
- Yudhistira Ardana
- Andi Ika Fahrika
- Sari Utami
- Ayu Pradaning Ratri
- Ria Rahmawati
- Nugroho SBM
- Natalia Artha Malau
- Sri Nawatmi



PEREKONOMIAN INDONESIA

**Sabil
Muhammad Donal Mon
Soeharjoto
Agung Nusantara
Yudhistira Ardana
Andi Ika Fahrika
Sari Utami
Ayu Pradaning Ratri
Ria Rahmawati
Nugroho SBM
Natalia Artha Malau
Sri Nawatmi**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis :

Sabil
Muhammad Donal Mon
Soeharjoto
Agung Nusantara
Yudhistira Ardana
Andi Ika Fahrika
Sari Utami
Ayu Pradaning Ratri
Ria Rahmawati
Nugroho SBM
Natalia Artha Malau
Sri Nawatmi

ISBN : 978-623-8102-20-4

Editor : Ariyanto, S.Pd., M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran NYA sehingga *Book chapter* Perekonomian Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sampaikan *book chapter* ini pengembangan dari *book chapter* sebelumnya. Rekan-rekan yang tergabung dalam penulisan ini dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan keilmuan mengenai Perekonomian Indonesia ini.

Penulis menyadari tulisan ini belum sempurna, sehingga membutuhkan masukan dari publik pembaca sehingga menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih rekan-rekan penulis, penerbit dan rekan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan *Book chapter*.

Penulis, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB 1 SISTEM EKONOMI INDONESIA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah Pemikiran Sistim Ekonomi Indonesia	2
1.3 Sistim Ekonomi dan Masalahnya.....	3
1.3.1 Persolan pokok Ekonomi	4
1.3.2 Sistem ekonomi	4
DAFTAR PUSTAKA.....	8
BAB 2 SEJARAH EKONOMI INDONESIA	9
2.1 Pendahuluan.....	9
2.2 Perekonomian Indonesia Setelah kemerdekaan.....	10
2.2.1 Sistem Ekonomi Nasional (1945-1959).....	12
2.2.2 Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin (1959-1966)	13
2.2.3 Sistem Demokrasi Ekonomi (1967-1998).....	14
2.2.4 Sistem Ekonomi Pancasila (1998-kini).....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 3 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI	21
3.1 Pendahuluan.....	21
3.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Era Pra Reformasi	22
3.3 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Era Reformasi	24
3.4 Transformasi Struktural Perekonomian di Indonesia	28
3.5 Perkembangan Sektor Industri di Indonesia.....	29
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 4 KERENTANAN TERHADAP KRISIS EKONOMI	34
4.1 Pendahuluan.....	34
4.2 Krisis Ekonomi: Definisi dan Identifikasi.....	35
4.4 Perekonomian Indonesia dan Kerentanan Terhadap Krisis	40

4.5 Kesimpulan.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 5 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN	
PENDAPATAN	47
5.1 Pendahuluan.....	47
5.2 Masalah Kemiskinan.....	47
5.3 Penyebab Kemiskinan	48
5.4 Jenis-Jenis Kemiskinan	49
5.4 Strategi/Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	53
5.5 Kesenjangan Distribusi Pendapatan.....	55
5.6 Indikator Distribusi Pendapatan	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BAB 6 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG	
LUAR NEGERI.....	63
6.1 APBN	63
6.1.1 Desain APBN Yang Sehat.....	64
6.1.2 Peran Anggaran Negara	64
6.2 Kebijakan Fiskal.....	65
6.2.1 Teori Kebijakan Fiskal	66
6.2.2 Statement Kebijakan Moneter.....	67
6.3 Utang Luar Negeri	71
6.3.1 Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	79
BAB 7 SEKTOR DAN KEBIJAKAN MONETER.....	80
7.1 Sektor Perekonomian Di Indonesia	80
7.2 Kebijakan Moneter.....	81
7.3 Pengertian Kebijakan Moneter.....	82
7.4 Jenis-Jenis Kebijakan Moneter	86
7.5 Tujuan Kebijakan Moneter	87
7.6 Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter	90
7.7 Sasaran Operasional Kebijakan Moneter.....	99
7.8 Sasaran dan Strategi Kebijakan Moneter Islam	101
7.9 Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam.....	102
7.10 Kebijakan Moneter Tanpa Bunga.....	104
7.11 Sejarah Kebijakan Moneter Islam	106
7.12 Manajemen Kebijakan Moneter	107

7.13 Prinsip Kebijakan Moneter Islam	108
DAFTAR PUSTAKA	110
BAB 8 NERACA PEMBAYARAN INDONESIA.....	112
8.1 Pendahuluan.....	112
8.2 Pengertian Neraca pembayaran	112
8.2.1 Transaksi Berjalan	113
8.2.2 Transaksi Barang.....	113
8.2.3 Transaksi Jasa	114
8.2.4 Pendapatan Primer.....	114
8.2.5 Pendapatan Sekunder	114
8.2.2 Transaksi Modal.....	115
8.2.3 Transaksi Finansial.....	115
8.3 Fungsi Neraca Pembayaran.....	116
8.4 Tujuan Neraca Pembayaran	116
8.5 Metode Pencatatan Neraca Pembayaran.....	117
8.6 Neraca Pembayaran Indonesia.....	119
8.3 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia.....	121
DAFTAR PUSTAKA	124
BAB 9 PELAKU-PELAKU EKONOMI	125
9.1 Rumah Tangga Konsumen	125
9.1.1 Peran Rumah Tangga Konsumen.....	125
9.2 Rumah Tangga Produsen.....	126
9.2.1 Peran Rumah Tangga Produsen	127
9.3 Rumah Tangga Negara	128
9.3.1 Peran Rumah Tangga Negara.....	128
9.4 Masyarakat Luar Negeri	130
9.4.1 Peran Masyarakat Luar Negeri.....	130
9.5 Pelaku Ekonomi Sektor Formal.....	132
9.5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	132
9.5.2 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)	132
9.5.3 Koperasi	133
DAFTAR PUSTAKA	135
BAB 10 UTANG LUAR NEGERI INDONESIA	136
10.1 Pendahuluan.....	136
10.2 Jenis Utang Luar Negeri.....	136
10.3 Fungsi atau Peran Utang Luar Negeri.....	137
10.4 Dampak Positif dan Negatif Utang Luar Negeri.....	138
10.4.1 Dampak Positif Utang Luar Negeri	138

10.4.2 Dampak Negatif Utang Luar Negeri	140
10.5 Indikator Batas Aman Utang Luar Negeri	141
10.6 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Utang Luar Negeri	141
10.7 Manajemen atau Pengelolaan Utang Luar Negeri yang Baik	146
10.8 Masalah-Masalah Utang Luar Negeri Indonesia dan Kebijakan untuk Mengatasinya	148
10.8.1 Masalah-Masalah Utang Luar Negeri Indonesia	148
10.8.2 Kebijakan Pengelolaan Utang Luar Negeri untuk Mengatasi masalah-Masalah dalam Utang Luar Negeri Indonesia.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
BAB 11 DAYA SAING DAN LIBERALISASI	
PERDAGANGAN INTERNATIONAL.....	153
11.1 Pengertian Perdagangan International.....	153
11.2 Teori perdagangan International	154
11.3 Faktor Pendorong Perdagangan International	157
11.4 Liberalisasi perdagangan International.....	158
11.5 Daya saing Indonesia	159
11.6 Perkembangan Perdagangan International Indonesia	161
DAFTAR PUSTAKA.....	164
BAB 12 PENGARUH KURS RUPIAH TERHADAP	
PEREKONOMIAN INDONESIA.....	165
12.1 Pendahuluan.....	165
12.2 Kurs Rupiah.....	166
12.3 Pertumbuhan Ekonomi	169
12.4 Pengaruh Kurs Rupiah Terhadap Perekonomian Indonesia	171
12.4.1 Sistem Nilai Tukar dan kaitannya dengan Sistem Devisa	174
12.4.2 Sistem Devisa	175
12.4.3 Dasar Penentuan Kurs	176
12.5 Penutup	179
DAFTAR PUSTAKA.....	180
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 1961-1967 (Persen)	23
Gambar 3.2 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 1968-1998 (Persen)	24
Gambar 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Indonsia Pada 1999-2014 (Persen)	26
Gambar 3.4 : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada 2015-2021 (Persen)	28
Gambar 3.5 : Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia Pada 2015-2021 (Persen)	30
Gambar 4.1 : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi-IMF	35
Gambar 4.2a : Pengangguran dan Resesi sejak 1948	37
Gambar 4.2b : Konsep Krisis Ekonomi (Resesi) versi Gordon dan Mitchell	38
Gambar 4.3 : Kerentanan dan Ketahanan Ekonomi	39
Gambar 4.4a : Laju Pertumbuhan Ekonomi	41
Gambar 4.4b : Fluktuasi dan Pertumbuhan PDB (2010=100)	42
Gambar 5.1 : Pilihan Produksi Barang Mewah VS Barang Pokok	55
Gambar 5.2 : Distribusi Pendapatan Fungsional	58
Gambar 5.3 : Kurva Lorenz	59
Gambar 5.4 : Perkiraan Koefisien Gini	60
Gambar 7.1 : Kesimpulan Pengertian Kebijakan Moneter	85
Gambar 7.2 : Tujuan Kebijakan Moneter (<i>Single Objective</i>)	87
Gambar 7.3 : Tujuan Kebijakan Moneter (<i>Multiple Objectives</i>)	88
Gambar 7.4 : Tujuan Kebijakan Moneter	90
Gambar 7.5 : Instrumen Kebijakan Moneter	90
Gambar 7.6 : Instrumen Kebijakan Moneter	91
Gambar 7.7 : Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam	98
Gambar 7.8 : Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia	100

Gambar 7.9 : Sasaran Operasional Kebijakan Moneter	101
Gambar 9.1 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 2 Sektor	127
Gambar 9.2 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 3 Sektor	129
Gambar 9.3 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 4 Sektor	131
Gambar 11.1 : Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2022	160

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia	75
Tabel 8.1 : Pencatatan Transaksi dalam Neraca Pembayaran.....	117
Tabel 8.2 : Jasa- Jasa di Dalam Neraca Pembayaran Indonesia	121
Tabel 11.1 : Lamanya Jam kerja dalam Memproduksi Barang/Jasa pada negara A dan Negara B...	155
Tabel 11.2 : Perbandingan Efisiensi Tenaga Kerja Negara A dan Negara B	156
Tabel 11.3 : Produksi Tepung dan Kain per Tenaga Kerja pada negara A dan negara B	156
Tabel 11.4 : Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Negara A dan Negara B	157
Tabel 12.1 : Perkembangan Kurs Di Indonesia (Agustus 2021 – September 2022).....	167
Tabel 12.2 : Laju pertumbuhan PDB triwulanan Indonesia (2018Q1 – 2022Q)	170
Tabel 12.3 : Manajemen Kurs	177

DAFTAR GRAFIK

Grafik 11.1 : Perkembangan neraca Perdagangan.....	162
Grafik 11.2 : Neraca Perdagangan Indonesia Total Tahun 2022.....	162

BAB 1

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Oleh Sabil

1.1 Pendahuluan

Bab ini berkaitan dengan masalah atau pembahasan dalam masyarakat secara umum atau khusus mengenai sistem perekonomian Indonesia. Solusi pertanyaan yang tampaknya langsung ini sebenarnya agak rumit, yang tidak hanya menarik minat masyarakat umum. Sebab, struktur fundamental sistem ekonomi yang menjadi tumpuan keberhasilan ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan penerapannya di dunia nyata. Setiap orang memiliki gagasan tentang seperti apa masyarakat di dunia yang ideal. Masyarakat individualis, misalnya, menyukai masyarakat di mana anggotanya memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan mereka sendiri (Subandi, 2021). Masyarakat yang tertib, sebaliknya, mengutamakan hak-hak individu dan juga menekankan hak-hak kolektif. Ada beberapa mazhab dalam kelompok ini yang membahas bagaimana mempersiapkan ekonomi di masyarakat. Ada banyak sistem ekonomi beragam yang digunakan saat ini, dan mereka berfungsi sebagai sumber fokus dan konflik di berbagai negara. dari berbagai sistem ekonomi lainnya. Tergantung pada ruang lingkup sejarah dan perkembangan politik, kesenjangan ini akhirnya muncul di berbagai negara akibat sistem politik secara umum. Sistem ekonomi terkait erat karena mereka terus-menerus hidup berdampingan dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu cara agar kesejahteraan sosial dapat dicapai dalam skala yang lebih besar. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola dan memiliki sumber daya alam yang terdapat di sana sebagai pihak. Kemajuan ekonomi hanya bergantung pada keberhasilan langsung, biasanya pragmatis jika negara tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kebijakan ekonomi adalah pragmatisme pasar. Terkadang tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk memajukan keuntungan moneter dan mengkonsolidasikan kontrol politik. Kebijakan ekonomi

telah lama menjadi strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian negaranya (Agung Rifqi Pratama, 2015).

1.2 Sejarah Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia

Pembentukan pemikiran sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukanlah satu-satunya sumber pemikiran untuk mengelola perekonomian suatu bangsa agar dapat berfungsi, karena ada teori sistem ekonomi klasik dan modern lainnya. Ide ini sangat mendasar untuk memahami struktur ekonomi Indonesia. Mohammad Hatta mengawali pembahasan dan evaluasi sistem perekonomian Indonesia secara utuh dengan diterbitkannya pamflet “Ekonomi Terpimpin” pada tahun 1967. Hatta mengutip beberapa pasal UUD 1945, termasuk pasal 27 ayat 2, 33, dan 34, serta alasan-alasannya. Terlepas dari kenyataan bahwa komponen-komponen tertentu dari konsep tersebut telah mewakili realitas ekonomi di Indonesia, gagasan itu tidak dikembangkan lebih lanjut sebagai pernyataan formal tentang sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa.

1. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)

Selain diakui sebagai tokoh Proklamator Indonesia, Bung Hatta berjasa menciptakan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan sejarah menyakitkan negara Indonesia yang dijajah selama berabad-abad oleh negara asing yang menganut sistem ekonomi liberal-kapitalis, Bung Hatta menulis pasal 33. Menurut Bung Hatta, sistem ekonomi yang cocok yang dapat diterapkan di Indonesia harus berdasarkan kekerabatan karena penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan penderitaan dan kemiskinan. Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sistem ekonomi ini juga menjadikan mereka sebagai fokus utamanya. Ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan ekspansi ekonomi global. Karena masyarakat Indonesia harus menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain agar bisa berkembang. Di sisi lain, bagi Bung Hatta itu adalah jenis koperasi karena berfungsi sebagai penghubung antara ekonomi pedesaan dan ekonomi global.

2. Pemikiran Wilopo

Wilopo menafsirkan pasal 33 untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila mengutuk keras sistem liberal dan, dengan demikian, juga menolak sektor swasta, yang berfungsi sebagai

mesin utama sistem ekonomi liberal-kapitalis. Penentangan ini bermula dari kekhawatiran bahwa sektor swasta akan mengakibatkan eksploitasi orang kaya dan pemilik modal terhadap orang miskin dan buruh.

3. Pemikiran Wijoyo Nitisastro

Ide Wijoyo Nitisastro berasal dari Wilopo. Pasal 33 UUD 1945 seharusnya tidak dilihat sebagai penolakan terhadap sektor swasta, klaim Wijoyo Nitisastro. karena sesuai dengan pasal 27 UUD 1945, sistem ekonomi pancasila memberikan kemampuan kepada swasta untuk berkembang sehingga swasta memberikan kontribusi terhadap pemerataan dan kemajuan ekonomi. Di sini, peran serta negara sangat penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi agar sektor swasta tidak menjadi eksploitatif.

4. Pemikiran Mubyarto

Sistem Ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, adalah jenis ekonomi yang bukan kapitalisme maupun sosialis. Konsep kemanusiaan adalah salah satu cara sistem ekonomi Pancasila dikontraskan dengan ekonomi kapitalisme dan sosialis. Manusia dipandang sebagai entitas logis dengan kecenderungan untuk secara eksklusif memenuhi tuntutan material dalam rezim kapitalisme dan komunis.

5. Soemitro Djojohadikusumo

Ekonom asal Indonesia bernama Soemitro Djojohadikusumo sedang giat mempromosikan konsep sistem ekonomi nasional Indonesia. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada hakikatnya merupakan pembangunan ekonomi baru. Menurut Soemitro, ekonomi baru adalah struktur ekonomi yang didasarkan pada individu kelas menengah pribumi. Harapannya, individu kelas menengah mampu menjadi pengusaha Bumiputra dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional (Boediono, 2016).

1.3 Sistem Ekonomi dan Masalahnya

Setiap negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Sistem ekonomi suatu negara adalah rencananya untuk mengelola ekonominya dan mencapai kekayaan. Adat istiadat nasional suatu

bangsa menentukan sistem ekonomi yang dipilih oleh bangsa tersebut untuk digunakan. Konvensi nasional ini umumnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi secara signifikan oleh hukum yang lebih rendah, pandangan filosofis, dan cara hidup (Farida, 2020).

1.3.1 Persolan pokok Ekonomi

1. Bagaimana kita bisa merancang hal-hal yang menggambarkan masalah ekonomi dan layanan yang dihadapi untuk menjadi sejahtera? Dengan kata lain, setiap sistem ekonomi harus mampu mengatasi masalah bagaimana suatu negara memilih untuk menghasilkan produk dan jasa.
2. Pilihan kelompok masyarakat yang harus mengkonsumsi komoditas dan jasa yang dihasilkan adalah bagaimana produk dan jasa tersebut didistribusikan. Siapa yang menampilkan masalah yang dihadapi setiap sistem ekonomi dalam kaitannya dengan masalah siapa yang benar-benar menghasilkan produk dan jasa? Ini berarti bahwa setiap sistem ekonomi harus siap untuk menangani situasi di mana kelompok individu tertentu diharuskan menggunakan komoditas atau jasa yang dihasilkan oleh ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, persoalan siapa juga berdampak pada bagaimana komoditas dan jasa produksi negara didistribusikan.

Permasalahan ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Dengan kata lain, produsen harus mempertimbangkan cara memasarkan barangnya. Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa apakah sesuatu didistribusikan dalam jumlah kecil atau besar bergantung pada bagaimana hal itu disiapkan. Oleh karena itu, baik persaingan maupun proses pasar diperlukan untuk pendistribusiannya.

1.3.2 Sistem ekonomi

Sistem ekonomi suatu bangsa atau negara adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola perekonomiannya dan menjamin kemakmuran rakyatnya.

1. Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang telah digunakan masyarakat tradisional selama beberapa generasi, hanya mengandalkan tenaga kerja dan alam.

Regulasi ekonomi mengikuti pola konvensional dalam sistem ekonomi ini, yang biasanya memerlukan kontrol atas tanah sebagai sumber ekonomi yang paling signifikan atau utama.

Ciri-ciri tradisional

- a. Metode produksi dipelajari secara turun temurun serta bersifat simpel.
 - b. Hanya sedikit memakai modal.
 - c. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter(benda dengan benda).
 - d. Belum mengetahui pembagian kerja.
 - e. Masih terikat tradisi.
 - f. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi serta sumber kemakmuran.
2. Dalam ekonomi pasar bebas, kekuatan pasar diperbolehkan untuk mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Prinsip penawaran dan permintaan pasar bebas menyediakan lingkungan terbaik untuk membeli dan menjual tanpa dibatasi oleh aturan nasional atau sistem ekonomi. Akibatnya, pedagang dan pembeli bertanggung jawab untuk menangani semua aspek transaksi mereka.

Ciri- Ciri

- a. Mengakui kepemilikan individual
 - b. Pribadi bebas untuk memiliki Sumber Daya
 - c. Kompetisi sangat dihargai
 - d. Tidak terdapat batasan bagi pribadi untuk menerima imbalan atas prestasi kerja
 - e. Campur tangan pemerintah minim
 - f. Pemerintah hanya sebagai pengamat/ pelindung perekonomian
3. Sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat mendominasi dan berdampak pada bagaimana perekonomian diatur.

Ciri- Ciri

- a. SDE diklaim sebagai milik negara

- b. Menekankan kebersamaan dalam melaksanakan perekonomian
- c. Imbalan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasar jasanya
- d. Campur tangan pemerintah sangat tinggi

Sistem ekonomi campuran ialah kombinasi dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta bersama berinteraksi dalam memecahkan permasalahan ekonomi.

Ciri-ciri

- a. Kekuasaan dan kebebasan berdedaingan (swasta dan negara)
- b. Sumber daya ekonomi dipunyai swasta/ individu, Sumber daya ekonomi yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai pemerintah
- c. Campur tangan pemerintah untuk memantapkan ekonomi

Sistem Ekonomi Pancasila

Ciri-Ciri

- a. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial & moral
- b. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sos-eko
- c. Prioritas kebijakan eko: pengembangan eko nasional yg kuat & tangguh
- d. Koperasi sbg soko guru perekonomian
- e. Adanya imbalan yg jelas antara sentralisme & desentralisme

Pada 1980-an, para ekonom mengusulkan sistem ekonomi Pancasila sebagai solusi untuk tujuan negara mencapai manfaat yang adil dan sama bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan. Sistem ekonomi Pancasila, bagaimanapun, belum dapat dicirikan secara tepat dan ilmiah, seiring dengan ekspansi ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila berkembang lambat dari sudut pandang ilmiah karena masalah ini. Sedangkan teori ekonomi Pancasila merupakan realisasi dari sikap bangsa Indonesia dalam mengatur negara berdasarkan Pancasila (Palupi Lindiasari, 2018). Cita-cita bernegara hendak dicapai melalui gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Merujuk pada teori Bung Karno bahwa “semangat gotong royong, persaudaraan, dan kekeluargaan adalah semangat jiwa keindonesiaan, dan kami telah

melahirkan semangat tersebut dengan apa yang disebut dengan Pantja Sila”, Sukarno (2005). Oleh karena itu, secara teori, sistem ekonomi Pancasila terdiri dari dua komponen (dualisme) yang dapat dicapai melalui kerjasama: aspek kesejahteraan material (luar) dan interior (spiritual). Inti dari pasal 33, yang mengatur ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial, menguraikan alasan untuk kontrol negara secara makroekonomi. Regulasi ekonomi negara dijiwai oleh cita-cita penting tertentu, yaitu:

- 1) Kekeluargaan
- 2) Kebersamaan
- 3) Kemandirian
- 4) Harmonisasi Persatuan dan Kemajuan Sistem ekonomi Pancasila yang diwakili oleh empat cita-cita, menghendaki pemerataan dan pembangunan (kemakmuran) berjalan beriringan. Ini berarti bahwa pembangunan harus lengkap daripada pertumbuhan yang terjadi terlebih dahulu dan kemudian merata.

Pentingnya mencapai keseimbangan antara persatuan dan kemajuan paling baik dicontohkan dengan ini. Hakikat nilai kekeluargaan dan kebersamaan adalah nilai kekeluargaan diprioritaskan dalam penyelenggaraan perekonomian bangsa guna memenuhi tujuan negara yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Palupi Lindiasari, 2018). Perekonomian yang berbasis kekeluargaan, gotong royong, dan gotong royong adalah nama lain dari ekonomi pancasila. Ini adalah prinsip-prinsip abadi yang mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang mulai membiasakan diri dengan kapitalisme global dan ekonomi Orde Baru, yang menjadikan paradigma pembangunan ekonomi sebagai kekuatan dominan. Selain itu, Sistem Ekonomi Pancasila mengacu pada gagasan bangsa Indonesia dan terdiri dari aturan permainan kehidupan ekonomi. Dalam sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat mendukung ekonomi (kepentingan) rakyat, sehingga terjadi kesenjangan sosial dalam kekayaan dan kesejahteraan. Ini adalah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis di mana setiap orang berpartisipasi dalam proses penciptaan, dan semua orang mendapat manfaat dari hasilnya bersama dengan masyarakat lainnya (Umam, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rifqi Pratama. 2015. 'Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945', *veritas et Justitia*, 4(2).
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia : dalam lintasan sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Farida, A. S. 2020. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Palupi Lindiasari. 2018. 'Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu', *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 1(2).
- Subandi. 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno. 2005. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid Pertama Cetakan kelima*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Umam, S. 2017. 'EKONOMI PANCASILA DI TENGAH ARUS KAPITALISME PASAR', *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 28(2).

BAB 2

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Oleh Muhammad Donal Mon

2.1 Pendahuluan

Pada tahun ini tanggal 17 Agustus 2022 kita telah merayakan ulang tahun yang ke 77 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia, semua masyarakat ikut merayakan hari kemerdekaan dengan partisipasi dengan memasang bendera dan atribut lainnya, berbagai kegiatan dan acara perlombaan diadakan ditingkat RT guna merayakan hari kemerdekaan, sebagian besar dari masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam acara kemerdekaan tersebut.

Seiring dengan hari kemerdekaan yang sedang kita rayakan tersebut secara tidak langsung kita juga mengalami banyak hal perubahan yang signifikan diberbagai bidang baik ekonomi, infrastruktur dan lainnya sebagai contoh bidang pendidikan, pendidikan masyarakat mulai tumbuh dan semakin baik, ini bisa kita lihat dari banyak nya berdiri sekolah Negeri maupun swasta dan begitu juga dengan perguruan tinggi negeri dan swasta bisa kita lihat di setiap kota dan kabupaten diseluruh Indonesia sudah tersedia sekolah dan perguruan tinggi yang mengisyaratkan mutu dan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia semakin membaik, ditambah lagi sarana dan prasarana yang mulai maju dan terus berkembang dan tetap dalam pertumbuhan yang luar biasa guna mencapai dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu jika kita lihat pertumbuhan ekonomi Negara kita juga mengalami pasang surut dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tercatat berdasarkan informasi dari bank BI pertumbuhan ekonomi Negara kita pada catur wulan ke 2 pada tahun 2022 adalah 5,44% jika dibandingkan dari tahun 2021 pada catur wulan ke 2 hanya diangka 5,01% (BPS, 2022). Artinya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia mengalami pergeseran positif.

Perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 dimana hampir seluruh Negara terkena dampak membuat ekonomi tidak bertumbuh sesuai dengan rencana yang disusun diawal,

jika dibandingkan dengan masa normal, era new normal yang sekarang kita jalankan juga tidak luput dari beberapa regulasi yang masih melekat dengan situasi pada saat pandemi lagi tinggi tingginya, kendati demikian kita bangsa Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat seperti filosofi hari kemerdekaan kita saat ini.

(Brilyawan and Santosa, 2021) Sistem perekonomian yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perekonomian negara maju dan perekonomian untuk Negara berkembang ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi negara tersebut, strata sosial, dan beberapa aspek lainnya. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019, Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar \$ 4.174,9 Dolar AS, sedangkan menurut World Bank atau bank dunia pendapatan perkapita Indonesia diklasifikasikan menengah ke atas sehingga tergolong pada kelompok negara yang masih berkembang. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya Indonesia salah satu Negara yang memiliki potensi meningkatkan perekonomian kearah yang lebih tinggi dan positif. Tidak dapat dipungkiri jika berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan ekonomi sering dilemparkan ke pemerintah oleh pelaku bisnis dan pengamat ekonomi guna perbaikan yang baik serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Indikator lainnya yang dapat dilakukan untuk menilai dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang ada dalam suatu negara, indikatornya adalah keberhasilan dalam pembangunan ekonomi termasuk di berbagai aspek salah satu nya adalah infrastruktur dan fasilitas penguji lainnya.

2.2 Perekonomian Indonesia Setelah kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan ekonomi bangsa Indonesia masih dikuasai oleh kolonial Belanda dan pemerintahan Jepang dimana kedua negara ini berkuasa dan menjajah bangsa kita sampai pada 17 Agustus 1945, perekonomian bangsa Indonesia baru bisa diprediksi dan diukur setelah kemerdekaan tersebut. Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat

Sejauh ini sistem perekonomian dapat diklasifikasikan pada sistem ekonomi terencana, sistem ekonomi kapitalis, sistem

perekonomi campuran, dan sistem perekonomian Islam. Sistem perekonomian yang populer di negara maju adalah sistem perekonomian Liberal atau sistem perekonomian kapitalis, dimana sistem perekonomian kapitalis diatur oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dalam sistem ini adanya keinginan bebas dari setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian ini dianut oleh kebanyakan negara yang ada di Eropa dan Amerika Serikat.

Berikut beberapa indikator dan ciri ekonomi liberal:

1. Setiap Individu berhak mendapatkan pengakuan
2. Konsumen berhak mendapatkan kedaulatan dan kebebasan dalam konsumsi
3. Adanya sistem persaingan bebas
4. Investasi merupakan hal sangat penting
5. Campur tangan pemerintah tidak terlalu besar dan dibatasi
6. Setiap individu berfokus mencari keuntungan dan laba.

Keunggulan sistem ekonomi liberal:

1. Adanya kebebasan individu dalam menentukan perekonomiannya sendiri
2. Tidak adanya batasan untuk memiliki alat produksi sendiri.
3. Persaingan terbuka yang membuka persaingan yang tinggi
4. Produksi barang dan jasa dilihat dari kebutuhan masyarakat
5. Kualitas layanan dan barang lebih bermutu

Kekurangan sistem ekonomi liberal:

1. Adanya monopoli barang dan jasa pada pasar
2. Strata ekonomi yang tinggi dan adanya gap yang cukup tinggi
3. Gampang terjadinya krisis ekonomi
4. Banyak terjadi eksploitasi
5. Persaingan yang tidak sehat

(Fahrika and Zulkifli, 2020) dalam bukunya yang berjudul Perekonomian Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya mengelompokkan perekonomian berdasarkan tokoh atau ahlinya pada zamannya sesuai dengan karakteristik pemikiran ekonomi yang terjadi saat itu.

Sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia, beberapa tokoh negarawan yang ada merumuskan bentuk dan sistem perekonomian yang paling tepat dijalankan oleh bangsa Indonesia, pembentukan ini tercipta dari ide secara individu dan juga melalui diskusi bersama. Salah satunya adalah Bung Hatta mencetuskan ide, perekonomian Indonesia yang sesuai dan selaras dengan tujuan negara dan undang-undang serta cita-cita bangsa adalah perekonomian tolong menolong dalam bentuk koperasi, dan ini tidak memasukan beberapa aktivitas ekonomi dalam koperasi, hasil dari pemikiran ini tidak berjalan baik dan terkesan adanya pemaksaan untuk beberapa aspek dalam pembangun sistem perekonomian yang baik dan sesuai. Tokoh lainnya yang mencoba merumuskan sistem perekonomian Indonesia adalah Sumitro Djojohadikusumo, mengusulkan sistem perekonomian campuran. Dari beberapa ide yang muncul maka disepakati sistem ekonomi Pancasila dimana selaras dengan tujuan kemerdekaan yang mengandung tujuan penting yang dalam demokrasi.

2.2.1 Sistem Ekonomi Nasional (1945-1959)

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia tidak langsung lepas dari tangan Belanda justru dihadapkan dengan adanya agresi Belanda pertama dan agresi kedua yang mengakibatkan persoalan serius dalam pemulihan ekonomi. Indonesia melewati masa perjuangan yang sulit dan keras saat mempertahankan dan melawan penjajah Belanda dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang telah didapatkan pada Agustus 1945. Disaat genting dan kondisi yang tidak memihak untuk pemulihan ekonomi, Indonesia dikategorikan negara yang belum lama dan baru merdeka, dituntut mencari bentuk sistem pemerintahan dan politik terbaik. Pemulihan ekonomi pun menjadi hal utama dan sangat mendesak untuk bangkit dan tumbuh seperti negara lain yang sudah lepas dari penjajah. Alternatif lain adalah, pengukuhan dan penerapan Sistem Ekonomi Nasional. Berdasarkan sistem tersebut, pemerintah dengan kebijakan yang diambil dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. hasilnya, perekonomian Indonesia tetap belum stabil penyebabnya antara lain terjadinya perang dengan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan. Saat terjadi gejolak peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut, pada 1947, Kabinet Sjahrir berpikir akan mensiasati dan mencanangkan Pembangunan Ekonomi dan menunjuk Mohammad Hatta sebagai ketua komitinya. Strategi yang dipilih tidak berjalan

dengan baik serta tidak mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi kepada seluruh bangsa Indonesia. Hal lain yang menjadikan hal ini tidak berjalan dengan baik adalah kesiapan keuangan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan strategi tersebut, rencana pembangunan nasional belum tidak dapat mengandalkan sistem pajak yang ada saat itu sebagai bentuk sumber penerimaan negara saat itu. Disisi lain para ekonom dan pemerintah menghadapi masalah pembentukan badan perencanaan pembangunan dan perbaikan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lembaga lembaga birokrasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah kemudian membuat sejumlah program kerja dan beberapa kebijakan ekonomi, salah satunya adalah Rencana Urgensi Perekonomian tahun 1951 dan Rencana Lima Tahun atau Rencana Juanda pada 1955.

2.2.2 Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dekret Presiden 5 Juli 1959 melahirkan sistem demokrasi terpimpin, dimana bangsa Indonesia mulai menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Pembangunan Nasional Semesta Berencana lahir dimana digerakan oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas). Saat masa Demokrasi Terpimpin, beberapa kebijakan dan strategi ekonomi dijalankan pemerintah, salah satunya adalah dengan mendorong perusahaan kecil padat karya dan perusahaan industri dasar berada dibawah pengelolaan negara. Pemerintah mendirikan Bank Industri Negara pada 1951 guna membantu dan menjalankan pengembangan industri pada sektor-sektor yang tidak dikuasai oleh swasta dimana untuk menjalankannya membutuhkan biaya yang cukup besar, contoh usaha tersebut adalah pemintalan benang, semen, pupuk, serta industri kimia dan kertas. Hasilnya, sentralisasi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin tidak ada kemajuan yang signifikan justru mengalami kemunduran. Dengan kata lain Indonesia mengalami penurunan pemasukan di sektor manufaktur dan jasa. Kemerosotan perekonomian dibarengi laju inflasi yang kian tinggi membuat perekonomian semakin terpuruk dan tidak terkendali akibatnya pemerintah mengalami defisit anggaran belanja dan cadangan devisa pun menurun drastis. Krisis tersebut kemudian memicu timbulnya pergolakan politik yang akhirnya menjatuhkan Soekarno.

Kondisi dan karakter perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan antara tahun 1950 - 1965 diisi beberapa program dan rencana serta sistem perekonomian pemerintah. Diantara adalah:

1. Program membantu pengusaha pribumi 1950
2. Program perencanaan Sumitro 1951.
3. Repelita pertama (rencana Pembangunan lima tahun) pertama, tahun 1955-1960

Alhasil kesemua program yang dirancang dan dicanangkan belum memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut faktor tidak berjalannya rencana tersebut adalah:

1. Perumus program bukanlah orang yang ahli dibidangnya. Dan terlalu banyak kepentingan kelompok dan individu pada program tersebut. Pada masa ini masi di penuhi dengan nuasa politik.
2. Penggunaan dana yang ada tidak tepat sasaran sehingga alokasi yang tadi nya untuk meningkatkan perekonomian malah digunakan untuk kepentingan politik dan perang.
3. Faktor lain singkatnya masa jabatan setiap kabinet pemerintahan yang dibentuk sehingga program yang dibuat tidak sempat diselesaikan.
4. Selain itu program dan rencana yang dibuat dan disusun tidak melihat potensi dan aspirasi dari berbagai pihak.
5. Adanya pengaruh dari berbagai pihak dan politik dalam menggunakan sistem perekonomian.

2.2.3 Sistem Demokrasi Ekonomi (1967-1998)

Pergantian kekuasaan Sukarno dan kemudian dilanjutkan oleh Soeharto yang biasa kita kenali dengan pemerintahan Orde Baru, pada saat ini pemerintah mulai menerapkan demokrasi ekonomi dengan sistem lebih ke arah kapitalisme. Pada saat ini program pemerintah adalah pembangunan yang direncanakan secara berkala atau bertahap secara nasional, yang pertama skala jangka pembangunan Jangka Panjang untuk 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun dalam jangka pendek (Pelita). Agar mewujudkan rencana pembangunan nasional tersebut, pemerintah berupaya menghimpun dan mencari dana yang cukup besar melalui beberapa cara, salah satunya adalah membuka diri untuk masuk pada pasar modal asing. Ikut tergabung dengan

International Monetary Fund (IMF) sehingga diberikan bantuan keuangan dalam bentuk utang dari negara lain. Adanya kebijakan fiskal dengan Pembebasan bea cukai untuk barang impor dan ekspor ke luar negeri. Hal hasil perekonomian pada masa Orde Baru tumbuh pesat. Namun, di balik itu, Indonesia juga harus menanggung utang yang sangat banyak dan pada akhirnya berimbas terjadinya krisis ekonomi pada 1998.

2.2.4 Sistem Ekonomi Pancasila (1998-kini)

Dengan pergerakan mahasiswa dan lapisan masyarakat pada tahu 1998 berhasil memaksa Suharto untuk turun dari kursi kepresidenan dan ini ditandai dengan berakhirnya demokrasi ekonomi. Indonesia dibawah kepemimpinan bapak BJ Habibi menerapkan sistem ekonomi Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem perekonomian dengan azas dan landasan Pancasila menjelaskan arah dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan masyarakat luas diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini tertuang dalam garis besar haluan pemerintah dimana dalam undang undang pasal 33 UUD 1945, menyatakan bahwa ekonomi negara berlandaskan asas kekeluargaan dan sebagai bentuk usaha bersama. Beberapa hal penting yang mencakup kepentingan hidup orang banyak di kelola dan dikuasai oleh pemerintah atau negara. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola dan diatur oleh negara dan diperuntukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik dari sistem ekonomi Indonesia:

1. Berlandaskan pada UUD pasal 33 1945.
2. Ekonomi yang demokrasi merupakan landasan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif. Berikut adalah ciri ciri dari demokrasi pancasila berdasarkan UUD diantaranya adalah:
 - a. Perekonomian dibentuk dan diselenggarakan sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan UU.
 - b. Segala bentuk monopoli dan produksi dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Semua kekayaan alam bumi dan isinya di dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
 - d. Kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan baik serta dimusyawarah penggunaannya melalui DPR.

- e. Setiap individu dan warga negara dapat memilih pekerjaan yang diinginkan serta memiliki hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- f. Usaha hak milik individu diakui oleh negara dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Kebebasan dalam berkarya serta berusaha tetapi tidak merugikan orang banyak dan kepentingan umum.
- h. Anak terlantar serta fakir dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(Nasution, Erlina and Muda, 2020) sejalan dengan perubahan dan pergantian masa kepemimpinan telah ditandai dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan yang dimulai dari Bapak BJ Habibie kemudian dilanjutkan oleh Bapak Abdurrahman Wahit (Gusdur). Sistem perekonomian Pancasila mengalami pasang surut hingga kepemimpinan Megawati, SBY dan pemerintahan sekarang dibawah kepemimpinan Bapak Jokowi tidak ada kemajuan yang signifikan serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bangsa Indonesia tetapi ini juga berdampak pada perekonomian global hampir semua Negara terkena dampak dari Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia melambat dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditargetkan.

a. Pemerintahan Habibie

(Menci, 2021) Dengan turunnya bapak Suharto dari kursi kepresidenan dan menjadi babak baru bagi Bapak BJ Habibie dalam membangun perekonomian Indonesia dimana reformasi dilakukan pada banyak bidang termasuk hal utama adalah pemulihan perekonomian dan mengembalikan keterpurukan ekonomi karena inflasi yang begitu tinggi, salah satu program yang dilakukan adalah dengan Pemerintahan Habibie, selain pemulihan ekonomi pemerintah fokus pada perbaikan politik sehingga tercipta kehidupan berbangsa yang demokrasi, stabilitas politik yang bagus akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi yang akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan perlahan, ada perbaikan kearah positif untuk pertumbuhan perekonomian dimana sebelumnya angka negatif, pada tahun 1999 mulai positif meskipun masih rendah. Hal ini menjadi indikator bahwa

perekonomian mulai tumbuh dan bangkit. Pertukaran nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar mulai menguat dan inflasi mulai membaik dan turun.

b. Pemerintahan Gus Dur

Pemerintahan Gus Dur merupakan pemerintahan pertama yang dipilih di era reformasi dimana tatanan demokrasi sudah terlihat dengan adanya kebebasan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul serta berpendapat sudah mulai terlihat. Gus Dur merupakan presiden pertama yang dipilih pada masa reformasi, dimana pada saat itu semua lapisan masyarakat dan pengusaha serta investor, adanya perbaikan ekonomi. Tanda-tanda perbaikan perekonomian terindikasi dengan adanya pertumbuhan PDB pada tahun 2000 hampir mencapai 5 persen. Selain PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) rendah, hal ini memperlihatkan kondisi moneter dalam negeri sudah mulai membaik. Gus Dur dengan gaya dan sikap nyelenehnya sering mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial dan membingungkan pelaku-pelaku beberapa bisnis. Dari sisi politik, terjadi ketidakstabilan terutama dengan terjadinya kerusuhan di daerah. Dengan gaya dan style pemimpin kala itu menyebabkan hubungan pemerintah dengan IMF tidak baik, ini disebabkan banyaknya perubahan UU atau penambahan pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Hal ini membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya lagi ke Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dua indikator yaitu pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai kurs dollar terhadap rupiah. Pergerakan IHSG antara 30 Maret 2000 sampai 8 Maret 2001 menunjukkan penurunan yang disebabkan lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

c. Pemerintahan Megawati

Megawati yang semula sebagai wakil Presiden menggantikan Gus Dur sebagai Presiden. Megawati mewarisi kondisi

perekonomian Indonesia yang kurang baik, dimana nilai kurs dollar terhadap rupiah kembali menembus Rp 12.000,- dan trend IHSG yang menurun. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor kepada Indonesia yang belum pulih. Keterpurukan kondisi ekonomi tersebut kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini yang membuat pemerintahan Megawati berusaha melakukan kembali program-program yang dicanangkan sebelumnya yaitu reformasi struktural dan restrukturisasi perbankan. Pada masa pemerintahan Megawati, banyak dilakukan kebijakan privatisasi BUMN dimana sempat menuai pro dan kontra. Privatisasi ini dianggap menjual aset negara kepada pihak asing, tetapi di lain sisi untuk alasan efisiensi dan untuk menutup defisit anggaran, negara perlu melakukan privatisasi.

d. Pemerintahan SBY

Susilo Bambang Yudoyono terpilih menjadi Presiden RI menggantikan Megawati setelah memenangkan Pemilu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Pada masa ini perekonomian sudah mulai stabil, perekonomian mulai membaik dan kepercayaan investor mulai membaik. Hal ini terlihat dari indikator-indikator ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kurs dollar. Pada tahun 2008 tahun 2009. Perekonomian dunia sempat mengalami krisis terutama di Amerika Serikat. Namun dampak krisis tersebut tidak berdampak parah ke Indonesia. Ada 2 alasan mengapa krisis tersebut tidak berdampak parah seperti tahun 1998 yaitu:

1. Pemerintah sudah tanggap berbekal pengalaman sebelumnya, sehingga mengambil beberapa tindakan agar nilai rupiah terhadap dollar cukup stabil
2. Perekonomian Indonesia cukup terbantu dengan permintaan domestik yang cukup besar, sehingga ketika krisis terjadi di luar negeri, Indonesia masih bisa survive

e. Pemerintahan Jokowi

Setelah pemerintahan SBY selama 2 periode dapat dikatakan perekonomian Indonesia sudah stabil, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun demikian tetap

ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, dan ini dihadapi oleh Presiden terpilih periode 2014 yaitu Joko Widodo. Isu yang menarik tentu adalah besarnya dana subsidi dalam APBN yang mempersempit ruang fiskal, pasar bebas ASEAN yang segera dimulai dan pada tahun 2014 sampai 2015, ekonomi global mengalami perlambatan. (Prastyaningtyas, 2019) pertumbuhan dan perkembangan dengan berbagai inovasi dalam digital menjadikan era baru dalam perekonomian Indonesia, dan ini berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bangsa Indonesia merupakan Negara besar dan memiliki potensi pasar yang besar untuk ekonomi digital karena penetrasi pemakai internet meningkat terus. Indonesia mengalami peningkatan ekonomi digital secara keseluruhan, hal ini berpengaruh pada meningkatnya ekonomi nasional. Ekonomi digital menjadi jawaban dari tantangan pembangunan ekonomi yang belum stabil. Pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa pembangunan ekonomi berbasis masyarakat sebagai pelaku usaha. Jumlah wirausaha akan berkembang dalam menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk menangkap peluang pasar yang begitu besar maka Strategi Indonesia untuk pemulihan ekonomi bergerak pada arah digital yang berbasis pada teknologi dan jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri pada masa Pandemi bangsa Indonesia mengalami kesulitan sama dengan bangsa lainnya kena dampak dari pandemi dimana hampir seluruh kegiatan masyarakat dibatasi. Akibatnya Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID 19 terjadi. Secara garis besar, strategi yang digunakan mencakup Image Branding/Promotion, dan Regulation Management (Nabilla, 2021). Seperti yang kita ketahui saat ini pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan memiliki nilai positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semoga kedepannya perekonomian Indonesia bisa maju dan tumbuh secara positif yang pada akhirnya bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5135230/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-zaman-belanda-dan-pascakolonial>
- Brilyawan, K. and Santosa, P. B. 2021. 'Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019', *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(1), pp. 1-10.
- Fahrika, A. I. and Zulkifli. 2020. *Perekonomian Indonesia sejarah dan perkembangannya*. 1st edn, Yayasan Barcode. 1st edn. Edited by Dahlia and Juhasdi. Makasar. Available at: https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.
- Menci, G. 2021. 'Modul paper Perkin Related Papers', *Mercu Buana*.
- Nabilla, N. 2021. 'Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), pp. 227-239. doi: 10.22219/sospol.v7i2.15925.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E. and Muda, I. 2020. 'Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5(2), p. 212. doi: 10.22216/jbe.v5i2.5313.
- Prastyaningtyas, E. W. 2019. 'Dampak Ekonomi Digital Bagi Perekonomian Indonesia', *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA)*, (IV), pp. 103-108.

BAB 3

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Oleh Soeharjoto

3.1 Pendahuluan

Negara di berbagai belahan dunia melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Syahra, 2003). Pembangunan tersebut, bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan per kapita secara berkelanjutan, akibat dari kemampuan negara dalam meningkatkan output lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduknya (Todaro, & Smith, 2015). Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dijadikan sebagai salah satu tujuan dalam pembangunannya (Latifah, Rotinsulu, & Tumilaar, 2017). Pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka panjang, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada penurunan kemiskinan. Hal ini, sesuai dengan fenomena yang terjadi pada hipotesis U terbalik Kuznets, yang mana pada tahap awal proses pembangunan memiliki kecenderungan terjadinya peningkatan kemiskinan, tetapi pada saat tertentu kemiskinannya semakin menurun (Soeharjoto, Hypon, Sidik, Tjahjadi, Natalya, Soeharjoto, & Nugroho, 2022). Namun, pada realitanya rendahnya pendidikan dan tenaga kerja, serta struktur ekonomi yang tidak sesuai, juga merupakan faktor penentu lain dari penyebab terjadinya kemiskinan (Suharlina, 2020).

Golobalisasi dan perkembangan zaman telah mengakibatkan terjadi pergeseran permintaan dunia (Nurhaidah, & Musa, 2005). Hal ini, berdampak pada penurunan kontribusi dari sektor pertanian terhadap pendapatan nasional dan mengakibatkan kontribusi sektor industri semakin meningkat (Kristriantono, & Yulawati, 2022). Pembangunan ekonomi di negara berkembang, merupakan titik berat dari aplikasi teori perubahan struktural, karena adanya pergeseran antar sektor secara besar-besaran dari pertanian ke industri yang lebih modern (Todaro dan Smith, 2003). Untuk itu, dibutuhkan kecepatan

dalam meningkatkan produksi pada sektor industri dan jasa, karena adanya peluang besar untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pada negara berkembang, pengembangan sektor pertanian lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan (Ravallion dan Datt, 1996). Namun, pada beberapa perekonomian yang baru terindustrialisasi (Newly Industrialized Countries/ NICs) yang berada di kawasan Asia, justru menunjukkan pertumbuhan output dari sektor industri manufaktur berdampak positif secara signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan.

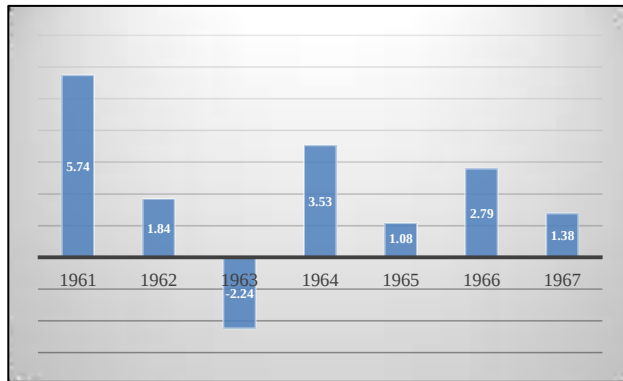
Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Soeharjoto, Salma, Tribudhi, & Masyhudi, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya mengalami kendala, sehingga pertumbuhan ekonominya pada periode 1945-2021 mengalami fluktuasi. Untuk itu, guna mempermudah mengetahui fenomena yang terjadi, dibagi atas dua periode yakni sebelum dan sesudah reformasi, dengan pembahasan sesuai era presidennya. Disamping itu, transformasi struktural dan perkembangan sektor industrinya dibahas tersendiri.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Era Pra Reformasi

Perekonomian pada era pra reformasi, dimulai pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945-1998. Presiden Soekarno memimpin Indonesia pada 1945-1967 (Wilardjo, 2013). Pasca 1967, kepemimpinan Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto pada 1968-1998 (Noventari, 2016). Presiden Soekarno dalam pemerintahannya dikenal sebagai pemerintahan Orde Lama, sedangkan Presiden Soeharto dikenal dengan pemerintahan Orde Baru. Namun, keduanya memiliki cara dan strategi masing-masing dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Kondisi politik di Indonesia pada masa Presiden Soekarno belum stabil, sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional. Hal ini, akibat dari masih banyak terjadinya gejolak politik di dalam negeri, selama periode 1950-an hingga pertengahan 1965. Kondisi tersebut, mengakibatkan kebijakan moneter yang diterapkan menjadi tidak efektif, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan membiayai perang dengan mencetak uang. Keadaan ini, semakin di

perparah dengan banyaknya infrastruktur yang rusak, akibat dari perang pra kemerdekaan. Pemerintahan ini, melaksanakan pembangunan melalui tahapan penataan ekonomi pasca kemerdekaan, memperkuat pilar ekonomi, dan krisis yang mengakibatkan inflasi. Kebijakan yang diterapkan, berdampak pada tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen pada 1961, tetapi akibat semakin meningkatnya biaya politik pada 1963, mengakibatkan pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan secara signifikan hingga menjadi -2,24 persen. Pada 1964, pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 3,53 persen. Namun, pertumbuhan ekonominya pada 1965 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 1,08 persen, dengan hiperinflasi sebesar 650 persen. Akhirnya, perekonomian di Indonesia pada 1966 pertumbuhan ekonominya meningkat kembali menjadi sebesar 2,79 persen, tetapi pada 1967 pertumbuhannya menurun kembali menjadi sebesar 1,38 persen.

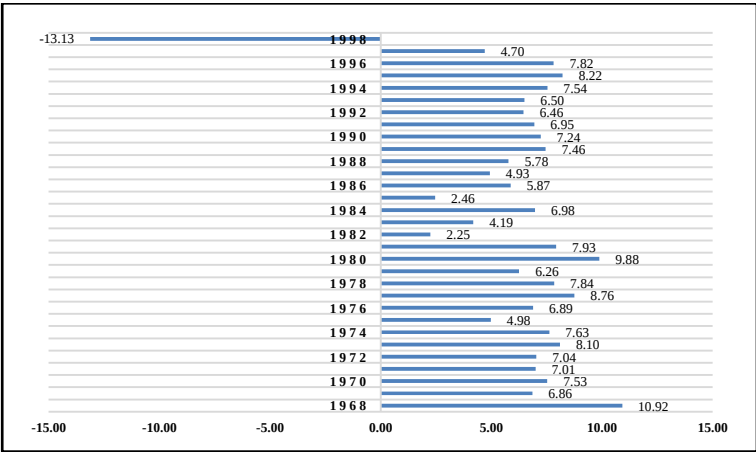


Gambar 3.1 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 1961-1967 (Persen)

Sumber: BPS, 2021

Pada akhir periode pemerintahan Orde Lama, kondisi perekonomian di Indonesia tidak menentu, sehingga Presiden Soeharto berupaya untuk menstabilkan kembali kondisi ekonomi nasional. Untuk itu, pada 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Pada tahun berikutnya, pemerintah membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun, dengan tujuan mendorong

swasembada pangan. Program tersebut, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 1970 hingga di atas 10,92 persen. Program ini, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan di sektor pertanian dan industri. Adapun dampaknya, hingga 1997 Pemerintahan telah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6 persen sampai 7 persen. Namun, adanya krisis moneter pada 1998 yang tidak diimbangi dengan fundamental ekonomi kuat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi merosot secara signifikan menjadi -13,13 persen.



Gambar 3.2 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 1968-1998 (Persen)
Sumber: BPS, 2022

3.3 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Era Reformasi

Reformasi membawa perubahan besar pada bidang politik dan ekonomi di Indonesia (Firnas, 2016). Adapun dampak positifnya, semakin besar kesempatan masyarakat untuk turut serta menjadi pelaku usaha. Hal ini, membawa arti yang luar biasa bagi pemerintah, swasta dan masyarakat, ketika menghadapi krisis ekonomi, karena secara bersama-sama mereka dapat bersinergi untuk menanggulangi terjadinya keterpurukan ekonomi nasional. Presiden B. J. Habibie, pada 1998-1999 pertama kali menjadi pemimpin Indonesia di era reformasi (Afiyah, 2021). Pasca pemerintahan transisi, kemudian Presiden

Abdurrahman Wahid pada 1999-2001 yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia (*Aprianto, 2016*). Pada 2001-2004, Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Wijaya, & Permatasari, 2018). Namun, pada 2004-2014 kepala pemerintahan digantikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Jalal, 2021). Kemudian, pada 2014-2024 kepala pemerintahan digantikan oleh Presiden Joko Widodo (The Habibie Centre, 2019).

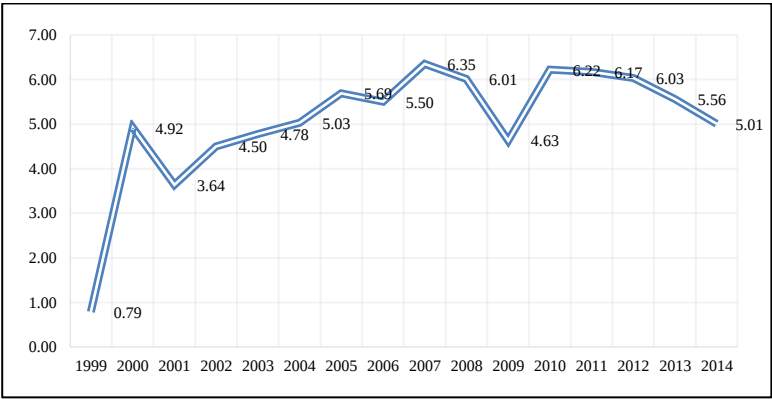
Pemerintahan di era B. J. Habibie dikenal sebagai masa rezim transisi, karena pada masanya merupakan momen terjadinya perubahan dari era Orde Baru ke Orde Reformasi. Perubahan ini, membawakan hasil berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 1999 menjadi sebesar 0,79 persen. Kondisi ini, sekaligus dapat memperkuat nilai kurs Rupiah, sehingga roda perekonomian dapat bergerak kembali. Kesemuanya, tidak terlepas dari akibat diterapkannya kebijakan independensi terhadap Bank Indonesia .

Presiden Abdurrahman Wahid, melanjutkan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi 1998. Pemerintahannya, juga menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kebijakan tersebut, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2000 menjadi sebesar 4,92 persen. Namun, pada 2001 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi sebesar 3,64 persen.

Pemerintahan di era Megawati Soekarnoputri, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada 2002, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen dan pada 2003 meningkat lagi menjadi sebesar 4,78 persen, kemudian di akhir masa pemerintahannya meningkat lagi menjadi sebesar 5,03 persen. Pemerintahan ini, juga telah menurunkan kemiskinan, dari sebesar 18,4 persen pada 2001, menjadi sebesar 18,2 persen pada 2002, kemudian pada 2003 menjadi sebesar 17,4 persen, dan akhirnya pada 2004 menjadi sebesar 16,7 persen. Keberhasilan ini, tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukannya, terutama dengan menjaga kestabilan sektor perbankan dan dilakukan penerbitan obligasi oleh pemerintah. Kebijakan tersebut, membuat bangsa menjadi Indonesia semakin mandiri.

Perekonomian nasional di era Presiden Soesilo Bambang relatif stabil. Pada awal pemerintahannya di 2005, perekonomian mengalami

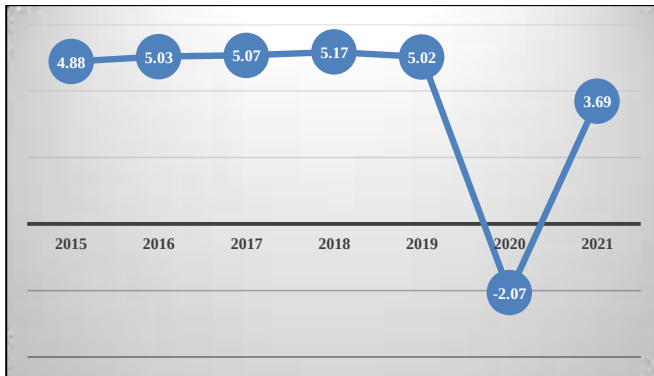
pertumbuhan sebesar 5,69 persen, kemudian pada 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,5 persen. Pada 2007, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan kembali sebesar 6,35 persen. Namun, pada 2008 kondisi ini mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 6,01 persen. Pada akhir periode kepemimpinannya di 2009, pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan kembali hingga 4,63 persen. Penurunan yang terjadi, akibat dari terjadinya krisis global. Namun, pada kepemimpinan periode selanjutnya, berhasil meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6,22 persen pada 2010. Era Pemerintah ini, membuat program rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Kebijakan tersebut, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sebesar 6,49 persen pada 2011, kemudian pada 2012 turun kembali menjadi sebesar 6,23 persen. Perlambatan ini, terus berlangsung dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada 2013 menjadi sebesar 5,56 persen dan pada 2014 menjadi sebesar 5,01 persen.



Gambar 3.3 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 1999-2014 (Persen)
 Sumber: BPS, 2022

Presiden Joko Widodo di masa Pemerintahannya, melakukan perombakan terhadap struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Kebijakan tersebut, dilakukan dengan meningkatkan investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi, guna meningkatkan daya saing Indonesia. Pada 2015, dengan kondisi

ekonomi global yang tidak mendukung, mengakibatkan kurs Rupiah mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 4,88 persen. Untuk mengatasinya, Pemerintahan menerapkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kebijakan ini, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,03 persen dan pada 2017 menjadi sebesar 5,07 persen, dan kemudian pada 2018 pertumbuhannya meningkat kembali menjadi sebesar 5,17 persen. Pasca terpilihnya kembali Pemerintahan Joko Widodo pada 2019-2024, dengan adanya perang dagang Amerika Serikat-China, gejolak geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktuatif, mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2019 menjadi sebesar 5,02 persen. Kondisi tersebut, diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 pada 2020, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07. Hal ini, akibat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Kebijakan yang diterapkan masuk dalam kategori berhasil, karena dapat menurunkan pandemi COVID-19, dengan kondisi ekonomi yang baik, bila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Akibat kontraksi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan secara konsisten dan melakukan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal dengan memberikan stimulus berupa percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, dan pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Untuk kebijakan moneter, pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia, melalui program optimalisasi berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif, guna mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut, dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional menjadi sebesar 3,69 persen pada 2021.



Gambar 3.4 : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada 2015-2021 (Persen)

Sumber: BPS, 2022

3.4 Transformasi Struktural Perekonomian di Indonesia

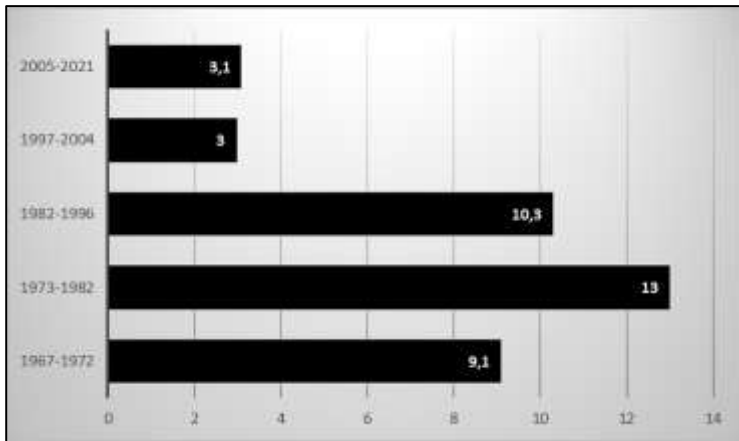
Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dirasakan masyarakat setelah melalui proses yang panjang (Wijono, 2005). Untuk itu, perlu dilakukan percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan inovasi dan melakukan perubahan struktur ekonominya. Namun, dalam prosesnya mengakibatkan terjadinya pergeseran struktur, dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa (Arsyad, 1999). Kesemuanya ini, merupakan awal sumber terjadinya transformasi struktural. Pergeseran yang terjadi, secara langsung akan mempengaruhi perubahan komposisi tenaga kerjanya. Perubahan ini, akibat dari adanya perubahan permintaan dan penawaran keseluruhan secara bersamaan (Tambunan, 1996). Terjadinya perubahan permintaan keseluruhan, dikarenakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, yang diikuti dengan perubahan selera dan komposisi barang yang dikonsumsi, sehingga menimbulkan pertumbuhan industri baru. Perubahan penawaran keseluruhan, akibat adanya perubahan teknologi dan penemuan bahan baku baru yang digunakan untuk produksi. Untuk itu, dalam memproduksi dapat dilakukan dengan merelokasi dana dan sumber daya dari satu sektor ke sektor lainnya. Penetapan struktur perekonomian, perlu diterapkan Pemerintah, guna memetakan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian nasional. Struktur tersebut, sekaligus merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang telah ada, tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya, melalui pembangunan pada bidang ekonomi. Untuk itu, sektor ekonomi yang dominan, merupakan sektor yang menjadi sumber mata pencarian mayoritas penduduknya. Artinya, sektor ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto.

Hingga kini, sektor industri masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional. Keadaan ini, sesuai dengan tahapan perkembangan industrialisasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif pada produk primer, guna menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, melakukan pengolahan terhadap bahan baku untuk dijadikan produk industri. Namun, dengan semakin meningkatnya persaingan antar negara di era globalisasi, negara perlu memiliki strategi yang tepat dan konsisten. Kebijakan ini, berimbas pada peningkatan daya saing nasional, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara global dan mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perekonomian nasional.

3.5 Perkembangan Sektor Industri di Indonesia

Pada awal rehabilitasi ekonomi di 1967 hingga kini, rata-rata pertumbuhan sektor industri masih melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 1967-1972 pertumbuhan sektor industri rata-rata 9,1 persen dan bahkan pada saat terjadinya oil boom pada 1973-1982, rata-rata pertumbuhan sektor industri menjadi 13 persen. Periode 1982-1996, walaupun rata-rata pertumbuhan sektor industri mengalami penurunan, tetapi rata-rata pertumbuhannya masih tinggi, yakni sebesar 10,3 persen. Namun, akibat terjadinya krisis ekonomi, rata-rata pertumbuhan industri mengalami perubahan besar pada 1997-2004. Hal tersebut, mengakibatkan rata-rata pertumbuhan sektor industri mengalami penurunan secara signifikan menjadi 3 persen. Pada 2005-2021, rata-rata pertumbuhan industri meningkat sedikit menjadi 3,1 persen. Kondisi tersebut, diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19, yang mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi secara global.



Gambar 3.5 : Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia Pada 2015-2021 (Persen)

Sumber: Kemenperin, 2022.

Dalam prosesnya, perubahan struktur ekonomi di Indonesia secara bersamaan sejalan dengan transformasi struktural di berbagai negara. Pelaksanaan industrialisasinya, dilaksanakan secara serius pada era Presiden Soeharto, hingga akhirnya mengubah struktur perekonomian nasional saat itu, dari pertanian menuju ke sektor industri. Namun, industri yang berkembang sampai saat masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja dengan mata rantai relatif pendek, sehingga mengakibatkan nilai tambah relatif kecil. Namun, dengan besarnya jumlah unit usahanya, membuat seolah-oleh kontribusi pada sektor ini terhadap perekonomian menjadi besar. Berkembangnya sektor ini, berkat kontribusi dari tiga pelaku ekonomi yakni Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Usaha kecil dan menengah serta koperasi. Untuk itu, kini guna meningkatkan nilai tambahnya, Pemerintah bersama pelaku usaha lainnya, perlu meningkatkan produk turunannya, agar dapat memperpanjang mata rantainya, sehingga Indonesia dapat menikmati tambahan dari nilai tambahnya, yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pihak Indonesia, juga perlu meningkatkan daya saingnya, dengan melakukan inovasi dan disiplin menerapkan sistem kerja yang menghasilkan produk berkualitas dan efisien. Untuk itu, dalam mengembangkan sektor ini, sebaiknya bersamaan dengan pengembangan sektor jasa. Hal ini penting dilakukan, agar hasil dari

produk sektor industri dapat terserap sektor jasa, guna menunjang aktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, M. S. 2021. Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *SEJARAH DAN BUDAYA*, 15(2), 249-262.
- Aprianto, E. 2016. Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999 -2001). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 5(2), 131 - 144.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Firnas, M. A. 2016. Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik*, 6(1), 160-194.
- Jalal, A. 2021. Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). *POPULIS*, 6(2), 166-184.
- Kristriantono, P., & Yuliawati. 2022. Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141-158.
- Latifah, N., Rotinsulu, D. C. H., & Tumilaar, R. L. H. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(2), 106-117.
- Noventari, W. 2016. Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan dan Bagaimana Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *VIDYA*, 24(2), 33-40.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. 2005. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3(3), 1-14.
- Ravallion, M., & Datt, G. 1996. How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth?, *World Bank Economic Review*, 10(1), 1-25.
- Soeharjoto, I. R., Hypon, J. C., Sidik, K. N., Tjahjadi, E. R., Natalya, E., Soeharjoto, & Nugroho, L. 2022. Berlakunya Hipotesis U Terbalik Dari Kuznets Pada Determinasi Kesejahteraan di indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 16(11), 7801-7808.

- Soecharjoto, S., Salma, N. I., Tribudhi, D. A., Masyhudi, L. 2022. Economic Growth And Carbon Emissions In Asean-6 To Achieve Sustainable Development Goals Through Kuznet Curve Environmental Analysis Approach. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 6(1), 10-20.
- Suharlina, H. 2020. Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 56-72.
- Syahra, R. 2003. Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.
- The Habibie Centre. 2019. Evaluasi dan Agenda Pemerintah Jokowi (2014–2024). *THC Review*, Vol. 6.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development*, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T. T. H. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. 2018. Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia. *Cakrawala*, 12(2), 196-207.
- Wilardjo, S. B. 2013. Sukarno: Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah dan Perilaku Organisasi. *Value Added*, 9(1), 1-12.
- Wijono, W. W. 2005. Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir, *Jurnal Manajemen dan Fiskal*, 5(2).

BAB 4

KERENTANAN TERHADAP KRISIS EKONOMI

Oleh Agung Nusantara

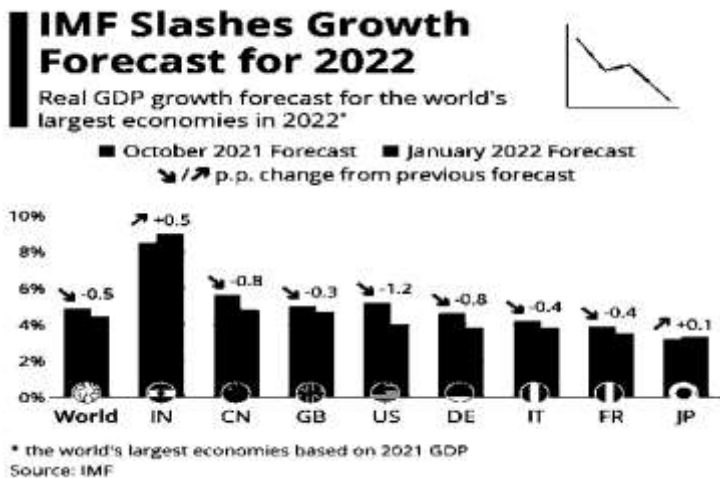
4.1 Pendahuluan

10 Oktober 2022, merupakan hari yang penting bagi ekonom, Ben S. Bernanke (MIT, USA), Douglas W. Diamond (Yale University, USA), dan Philip H. Dybvig (Yale University, USA). Mereka adalah orang yang dinobatkan memiliki kontribusi yang besar dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengantisipasi krisis ekonomi, khususnya terkait dengan financial crisis. Sebagai lembaga penilai penghargaan Nobel, *The Royal Swedish Academy of Sciences* memiliki perhatian yang serius terhadap permasalahan krisis ekonomi. Ketiga ekonom tersebut dinilai berjasa dalam menekuni permasalahan krisis ekonomi. Dan beberapa tahun terakhir, kembali permasalahan krisis ekonomi menjadi perbincangan serius dikalangan ekonom dunia.

Pada akhir 2016, kegelisahan para analis dimulai ketika pasar saham Wall-Street mengakhiri tahun 2015 dengan kondisi yang tidak baik. Bahkan di bulan februari 2016, pimpinan US Federal Reserve, Janet Yellen, memberi peringatan bahwa anjloknya Dow Jones Index sebesar 99 poin (0,60%) akan membawa dampak ikutan ke Eropa dan Asia. Dan ketakutanpun merembet ke bursa saham Asia dan Eropa dengan penurunan tajam indeks pasar saham beberapa negara utama (Fletcher and Wearden, 2016). Perlu dicatat bahwa pasar saham Amerika Serikat, menurut Bloomberg, memiliki kontribusi tingkat kapitalisasi pasar saham dunia sebesar 44,42%. Diproyeksikan pada tahun 2022 akan mengalami penurunan sebesar 25%. Kekacauan yang ditimbulkan pasar saham Amerika Serikat ini memperkuat keawatiran terjadinya krisis ekonomi global.

Tekanan yang dialami pasar saham Amerika Serikat, kemudian diikuti oleh beragam cerita buruk dalam perekonomian, seperti COVID-19, turunnya harga komoditi, krisis di Afghanistan, melambatnya perekonomian China, perang Rusia-Ukraina dengan

segala konsekuensi yang dibawanya. Laporan IMF menyebutkan bahwa perekonomian dunia secara umum mengalami penurunan kurang lebih -2.6% tahun 2022 dan -2.0% tahun 2023. Dan pada saat yang sama inflasi akan mencapai 6% di negara maju dan 9.5% di negara sedang berkembang (IMF, 2022). Kekuatan ekonomi dunia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif kecuali India dan Jepang.



Gambar 4.1 : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi-IMF
(Sumber : Statista.com)

Indonesia, sebagai negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi sekitar 33.18% (tahun 2020 menurut data World Bank) sudah selayaknya mengkhawatirkan kondisi tersebut.

4.2 Krisis Ekonomi: Definisi dan Identifikasi

Pemahaman mengenai krisis secara umum adalah wujud dari berbagai ragam kesulitan kehidupan masyarakat yang berkepanjangan, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Krisis tersebut muncul dipermukaan dalam bentuk ketegangan sosial, kesulitan dalam memenuhi kehidupan ekonomi, permasalahan lingkungan, keamanan, dan permasalahan social lainnya.

Bidang ekonomi lebih menempatkan kepentingan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Variabel ekonomi yang menggambarkan kondisi jangka panjang sulit untuk diukur. Misalnya, tidak ada metode yang pasti dalam mengukur *natural rate of GDP*, atau

natural rate of unemployment. Sehingga tulisan ini akan lebih fokus pada krisis dalam perspektif jangka pendek.

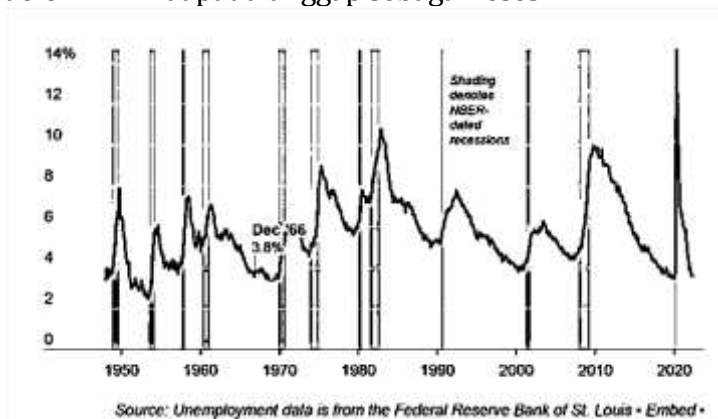
Motiv ekonomi, yang sering dianggap sebagai penyebab munculnya krisis ekonomi, merupakan salah satu dimensi dari krisis kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, krisis dapat dipahami dari beberapa unsur penting, yaitu: (a) adanya perubahan yang radikal, (b) dunia bisnis mengalami kesulitan yang berkepanjangan, (c) kinerja sector riil merosot, (d) rusaknya infrastruktur sektor keuangan. Namun demikian, harus dipahami bahwa krisis ekonomi hanyalah salah satu dimensi dari sekian banyak dimensi kehidupan manusia.

Krisis yang dikenal sebagai *Great Depression* 1929, merupakan krisis yang muncul di Amerika Serikat namun merembet ke Eropa dalam bentuk stagflasi, yang berwujud adanya deflasi dan pengangguran yang tinggi dan penurunan PDB sekitar 30%-33%. Namun beberapa penulis berpendapat bahwa terlalu naif menempatkan krisis multi-dimensional masyarakat kala itu hanya dikaitkan dengan krisis ekonomi (Morris, 2017, pp. 297-300). Demikian pula dengan krisis ekonomi era 1990-an, peran dimensi administrasi publik atau kelembagaan yang dijalankan oleh pemerintah dianggap juga memiliki peran penting. Bab ini lebih memfokuskan topik tulisan pada krisis dimensi ekonomi.

Secara ekonomis, krisis ekonomi itu adalah periode resesi ekonomi yang membutuhkan waktu untuk pemulihan, jika waktu pemulihan pendek disebut resesi jika panjang disebut depresi (Gordon, 2014, pp. 7-10). Sedangkan resesi ditandai dengan perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. Dalam ekonomi makro, resesi ekonomi, berdasarkan definisi *National Beureau Economic Research* merupakan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian, dan berlangsung selama beberapa bulan (Abberger and Nierhaus, 2008; Rodeck, 2022). Krisis ekonomi biasanya ditandai oleh memburuknya PDB riil, pendapatan per-kapita riil, lapangan kerja, produksi sektor manufaktur, dan penjualan grosir-eceran.

Dalam interpretasi NBER, definisi tersebut mendasarkan pada 3 kriteria, yaitu kedalaman, difusi, dan durasi. Artinya, setiap kriteria perlu mencapai tingkat yang memadai. Apabila terdapat indikasi ekstrim yang ditunjukkan oleh salah satu kriteria, maka kriteria lain

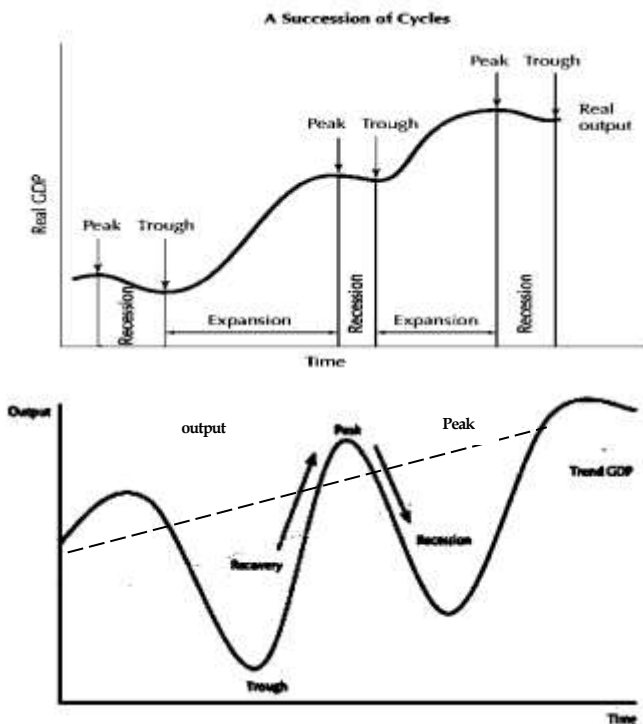
dapat menjadi penyeimbang. Misalnya, dalam kasus aktivitas ekonomi pada Februari 2020, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila terjadi penurunan aktivitas pada periode berikutnya yang besar dan tersebar luas di seluruh perekonomian, meskipun berjalan singkat, penurunan tersebut oleh NBER dapat dianggap sebagai resesi.



Gambar 4.2a : Pengangguran dan Resesi sejak 1948
(Sumber : <https://www.nber.org/research/business-cycle-dating>)

Definisi NBER ini lebih ketat daripada Shiskin's Rule, yang menempatkan situasi turun namun bisa kembali rebound tidak masuk dalam kategori krisis (Abberger and Nierhaus, 2008; Rodeck, 2020). Kasus pandemic akan berpotensi menimbulkan W-Shape Recession namun apabila terdapat periode membaik, maka Shiskin'Rule tidak memasukkannya pada resesi. Berbeda dengan NBER yang tetap memasukkannya sebagai krisis.

Identifikasi terjadinya krisis dikenal ada dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan menggunakan *Natural Real GDP* (Gordon, 2014, p. 9) dan *Trend GDP* (Mitchell *et al.*, 2019, pp. 413–414). Model Mitchell dianggap lebih praktis dalam mengidentifikasi krisis karena menggunakan metode trend, sedangkan model Gordon lebih rumit karena tidak ada model yang baku dalam mengestimasi *natural rate of GDP* atau *real GDP*.



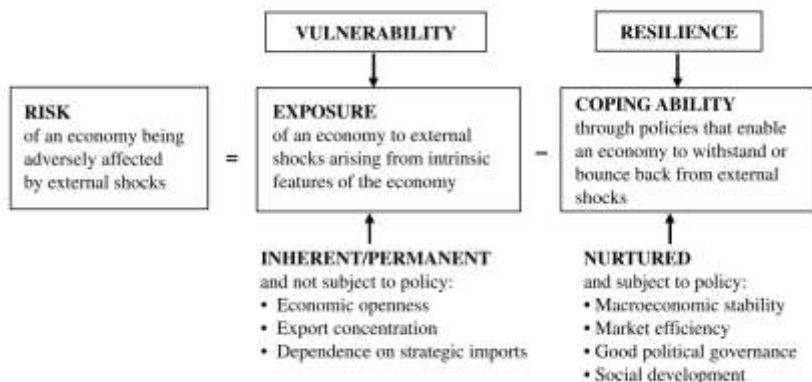
Gambar 4.2b : Konsep Krisis Ekonomi (Resesi) versi Gordon dan Mitchell, et.al.

(Sumber : Gordon, 2014; Mitchell, et.al., 2019)

4.3 Kerentanan Terhadap Krisis

United Nations (UNISDR, 2009) menggunakan standar definisi umum mengenai kerentanan (*vulnerability*) dan ketahanan (*resilience*) sebagai karakteristik dan keadaan komunitas, system atau asset yang mengakibatkan kerentanan, efek merusak dan berbahaya bagi kemampuan sistem, komunitas serta masyarakat yang terdampak bahaya untuk mampu bertahan, mengakomodasi dan memulihkan diri secara cepat serta dengan cara yang efisien. Jadi UNISDR menyatakan bahwa kerentanan tidak bisa dilepaskan dari ketahanan dalam menghadapi krisis. Dalam tulisan ini nanti, kedua *terminology* tersebut akan digabung menjadi kerentanan (*vulnerability*), mengacu pada *terminology* yang umum digunakan dalam mengukur kerentanan ekonomi (*Economic Vulnerability Index*)

Apabila definisi mengenai krisis dalam bahasan ini adalah gangguan dalam perekonomian sektor riil yang terjadi dalam jangka pendek atau resesi, maka kerentanan perekonomian berarti identik dengan kerentanan terhadap resesi ekonomi. Kerentanan ekonomi sangat tergantung dari struktur perekonomian. Briguglio (1995) dan Guillaumont (2009) berpandangan bahwa kerentanan perekonomian dicirikan oleh seberapa peka perekonomian suatu negara terhadap gangguan factor eksternal.



Gambar 4.3 : Kerentanan dan Ketahanan Ekonomi
(Sumber : Briguglio, 2004)

Kerentanan ekonomi (*vulnerability*) merupakan wujud dari mudahnya perekonomian domestik mendapatkan guncangan dari gejala perekonomian terutama dari negara-negara yang menjadi partner utama perekonomian (Babecky *et al.*, 2012; Briguglio, 1995; Briguglio *et al.*, 2008). Sumber kerentanan terhadap krisis ekonomi bersumber pada tingkat keterbukaan ekonomi, konsentrasi perdagangan luar negeri dan ketergantungan terhadap impor, khususnya barang-barang yang strategis (Briguglio, 1995).

Di sisi lain, terhadap upaya untuk mengurangi resistensi ekonomi terhadap krisis yang bisa dilakukan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Melalui serangkaian kebijakan untuk stabilisasi perekonomian, peningkatan efisiensi, *political will* pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan ekonomi, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui kekuatan pasar domestik (Pranata and Nurzanah, 2017).

Interaksi antara *exposure* perekonomian domestik terhadap ekonomi eksternal dengan upaya untuk mengatasi persoalan ketergantungan terhadap luar negeri akan menentukan perekonomian dalam negeri sensitif terhadap guncangan ekonomi eksternal atau masih terjaga eksistensinya (Briguglio *et al.*, 2008).

Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui ukuran kerentanan ekonomi. Secara resmi *United Nations* menggunakan *Economic Vulnerability Index* (EVI) sebagai ukuran kerentanan ekonomi. EVI memasukkan dua unsur, yaitu: *exposure* dari guncangan ekonomi eksternal dan konsekuensi yang ditanggungnya (Guillaumont, 2009). EVI dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang ukuran yang diperoleh dari kedua dimensi tersebut.

4.4 Perekonomian Indonesia dan Kerentanan Terhadap Krisis

Beberapa survei yang terkait dengan identifikasi krisis dan kerentanan terhadap krisis telah banyak dilakukan sejak krisis global 2007-2008. Studi Frankel (2010) menyebutkan beberapa negara G20 yang tergabung dalam program IMF, kerentanan banyak disebabkan oleh faktor kekuatan cadangan yang dimiliki Bank Sentral dalam menahan gejolak pertumbuhan ekonomi, pasar saham dan pasar valuta asing. Pengamatan yang dilakukan oleh Chitu and Quint (2018) menyimpulkan bahwa kelompok negara ekonomi yang tengah berkembang (*Emerging Market Economies*), kerentanannya sangat tergantung pada dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China. Apabila kebijakan ekonomi kedua negara tersebut mengarah pada stabilitas ekonomi dunia, dan bukan pada penyelamatan ekonomi domestik semata, sehingga kerentanan ekonomi bisa di atasi lebih mudah. Maka peran geopolitik dalam menjaga long-term risk free menjadi sangat penting.

Faktor lain yang diduga menjadi penyebab kuat krisis dan berdampak luas di dunia adalah komoditi minyak bumi. Gejala adanya *co-movement* diantara variabel ekonomi makro di Amerika Serikat telah diungkap oleh Iyetomi, et.al. (2020). *Co-movement* antar 57 variabel makro ekonomi yang diidentifikasi memiliki kerentanan terhadap harga minyak dunia.

Lalu, bagaimana dengan kerentanan perekonomian Indonesia? Adakah keterbukaan ekonomi Indonesia juga mampu menyebabkan tekanan krisis?. Badan Pusat Statistik dalam laporan resmi pada 5 Agustus 2022 (BPS, 2022) menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia memiliki momentum yang positif untuk bertahan dari situasi krisis dunia. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif 2021 secara *year-on-year* (*y-on-y*).



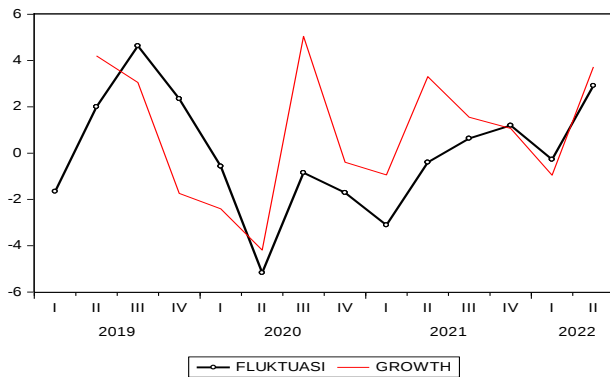
Gambar 4.4a : Laju Pertumbuhan Ekonomi
(Sumber : BPS, 2022)

Laporan BPS selanjutnya juga menyatakan bahwa PDB dari sisi lapangan usaha juga menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk semua sektor, kecuali sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan yang tumbuh negatif (-1,73%) dan (-1,15%) secara *year-on-year*. Pertumbuhan tertinggi ada di sektor Transportasi dan Pergudangan (21,27%), Akomodasi dan Makanan (9,76%), Pengadaan Listrik dan Gas (9,33%), Infokom (8,05), dan Jasa Perusahaan (7,92%). Sedangkan sektor yang tumbuh positif namun kecil adalah: Konstruksi (1,02%), Pertanian (1,37%), Jasa Keuangan (1,50%). Sektor Manufaktur tumbuh (4,01%), Perdagangan (4,42%).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah berarti Indonesia memiliki ketangguhan ekonomi (*economic resilience*) dalam menghadapi krisis global?. Terdapat perbedaan pandangan mengenai penentuan krisis, baik dari sisi metodologis maupun empiris.

Pemikiran Insukindro (2021) menyampaikan bahwa identifikasi krisis melalui perhitungan *y-on-y* kurang akurat. Sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh NBER (Rodeck, 2022) dan Shiskin (1973) pengukuran akan lebih akurat apabila menggunakan perhitungan *quater-to-quater* (*q-on-q*).

Ketika pemerintah menyampaikan krisis baru terjadi pada 2020-Q2 dengan dasar *y-on-y*, maka apabila dideteksi menggunakan *q-on-q* akan terlihat bahwa krisis sudah terjadi pada 2019.Q4 berdasarkan standard NBER atau Shiskin.



Gambar 4.4b : Fluktuasi dan Pertumbuhan PDB (2010=100)
(Sumber : BPS)

Apabila kerentanan ekonomi dicermati dari sisi indikatornya, maka terdapat beberapa penelitian yang mengupas tentang kerentanan perekonomian Indonesia terhadap krisis. Studi Supriyadi (2014) mengidentifikasi faktor yang rawan terhadap krisis, yang dimulai dari krisis 1997, 2005 dan 2008. Kerentanan ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis 1997 sangat tinggi. Secara umum semua yang bersentuhan dengan sektor luar negeri sangat rentan. Yang paling menonjol indikator kerentanan perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh *Debt Service Ratio* (DSR), cadangan pinjaman yang disetujui oleh IMF (*Reserve Position*), hutang luar negeri, current account. Namun pada kondisi krisis global 2005 dan 2008, perekonomian Indonesia menunjukkan ketangguhannya (*economic resilience*). Variabel eksternal yang semula rentan menjadi tahan terhadap gejolak ekonomi dunia.

Pengamatan serupa juga dihasilkan oleh Razmi, et.al. (2017), Pranata and Nurzanah (2017) yang menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia relatif tangguh ketika menghadapi krisis 2007/2008 sekalipun beberapa variabel memerlukan perhatian yang lebih serius, khususnya di bidang kebijakan moneter dan konsentrasi sektor luar negeri. Dari beberapa riset penunjang juga mengisyaratkan bahwa pengaruh perekonomian China terhadap Indonesia cukup besar terhadap perekonomian domestik, khususnya melalui pintu pasar modal dan pasar barang-jasa (Bappenas, 2011; Subagyo and Nusantara, 2016).

Kondisi perekonomian Indonesia periode 2020-2021 paska COVID-19 memperoleh perhatian juga dari beberapa peneliti, seperti: Nguyen (2020), Greenwood, et.al. (2021), Rahmawati and Santoso (2021), dan Pasaribu, et.al. (2021). Periode ini merupakan periode yang kritis karena dampak ekonomi COVID-19 sangat terasa terutama di pusat kegiatan ekonomi, yang kemudian diikuti oleh krisis Russia-Ukraina.

Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan ketangguhan ekonomi terhadap krisis, khususnya menyangkut potensi sumber daya manusia, yang diharapkan semakin efisien serta didukung oleh kebijakan pemerintah (Nguyen, 2020). Namun demikian, nampaknya kajian tersebut terlalu mengabaikan tipe krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang ekonomi dunia namun sudah sampai pada level ancaman bagi mobilitas penduduk dalam beraktivitas.

Pasaribu, et.al. (2021) dan Rahmawati and Santoso (2021) melihatnya dari serangan COVID-19 yang mengarah pada sendi ekonomi paling kecil, yaitu sektor informal. Lumpuhnya interaksi ekonomi antar negara tentu menjadi sebuah persoalan, namun semakin rumit ketika mobilitas penduduk dalam beraktivitas ekonomi mulai terganggu. Semakin meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian, yang membutuhkan interaksi langsung antar konsumen-penjual, membawa dampak turunnya kemampuan masyarakat dalam beraktivitas.

Dan pada saat yang sama, kemampuan fiskal pemerintah pusat sangat terganggu oleh turunnya interaksi ekonomi global. Dampak ikutannya adalah menurunnya kemampuan fiskal pemerintah daerah. Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah, baik pusat maupun

daerah, membuat kemampuan pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat juga terbatas.

Namun dengan semakin meredanya pandemi COVID-19, kemampuan ekonomi Indonesia tidak berlebihan jika dianggap relatif tangguh dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Dari hasil identifikasi krisis, perekonomian Indonesia pada 2021-Q2 hingga 2022-Q2 hanya mengalami penurunan pertumbuhan di periode 2022-Q1 namun kembali meningkat tajam pada 2022-Q2. Nampaknya krisis Russia-Ukraina, sekalipun berat namun dapat di atasi oleh pemerintah Indonesia melalui beragam kebijakannya. Hal ini nampak dari tingginya pertumbuhan di sektor usaha transportasi dan perdagangan, akomodasi dan makan minum, listrik dan gas, serta jasa lainnya yang tumbuh di atas 9% pada 2022-Q2 y-on-y (BPS, 2022). Hasil laporan BPS tersebut sejalan dengan hasil analisis yang menggunakan data q-on-q sebagaimana yang diusulkan oleh Insukindro (2021).

4.5 Kesimpulan

Krisis ekonomi yang terjadi di era modern, 1997-2022, memiliki konteks yang berbeda. Pemerintah telah berhasil mengatasi indikator-indikator yang rentan terhadap krisis sekalipun hambatan ruang fiskal yang sempit masih menjadi kendala. Namun kehati-hatian perlu terus ditingkatkan, khususnya terhadap indikator-indikator ekonomi eksternal, kemampuan Bank Sentral dalam merespon gejolak di pasar uang dan modal, yang oleh banyak peneliti disimpulkan sebagai titik rawan, dan sekaligus sebagai *early warning system* bagi perekonomian. Pemodelan ekonomi terhadap krisis perlu dikembangkan sebagai instrumen yang dapat diandalkan sebagai peringatan dini terhadap krisis yang bisa diandalkan (Greenwood *et al.*, 2021). Variabel-variabel yang diduga menjadi indikator yang kuat bagi upaya peringatan dini adalah: pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit, stabilitas harga aset dan peran kebijakan pemerintah serta dorongan dari lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abberger, K., Nierhaus, W., 2008. How to Define a Recession? 4, 74–76.
- Babecky, J., Havranek, T., Mateju, J., Rusnak, M., Smidkova, K., Vasicek, B., 2012. Early Warning Indicators of Economic Crises. Czech National Bank / Financial Stability Report 2011/2012.
- Bappenas, 2011. Tinjauan Ekonomi Triwulanan: Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia (Article No. Triwulan IV). Jakarta.
- BPS, 2022. Berita Resmi Statistik. BPS, Jakarta.
- Briguglio, L., 1995. Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities. *World Development* 23, 1615–1632.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., Vella, S., 2008. Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements (Research Paper No. 2008/55). UN University-World Institute for Development Economic Research.
- Chitu, L., Quint, D., 2018. Emerging Market Vulnerabilities: a Comparison with Previous Crises (Bulletin No. 8/2018). European Central Bank.
- Fletcher, N., Wearden, G., 2016. Recession Jitters Knock Global Stock Markets to Fresh Lows. *The Guardian*.
- Frankel, J.A., Saravelos, G., 2010. Are Leading Indicators of Financial Crises Useful for Assessing Country Vulnerability? Evidence from the 2008-09 Global Crisis (Working Paper No. 16047). NBER, Cambridge, Massachusetts.
- Gordon, R.J., 2014. *Macroeconomics*. Pearson Education Limited.
- Greenwood, R., Hanson, S.G., Shleifer, A., Sorensen, J.A., 2021. Predictable Financial Crises (Working Paper No. 20–130). Harvard Business School.
- Guillaumont, P., 2009. An Economic Vulnerability Index: Its Design and Use for International Development Policy. *Oxford Development Studies* 37, 193–228.
- IMF, 2022. World Economic Outlook Update: Gloomy and More Uncertain.
- Iyetomi, H., Aoyama, H., Fujiwara, Y., Souma, W., Vodenska, I., Yoshikawa, H., 2020. Relationship between Macroeconomic Indicators and Economic Cycles in U.S. Scientific Reports: Nature Research 10.

- Mitchell, W., Wray, L.R., Watts, M., 2019. *Macroeconomics*. Macmillan International and Red Globe Press.
- Morris, C.R., 2017. *A Rabble of Dead Money: The Great Crash and The Global Depression 1929-1939*, first. ed. Public Affairs.
- Nguyen, T., 2020. *How Indonesia Can Rev Up Its Faltering Economic Growth*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Pasaribu, E., Irawan, P.B., Siagian, T.H., Wulansari, I.Y., Kurniawan, R., 2021. *Spillover Effects of Social and Economic Interactions on COVID-19 Pandemic Vulnerability Across Indonesia's Regions (Discussion Paper No. 409)*. the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Project, Jakarta.
- Pranata, N., Nurzanah, 2017. *How Vulnerable is Indonesia's Financial System Stability to External Shock?* *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 4, 5–17.
- Rahmawati, F., Santoso, F.D.P., 2021. *The Vulnerability of Developing Countries to the Economic Crisis Due to the Pandemic: What Can Indonesia Do? (Conference Paper)*. International Research Conference on Economics and Business-IRCEB.
- Razmi, F., Mohamed, A., Chin, L., Habibullah, M.S., 2017. *How Does Monetary Policy Affect Economic Vulnerability to Oil Price Shock as against US Economy Shock?* *Munich Personal RePEc* 79079.
- Rodeck, D., 2022. *Recession Definition: What is a Recession?* *Forbes Advisor*.
- Rodeck, D., 2020. *Alphabet Soup: Understanding the Shape of a COVID-19 Recession*. *Forbes Advisor*.
- Shiskin, J., 1973. *Measuring Current Economic Fluctuations*. *Annals of Economic and Social Measurement* 2, 1–15.
- SinarKu Makro #1 Fluktuasi Ekonomi (Resesi) dan Indikator Ekonomi, 2021. , *SinarKU Seri Ekonomi Makro*. UGM-Yogyakarta.
- Subagyo, H., Nusantara, A., 2016. *Co-Movement of the Indonesia Stock Exchange with the World's Major Stock Exchanges*. *International Journal of Economic Research* 13, 3719–3728.
- Supriyadi, A., 2014. *External Vulnerability Indicators: The Case of Indonesia (Paper)*, the Seventh IFC Biennial Conference.
- UNISDR. 2009. *UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction (Technical Report)*. UN-International Strategy for Disaster Reduction.

BAB 5

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

Oleh Yudhistira Ardana

5.1 Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan kronis yang mempengaruhi hampir semua negara berkembang. Isu kemiskinan sangat erat kaitannya dengan hak atas penghidupan yang layak. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah merdeka selama lebih dari 77 tahun, kemiskinan tetap menjadi masalah utama. Kesulitan lain yang dihadapi negara-negara berkembang sejak tahun 1960-an adalah bagaimana mendistribusikan "kue" kemajuan secara adil. Pada kenyataannya, ekspansi ekonomi yang cepat seringkali disertai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kaum Neo-Klasik sering mengasosiasikan *trickle down effect* dengan hampir semua negara berkembang. Pada kenyataannya, pemerataan pendapatan sangat penting untuk mencapai stabilitas sosial dan politik serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5.2 Masalah Kemiskinan

Kemiskinan menurut para ahli bersifat multidimensional, artinya kemiskinan memiliki banyak segi karena kebutuhan manusia yang beragam. Kebijakan publik mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya aset, struktur sosial politik, dan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian terdapat permasalahan sekunder seperti minimnya jaringan sosial, fasilitas keuangan, serta data. Aspek kemiskinan ini timbul sebagai kekurangan makanan, air, perumahan yang nyaman, perawatan kesehatan yang tidak mencukupi, serta jenjang pembelajaran yang rendah.

Lebih lanjut, komponen-komponen kemiskinan mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini berarti jika kemajuan ataupun kemunduran di satu bidang bisa jadi berakibat pada kemajuan ataupun kemunduran di

bidang lain. Sisi lain dari kemiskinan adalah bahwa yang miskin adalah individu dan kelompok orang. Kemiskinan, di sisi lain bisa ditafsirkan sebagai kondisi ataupun keadaan yang dirasakan oleh orang ataupun sekelompok orang yang tidak sanggup melaksanakan hidupnya ke tingkatan yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Secara universal, konsep kemiskinan bisa dikategorikan jadi 2 bagian: (1) aspek fundamental, seperti miskin harta (kekayaan), organisasi sosial, politik, pengetahuan, dan keahlian; serta (2) ciri sekunder, seperti miskin jejaring sosial, sumber keuangan, serta data.

Orang miskin senantiasa tidak berdaya ataupun tidak sanggup penuhi kebutuhan dasarnya, yakni ketidakmampuan untuk (1) melaksanakan aktivitas usaha yang produktif; (2) memperoleh akses ke sumber energi sosial ekonomi; (3) Mereka mengendalikan nasib mereka sendiri dan terus-menerus didiskriminasi; dan (4) melepaskan diri dari mentalitas serta budaya yang kurang baik dan senantiasa mempunyai harkat serta martabat yang rendah. Ketidakberdayaan serta ketidakmampuan ini meningkatkan sikap serta pola kognitif yang tidak diinginkan, yang menyebabkan hilangnya kebebasan guna melaksanakan bisnis serta menikmati kesuksesan dengan bermartabat.

Fernandez (2001) menambahkan ciri-ciri orang miskin lainnya dalam beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1) Aspek politik: mereka tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 2) Aspek sosial: terisolasi dari struktur masyarakat utama yang sudah mapan. 3) Implikasi ekonomi antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan; dan kepemilikan aset fisik yang rendah, termasuk aset lingkungan seperti air bersih dan penerangan. 4) Karakteristik atau nilai budaya: terperangkap dalam budaya sumber daya manusia yang berkualitas rendah, seperti etos kerja yang lemah, pemikiran yang pendek, dan kecenderungan untuk menyerah.

5.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Mukhopadhyay (1985), para pembuat kebijakan pembangunan terus berupaya untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat. Namun, karakteristik dan kondisi masyarakatnya sangat berbeda, dan jika

dibandingkan dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang masih sangat sederhana, kebijakan nasional biasanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil mengatasi mereka. Mereka, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah. Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak dapat dipisahkan dari realitas luar negeri, yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan, terutama dalam hal pendanaan pembangunan (Fredericks, 1985).

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai keadaan anggota masyarakat yang tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memiliki faktor produksi dan faktor produksi yang cukup berkualitas dan karenanya tidak memperoleh keuntungan dari hasil pembangunan. Kurangnya partisipasi dalam proses pembangunan mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menggunakan komponen pekerjaan mereka. Rencana pembangunan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pertumbuhan tidak tercapai. Akibatnya, masalah kemiskinan tetap ada dan harus dipantau dan diselesaikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata, serta pembangunan negara Indonesia.

5.4 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki definisi yang luas dan sulit untuk diukur. Namun, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis ukuran kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, gagasan tentang kemiskinan sering dikaitkan dengan evaluasi tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan jumlah keinginan seringkali terbatas pada tuntutan atau kebutuhan mendasar yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik. Jika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka masyarakat atau penduduk tersebut dianggap miskin. Dengan demikian, kita juga dapat mengevaluasi kemiskinan dengan membandingkan pendapatan masyarakat dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar mereka. Garis kemiskinan merupakan pembatas antara situasi miskin dan tidak miskin. Ini biasanya disebut sebagai kemiskinan absolut. Pendekatan ini berusaha untuk menetapkan kekayaan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Todaro & Smith, 2014).

Bagian tersulit dalam menilai kemiskinan absolut adalah menetapkan komposisi dan jumlah kebutuhan dasar, karena kedua kriteria ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan, tetapi juga oleh iklim, tingkat pembangunan suatu negara, dan berbagai variabel ekonomi lainnya. Kebutuhan dasar itu sendiri dibedakan menjadi dua kategori: (1) kebutuhan dasar untuk bertahan hidup (*subsistence needs*) dan (2) kebutuhan tambahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi tiga kategori: (1) Kebutuhan fisik primer meliputi kebutuhan pangan, papan, dan kesehatan; (2) Pendidikan, rekreasi, dan hiburan, serta ketenangan pikiran, adalah tuntutan budaya; dan (3) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi muncul sebagai konsekuensi dari kebutuhan yang terjadi sebagai akibat dari kelebihan pendapatan.

2. Kemiskinan Relatif

Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang melebihi tingkat kebutuhan dasar, pendapatan individu tersebut masih jauh lebih rendah daripada pendapatan masyarakat sekitar sehingga menempatkan orang tersebut dalam kelompok miskin. Hal ini karena kondisi di sekitar individu lebih menentukan kemiskinan daripada lingkungan individu. Ini disebut sebagai konsep kemiskinan relatif.

Menurut teori ini, garis kemiskinan bergeser seiring dengan pergeseran standar hidup masyarakat. Hal ini tentu lebih unggul dari konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan akan selalu ada karena gagasan tentang kemiskinan sangat dinamis. Akibatnya, Kincaid (1975) melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketidakadilan sosial. Semakin besar perbedaan antara tingkat pendapatan atas dan bawah, semakin banyak individu yang dapat dikategorikan miskin. Untuk mengatasi tantangan

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, Bank Dunia menyarankan tiga jenis kriteria. Pertama, jika 40% penduduk berpenghasilan kurang dari 12% dari total pendapatan nasional, distribusi pendapatan dianggap sangat tidak merata. Kedua, ketimpangan sedang didefinisikan sebagai 40% penduduk terbawah memperoleh antara 12-17% dari total pendapatan nasional. Ketiga, ketimpangan dianggap terbatas jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan nasional.

3. Indikator Kemiskinan

Beberapa ukuran, seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan rakyat, dan indeks kemiskinan manusia (IKM), sering digunakan sebagai indikator kemiskinan.

4. Tingkat Konsumsi Beras

Menurut Sajogyo (1977) dalam Arsyad (2010), menggunakan konsumsi beras per kapita sebagai ukuran kemiskinan. Masyarakat di pedesaan dianggap miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kilogram per kapita per tahun. Ini setara dengan 360 kg per kapita per tahun di kota-kota. Sajogyo mengklasifikasikan indikator kemiskinan menjadi tiga kategori:

Kategori	Pedesaan	Perkotaan
a. Melarat	180 kg	270 kg
b. Sangat miskin	240 kg	360 kg
c. Miskin	320 kg	480 kg

Namun, sejak 1979, kategori "melarat" telah digantikan oleh "hampir miskin", dengan 480 kg di daerah pedesaan dan 720 kg di daerah perkotaan (Sajogyo, dalam BPS, 1986).

5. Tingkat Pendapatan

Ketimpangan dalam pola pembangunan dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya menggunakan sumber daya yang ada di daerah pedesaan hanyalah dua dari banyak masalah yang berkontribusi terhadap keterbelakangan di wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penentuan garis kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, yang dapat dijelaskan oleh perubahan

dinamika kehidupan antara keduanya (desa dan perkotaan). Penduduk di wilayah metropolitan memiliki kebutuhan yang lebih beragam daripada di daerah pedesaan, yang mempengaruhi kebiasaan pembelian mereka.

6. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Banyak komponen tingkat kesejahteraan lainnya, selain data pendapatan dan pengeluaran, yang sering digunakan. Menurut buku PBB tahun 1961, sembilan komponen kesejahteraan adalah kesehatan, asupan makanan dan gizi, pendidikan, kemungkinan kerja, perumahan, jaminan sosial, pakaian, waktu luang, dan kebebasan.

7. Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Kemiskinan Multidimensional

The United Nations Development Program (UNDP) meluncurkan Indeks Kemiskinan Manusia dalam salah satu studi tahunannya, *Human Development Report* (1997). UNDP mengembangkan indeks ini sebagai tanggapan atas ketidaksepakatannya dengan indikator pendapatan per dolar per hari Bank Dunia sebagai ukuran kemiskinan di suatu daerah (negara). UNDP berharap dapat menggantikan ukuran pendapatan dari kemiskinan oleh Bank Dunia dengan ukuran kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan indeks ini. Penjelasan UNDP yang populer adalah bahwa ukuran kemiskinan seseorang adalah jika dia tidak dapat (atau bahkan memiliki akses) ke fasilitas umum dasar dan memiliki kualitas hidup yang buruk. Jadi ini bukan tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan per dolar per kapita per hari.

Faktanya, Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki banyak kesamaan. Menurut UNDP, ada tiga nilai kunci yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu sebagai berikut. a) Standar hidup, dengan asumsi bahwa karena standar kesehatan sangat rendah di negara-negara berkembang, lebih dari 30% populasi tidak mungkin bertahan lebih dari 40 tahun. b) Tingkat pendidikan dasar, yang dinilai dari persentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan fokus khusus, seperti hilangnya hak pendidikan perempuan. c) Stabilitas ekonomi, yang diukur dari proporsi

penduduk yang tidak memiliki akses infrastruktur kesehatan dan air bersih, serta proporsi balita yang kelaparan.

UNDP dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) telah menyepakati pengukuran kemiskinan baru, Multidimensional Poverty Index (MPI) pada tahun 2010. Tujuan MPI adalah untuk menggambarkan situasi kemiskinan secara lebih komprehensif, bukan hanya metode moneter seperti garis kemiskinan. MPI mengkaji struktur kemiskinan secara lebih luas, dengan menggunakan variabel multidimensi seperti akses yang tidak memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup (bukan hanya pengeluaran atau konsumsi). Teknik MPI pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari pendekatan Indeks Kemiskinan Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.4 Strategi/Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan akses ke layanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan instrumen kebijakan utama dalam tujuan pemerintah yang lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perluasan cakupan dan kualitas layanan penting ini memerlukan investasi dalam sumber daya manusia, yang meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Pada saat yang sama, layanan ini dapat segera menjawab kebutuhan dasar konsumen.

Pendidikan (baik formal maupun informal) dapat memainkan peran kunci dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang, baik secara tidak langsung dengan meningkatkan produksi dan efisiensi secara umum, atau secara langsung dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan orang miskin untuk meningkatkan output mereka, yang akan meningkatkan pendapatan mereka.

Intervensi pemerintah dalam kesehatan masyarakat adalah alat kebijakan penting lainnya untuk pengentasan kemiskinan. Strategi ini didukung oleh tiga pertimbangan utama. Pertama, pengurangan beban penderitaan dapat secara

langsung memenuhi keinginan konsumsi bahan pokok, yang juga merupakan tujuan kritis dari kebijakan sosial. Kedua, memperbaiki kesehatan meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari libur kerja, dan meningkatkan produksi energi. Ketiga, menurunkan angka kematian bayi dan anak secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui penurunan tingkat kesuburan. Tingkat kematian yang lebih rendah tidak hanya memungkinkan individu yang lebih tua untuk memiliki jumlah keluarga yang mereka pilih, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki keluarga yang lebih kecil.

2. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan

Selain kemampuannya menyerap tenaga kerja Indonesia, bukti empiris saat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ketiga pendorong pertumbuhan pertanian tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Revolusi teknis dalam budidaya padi, khususnya pembangunan irigasi, memberikan kontribusi terbesar untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan menurunkan kemiskinan pedesaan.

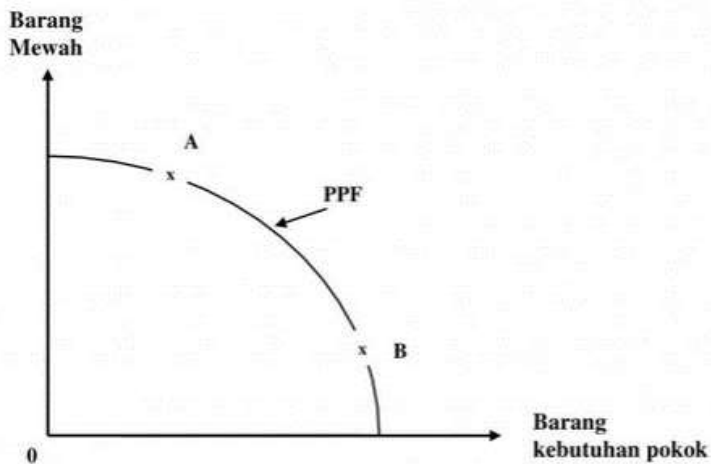
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek penanggulangan kemiskinan. LSM-LSM ini mampu menjangkau mereka yang kurang beruntung dalam hal-hal tertentu dengan lebih berhasil daripada inisiatif pemerintah karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka dukung. Selain itu, partisipasi aktif LSM-LSM ini dalam program pemerintah cenderung mendorong "persetujuan" penduduk pedesaan terhadap inisiatif pemerintah, yang mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat membantu meminimalkan pengeluaran keuangan dan personel dalam pelaksanaan proyek pengurangan kemiskinan yang padat karya. Ada beberapa jenis organisasi masyarakat, antara lain (1) LSM, (2) LPSM, (3) Organisasi sosial lainnya, dan (4) Organisasi semi-pemerintah.

5.5 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan distribusi pendapatan penting bagi proses pembangunan. Meskipun kita sering memusatkan perhatian kita pada masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (aset), ini hanya sebagian kecil dari masalah ketimpangan yang ada di negara berkembang, seperti ketimpangan kekuasaan, prestise, status, pekerjaan, kepuasan, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan memilih.

Analisis kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve* = PPC) atau analisis batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier* = PPF) adalah teknik yang paling mudah untuk mengkaji masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Untuk mengilustrasikan teori tersebut, perhatikan produksi komoditas dalam suatu perekonomian: (1) kebutuhan barang, seperti makanan pokok, pakaian, dan perumahan; dan (2) barang mewah, seperti mobil mewah, film, televisi, dan pakaian mewah. Untuk menjelaskan teori tersebut, perhatikan bagaimana produk diproduksi dalam suatu perekonomian: (1) barang kebutuhan, seperti makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal; dan (2) barang mewah, seperti mobil mewah, DVD, televisi, dan pakaian mewah.



Gambar 5.1 : Pilihan Produksi Barang Mewah VS Barang Pokok

Berdasarkan gambar 5.1 dapat dijelaskan sumbu vertikal menampilkan seluruh produk mewah, sedangkan sumbu horizontal

menggambarkan kategori kebutuhan mendasar. Hasilnya, *Production Possibility Curve* (PPC) menggambarkan kombinasi terbesar dari dua kategori item yang dapat dihasilkan perekonomian dengan menggunakan teknologi tertentu. Namun, kondisi ini tidak membuat jelas yang mana dari banyak kemungkinan kombinasi yang akan dipilih.

Pada Gambar 5.1, misalnya, titik A dan B mewakili GNP riil yang sama. Pada titik A, banyak produk mewah yang dibuat tetapi hanya sedikit kebutuhan esensial yang diproduksi, sedangkan pada titik B terjadi sebaliknya. Kombinasi yang diprediksi untuk negara-negara berpenghasilan rendah adalah pada titik B. Jumlah total permintaan konsumen efektif, bagaimanapun, adalah penentu mendasar dari produksi gabungan dalam ekonomi pasar dan ekonomi "campuran". Hal ini terkait dengan letak dan bentuk kurva permintaan masyarakat, yang terutama ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan nasional.

Semakin tidak merata distribusi pendapatan di negara-negara dengan tingkat GNP dan pendapatan per kapita yang rendah, semakin banyak perilaku konsumsi orang kaya akan mempengaruhi permintaan agregat. Akibatnya, posisi produksi-konsumsi berada pada titik A, di mana orang kaya seringkali lebih banyak membelanjakan barang mewah daripada kebutuhan. Pada akhirnya, orang miskin pasti akan lebih menderita akibat keadaan ini.

Adelman dan Morris (1973) mengusulkan delapan alasan berikut disparitas ekonomi di negara-negara berkembang: 1) Ekspansi penduduk yang cepat akan menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih rendah. 2) Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan uang yang tidak disertai dengan peningkatan output barang. 3) Disparitas antar wilayah dalam pembangunan. 4) Ada banyak investasi di perusahaan padat modal, sehingga persentase pendapatan dari peningkatan modal melebihi persentase pendapatan dari tenaga kerja, menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. 5) Keterbatasan mobilitas sosial. 6) Penerapan strategi substitusi impor industri yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang industri untuk mengamankan perusahaan-perusahaan kelompok kapitalis. 7) Memburuknya kondisi perdagangan negara berkembang dalam perdagangan dengan negara kaya sebagai akibat dari inelastisitas permintaan komoditas ekspor negara berkembang. 8) Menghancurkan

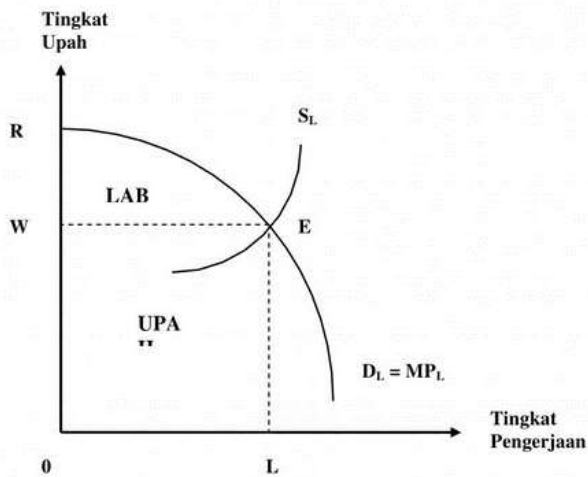
usaha kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

1. Distribusi Pendapatan Perorangan

Indikator yang paling banyak digunakan para ekonom adalah distribusi pendapatan perorangan. Indikator langsung ini menggambarkan hubungan antara orang dan pendapatan mereka secara keseluruhan. Hal ini tidak dianggap bagaimana pendapatan diperoleh. Juga tidak diperhitungkan berapa penghasilan masing-masing individu atau apakah uang itu semata-mata berasal dari pekerjaan atau dari sumber lain seperti bunga, pendapatan, hadiah, atau warisan. Selanjutnya, sumber daya geografis (perkotaan atau pedesaan) dan okupasional (pertanian, manufaktur, perdagangan, dan jasa) kurang dimanfaatkan.

2. Distribusi Fungsional

Distribusi fungsional adalah ukuran umum lain dari distribusi pendapatan yang digunakan oleh para ekonom. Pengukuran ini mencoba menggambarkan proporsi pendapatan nasional yang diperoleh setiap elemen produksi (tanah, tenaga kerja dan modal, kewirausahaan). Teori distribusi pendapatan fungsional ini membandingkan persentase pendapatan total berupa sewa, bunga, dan keuntungan (yang masing-masing merupakan pendapatan yang diperoleh) atas faktor-faktor produksi tanah, modal, dan kewirausahaan dengan persentase total pendapatan berupa sewa, bunga, dan keuntungan (yang masing-masing merupakan pendapatan yang diperoleh).



Gambar 5.2 : Distribusi Pendapatan Fungsional

Gambar 5.2 memberikan ringkasan dasar teori distribusi pendapatan fungsional. Teori distribusi pendapatan fungsional ini menganalisis persentase pendapatan total berupa sewa, bunga, dan keuntungan (semuanya merupakan pendapatan yang dihasilkan) pada komponen: faktor produktivitas lahan, modal, dan kewirausahaan. Menurut model pasar persaingan sempurna, permintaan tenaga kerja diatur oleh produk marjinal (MPL), yang berarti bahwa tenaga kerja tambahan akan direkrut sampai nilai produk marjinal (*Value of Marginal Product* = VMP) sama dengan tingkat upah aktual mereka. Namun, permintaan tenaga kerja akan menjadi fungsi negatif karena konsep produk marjinal menurun (*the law of diminishing returns*). Artinya, seiring berjalannya waktu, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berkurang.

Teori distribusi fungsional ini tampak kurang relevan karena mengabaikan peran esensial dan pengaruh kekuatan "non-pasar" (variabel non-ekonomi) seperti pengaruh politik dan kekuasaan dalam menetapkan tingkat harga setiap item produksi. Sebagai contoh, di sektor modern, keseimbangan kekuatan kolektif antara pengusaha dan serikat pekerja seringkali lebih besar dalam menetapkan gaji, dan kekuatan monopoli dan tuan tanah seringkali mempengaruhi tingkat harga modal (bunga) dan harga tanah (sewa).

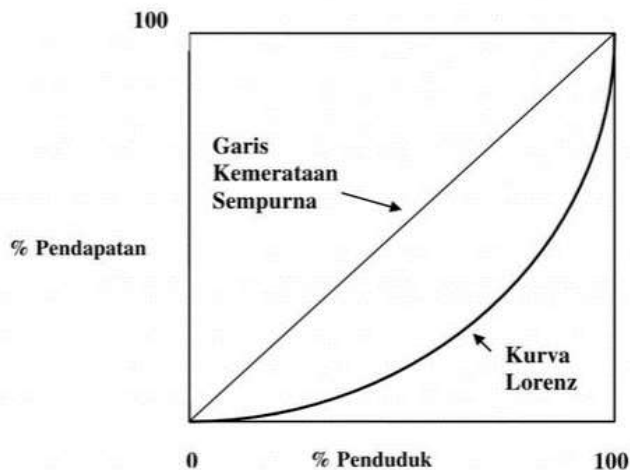
3. Distribusi Regional

Aspek keadilan dan pemerataan dapat dinilai berdasarkan distribusi regional (antar daerah), selain distribusi individu dan fungsional. Di Indonesia, misalnya, distribusi pendapatan dibagi menjadi kabupaten, provinsi, Jawa dan luar Jawa, serta desa dan kota. Berdasarkan data yang ada, terdapat perbedaan derajat kesejahteraan di Indonesia antar wilayah/wilayah. Kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia semuanya dipandang sebagai kontributor utama dalam menjelaskan perbedaan pendapatan antar daerah.

5.6 Indikator Distribusi Pendapatan

1. Kurva Lorenz

Metode lain untuk menganalisis distribusi pendapatan individu adalah dengan membangun kurva yang dikenal sebagai kurva Lorenz, yang dinamai Conrad Lorenz, seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Dia menggambarkan hubungan antara kategori demografis dan bagian pendapatan mereka pada tahun 1905.



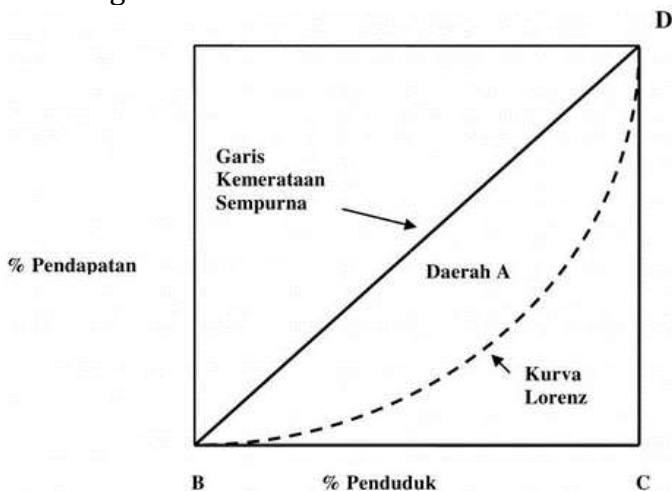
Gambar 5.3 : Kurva Lorenz

Gambar 5.3 menunjukkan kurva Lorenz. Jumlah penerima manfaat pendapatan ditampilkan pada sumbu horizontal dalam

persentase kumulatif, bukan angka sebenarnya. Misalnya, titik 20 mewakili 20% penduduk termiskin (pendapatan terendah), titik 60 mewakili 60% penduduk berpenghasilan terendah, dan ujung sumbu mendatar mewakili jumlah 100% penduduk yang dihitung pendapatannya. Sumbu vertikal menggambarkan persentase penduduk yang menerima setiap jenis pendapatan. Nilai ini sama-sama kumulatif hingga 100%, sehingga kedua sumbu memiliki panjang yang sama dan membentuk persegi. Semakin besar derajat pertidaksamaan yang digambarkan, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kesamaan sempurna). Tumpang tindih kurva Lorenz dengan sumbu horizontal bawah dan sumbu vertikal kanan akan menunjukkan situasi ketimpangan sempurna yang paling ekstrem, seperti ketika semua pendapatan hanya diterima oleh satu individu.

2. Koefisien Gini

Menghitung luas antara garis diagonal (kesetaraan sempurna) dan kurva Lorenz dalam kaitannya dengan luas total setengah persegi di mana kurva Lorenz berada memberikan ukuran singkat dari tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dalam suatu negara.



Gambar 5.4 : Perkiraan Koefisien Gini

Koefisien Gini digambarkan pada Gambar 5.4 dengan membandingkan luas A (daerah yang terdapat garis

kemerataan sempurna dan kurva Lorenz) dengan luas segitiga BCD. Koefisien Gini dinamai menurut ahli statistik Italia C. Gini, yang menurunkan rumus pada tahun 1912. Koefisien Gini, yang berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) hingga 1, adalah ukuran ketimpangan agregat (ketidaksamaan sempurna). Koefisien Gini bervariasi mulai dari 0,50-0,70 untuk negara dengan kesenjangan tinggi, 0,36-0,49 untuk negara dengan kesenjangan sedang, dan 0,20-0,35 untuk negara dengan kesenjangan rendah. Rumus koefisien Gini dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut.

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i(Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

KG = angka Koefisien Gini

X_i = proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. Ekonomi pembangunan. Edisi Kelima. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Budiantoro, S., Martha, L.F., & Sagala, M. 2014. Penghitungan indeks kemiskinan multidimensional 2012–2014. Prakarsa: Jakarta Selatan.
- Kincaid, J.C. 1975. Poverty and equality in britain. Middlesex: Penguin Books.
- Mukhopaday, S. 1985. The poor in Asia: productivity-raising programmes and strategies. Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Center.
- Myint, H. 1973. The economic of the developing countries. Fourth Edition. London: Hutchinson.
- Todaro, M.P. & Stephen C. Smith. 2014. Economic development. Twelve Edition. England: Pearson Education Limited.
- UNDP. 2016. Human development report: human development for everyone. New York: United Nations Development Programme.

BAB 6

APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LUAR NEGERI

Oleh Andi Ika Fahrika

6.1 APBN

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat jadi perlu dipahami APBN itu disusun menjadi dua sisi yaitu ada dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran atau bisa dikatakan ada dari sisi pendapatan dan belanja dimana pendapatan itu adalah penerimaan dan belanja itu adalah pengeluaran APBN yang disusun berdasarkan UUD 1945 pada pasal 23 ayat 1 juga undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBN ini mulai berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, jadi APBN itu disusun pada tahun sebelumnya dan dipakai pada tahun sekarang. Intinya kalau pemerintah itu menggunakan APBN pada tahun 2020 berarti APBN yaitu sudah disusun di tahun 2019 jadi seperti itu penyusunan APBN itu dilakukan 1 tahun sebelumnya.

Fungsi APBN bagi negara yaitu: fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan dan fungsi alokasi. Penggunaan APBN bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pembangunan kualitas manusia secara merata pengawasan terhadap anggaran APBN demi persatuan integrasi bangsa dan untuk kebaikan rakyat. Sejatinya APBN berperan besar dalam nasib bangsa perancangan dan tujuannya begitu sempurna namun itu tergantung kepada bagaimana cara negara mengelolanya, oleh karena itu semuanya dimulai dari diri kita sendiri.

Dua sumber utama penerimaan negara yaitu pertama adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat berharga negara itu pun diterbitkan dalam bentuk konvensional dan dalam sukuk atau

berbasis Syariah, ada yang berbentuk rupiah, ada yang berbentuk valas. Di sisi lain ada penerimman dari pinjaman yang disupport atau dukungan dari lembaga multilateral yaitu dari Bank Dunia atau dari development bank atau bantuan dari bilateral seperti Jepang (JICA). Masing-masing bantuan itu punya kelebihan dan kekurangan. Sifat pinjaman-pinjaman itu berbeda-beda kondisinya tapi *cost of fund* nya itu lebih murah, namun ada keterbatasan kapasitas, dimana ada batasnya, tidak bisa melewati jumlah tertentu. Tapi secara overall dicari pinjaman *cost of ratenya* yang yang sebaik mungkin tapi dengan tetap menjaga risiko-risiko, namun kenyataannya para insvetor tidak tertarik SUN yang ditawarkan dan para investor lebih memilih untuk mengarahkan uangnya ke Amerika Serikat, dimana negara ini menaikkan tingkat suku bunga yang merupakan strategi yang baik menarik investor. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika itu akhirnya bank sentralnya kedepannya harus menaikkan lebih progresif lagi dan lebih baik lagi dan akhirnya itu juga terjadi di pasar keuangan global yang menghadapi ketidakpastian. Dan dapat memicu kenaikan suku bunga yang dapat juga di negara lain itu berarti ada kenaikan pembayaran utang

6.1.1 Desain APBN Yang Sehat

Pemerintah memiliki dua instrumen ekonomi penting untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial. Instrumen pertama lewat kebijakan fiskal (APBN) dan instrument kedua melalui kebijakan moneter. Di beberapa negara, kebijakan moneter tetap dalam kendali pemerintah, namun di Indonesia kebijakan moneter sepenuhnya menjadi otoritas Bank Indonesia (sejak 1999), walaupun dalam beberapa aspek pemerintah tetap bisa mempengaruhi kebijakan moneter lewat prosedur yang disepakati, misalnya mekanisme koordinasi kebijakan. Oleh karena itu, instrumen yang benar-benar sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah adalah kebijakan fiskal. Secara teoritis, APBN memiliki tiga fungsi pokok, yakni instrument stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Sayangnya, dalam sejarah perumusan dan pelaksanaan APBN di Indonesia, ketiga fungsi itu masih berjalan sangat jauh dari harapan.

6.1.2 Peran Anggaran Negara

Dengan melihat struktur yang seperti ini, maka memang APBN tidak memiliki kekuatan apapun untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, terutama yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat kecil. Belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, dan subsidi sudah menelan pengeluaran APBN sekitar 75%. Subsidi dimasukkan dalam pengeluaran yang tidak memiliki dampak besar bagi pembangunan ekonomi/sosial karena sekitar 72% subsidi habis untuk energi. Sementara itu, sekitar 65% subsidi energi dipakai untuk subsidi BBM dan sisinya (35%) digunakan untuk subsidi listrik.

6.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yakni segala sesuatu yang menyangkut penggunaan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. untuk mempengaruhi kurva AD dan — dalam kadar yang lebih rendah — mempengaruhi kurva $SRAS$.

Namun saat, besarnya, dan bauran perubahan tersebut menimbulkan masalah-masalah yang lebih sulit lagi. Setiap kebijakan yang dilakukan dalam rangka menstabilkan pendapatan nasional pada atau mendekati tingkat yang diinginkan (biasanya merupakan pendapatan nasional pada keadaan penggunaan tenaga-kerja penuh), dinamakan **kebijakan stabilisasi**. Bab ini pertama-tama akan membahas teori tentang kebijakan fiskal sebagai suatu alat kebijakan stabilisasi, dan kemudian berbagai kenyataan dalam pelaksanaannya.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa pemerintah mana pun bisa berperan besar dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Contoh yang baik sekali adalah membunganya pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan militer selama masa perang. Misalnya, pengeluaran pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dunia II meningkat dari 7,7 persen terhadap nilai GNP pada tahun 1940, menjadi 47,3 persen terhadap GNP pada tahun 1994. Dalam waktu yang bersamaan, tingkat pengangguran merosot dari 14,6 persen menjadi 1,2 persen. Para ahli ekonomi sepakat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah telah membantu menyebabkan turunnya tingkat pengangguran dan naiknya GNP. Pengalaman serupa juga terjadi selama negara-negara Eropa mempersenjatai dirinya kembali sebelum atau tepat sesudah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939.

Selama digunakan secara wajar, kebijakan fiskal bisa merupakan alat penting dalam menstabilkan perekonomian. Pada masa kegemilangan kebijakan fiskal dari tahun 1945 sampai akhir tahun 1965, banyak ahli ekonomi merasa yakin bahwa perekonomian bisa

stabil hanya dengan mengatur besar kecilnya kebanyakan ahli ekonomi sadar akan batas-batas kemampuan yang ada pada kebijakan fiskal.

6.2.1 Teori Kebijakan Fiskal

Kita sekarang akan membahas tentang kebijakan fiskal. Fiskal itu sendiri adalah pajak atau fiskal yang berhubungan dengan pendapatan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara itu dimana penerapan instrumen persis dengan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral di Indonesia adalah kebijakan fiskal yang dilakukan adalah pemerintah dari Presiden kemudian kementerian keuangan dan elemen yang terkait itu.

Ada 2 pendapatan dan pengeluaran dari pendapatan pendapatan negara pendapatan dari pajak dan ada juga pendapatan dari pajak dan pengeluaran negara juga ada pengeluaran rutin pengeluaran pembangunan dan orang lain yang nantinya biasanya disusun dalam APBN anggaran pendapatan dan belanja negara yang kemudian kebijakan tersebut membahas tentang kebijakan moneter dalam kebijakan itu. Ada dua cara yaitu kebijakan kontraktif dan ekspansif. Kebijakan kontraktif dilakukan saat terjadi ekonomi negara sedang mengalami pertumbuhan, ketika tapi ekonominya rendah maka yang dilakukan adalah ekspansif.

Ketika kementerian keuangan dan Presiden menetapkan adanya amnesty pajak ditujukan untuk mereka yang belum bayar pajak, tujuannya itu sebenarnya pemerintah agar mereka bayar pajak. Ketika pajak dibayar terus maka kemudian perekonomian bertumbuh. Ketika pertumbuhan ekonomi rendah maka yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif. Ada dua instrumen instrumen pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan adalah pengeluaran negara dan menurunkan pendapatan negara pengeluaran pendapatan negara juga misalkan Menunda untuk belanja atau apapun itu agar kita tidak konsumsi berlebihan yang menyebabkan peredaran uang juga akan menjadi naik kemudian pengeluaran pemerintah pemerintah melakukan pengukuran dengan pembangunan infrastruktur di masa sekarang pembangunan jalan tol dari 700 Jalan Apa tujuannya adalah pengeluaran pemerintah dinaikin perekonomian secara jangka panjang ketika pemerintah menaikkan pengeluaran untuk anggaran pembangunan jalan tol, waduk, pelabuhan, bandara atau apapun itu atau apapun itu tujuannya adalah

agar efisiensi dalam transportasi lebih murah sehingga ongkos kirim kemudian perjalanan barang dari satu ke kota menjadi lebih efisien.

Setiap kebijakan yang dilakukan dalam rangka menstabilkan pendapatan nasional pada atau mendekati tingkat yang diinginkan (biasanya merupakan pendapatan nasional pada keadaan penggunaan tenaga-kerja penuh), dinamakan **kebijakan stabilisasi**. Bab ini pertama-tama akan membahas teori tentang kebijakan fiskal sebagai suatu alat kebijakan stabilisasi, dan kemudian berbagai kenyataan dalam pelaksanaannya.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa pemerintah mana pun bisa berperan besar dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Contoh yang baik sekali adalah membunganya pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan militer selama masa perang. Misalnya, pengeluaran pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dunia II meningkat dari 7,7 persen terhadap nilai GNP pada tahun 1940, menjadi 47,3 persen terhadap GNP pada tahun 1994. Dalam waktu yang bersamaan, tingkat pengangguran merosot dari 14,6 persen menjadi 1,2 persen. Para ahli ekonomi sepakat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah telah membantu menyebabkan turunnya tingkat pengangguran dan naiknya GNP. Pengalaman serupa juga terjadi selama negara-negara Eropa mempersenjatai dirinya kembali sebelum atau tepat sesudah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939.

Selama digunakan secara wajar, kebijakan fiskal bisa merupakan alat penting dalam menstabilkan perekonomian. Pada masa kegemilangan kebijakan fiskal dari tahun 1945 sampai akhir tahun 1965, banyak ahli ekonomi merasa yakin bahwa perekonomian bisa stabil hanya dengan mengatur besar kecilnya kebanyakan ahli ekonomi sadar akan batas-batas kemampuan yang ada pada kebijakan fiskal.

6.2.2 Statement Kebijakan Moneter

a. Saldo Anggaran Belanja

Saldo anggaran belanja merupakan selisih antara seluruh penerimaan pemerintah dengan seluruh pengeluaran pemerintah. Dalam rumusan ini, *pengeluaran pemerintah* mencakup pembayaran transfer dan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian saldo anggaran belanja adalah selisih antara semua uang yang

dibayarkan ke luar. Atau dengan kata lain, selisih antara *penerimaan* dan *pengeluaran anggaran belanja*nya.

Perubahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah maupun kebijakan pajak akan berpengaruh pada saldo anggaran belanja. Jika pemerintah sama besarnya dengan pengeluaran, pemerintah mengalami anggaran belanja berimbang. Jika penerimaan melebihi pengeluaran, maka terjadi **surplus anggaran** belanja dan jika penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, maka terjadi defisit anggaran belanja. Jika pemerintah menambah pengeluarannya tanpa menaikkan tariff pajak, pengeluaran ekstra ini disebut *pembelanjaan defisit (deficit financed)*. Jika pengeluaran ekstra yang sama dibarengi dengan kenaikan tariff pajak yang sama (yang menghasilkan kenaikan pendapatan pemerintah dengan jumlah yang sama), kita namakan ini *perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran*.

b. Impikasi Defisit dan Surplus Anggaran pada Keuangan

Jika pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada yang diperolehnya, dari mana datangnya uang tersebut? Jika pemerintah memperoleh uang lebih banyak daripada yang dibelanjakannya, ke mana larinya uang tersebut?. Selisih antara pengeluaran dan penerimaan saat itu menggambarkan perubahan jumlah utang pemerintah.

Suatu defisit anggaran memerlukan peningkatan jumlah pinjaman; ada dua sumber pokok pinjaman, yaitu bank sentral dan sector swasta. Pemerintah meminjam uang dari sumber-sumber ini dengan jalan menjual surat berharga dan obligasi. Yang dimaksud **surat berharga pemerintah** (treasury bill) adalah suatu janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu antara 90 hari samapi 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya. *Obligasi* pemerintah adalah juga janji untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang, namun dalam jangka waktu yang lebih panjang, sekitar 25 tahun sejak tanggal diterbitkannya.

Jika pemerintah meminjam dana sector swasta, tindakan ini semata-mata merupakan pemindaan dana antara sektor itu. Namun, bila pemerintah “meminjam” uang dari bank sentral, ini berarti bank sentral menciptakan uang baru. Karena bank sentral mampu menciptakan uang sebanyak yang diinginkannya, tidak

adaa batas sampai seberapa besar pemerintah dapat “meminjam” uang dari bank sentral.

Keadaan surplus membuat pemerintah mampu mengurangi jumlah utangnya. Surat utang pemerintah dan obligasi bisa dilunasi dari kelebihan penerimaan pajak.

c. Paradoks Tabungan (*The Paradox of Thrift*)

Bila pemerintah menganut kebijakan anggaran belanja berimbang, (seperti yang telah banyak dilakukan oleh sebagian besar pemerintah selama masa Depresi Berat dalam tahun 1930-an), jumlah pengeluarannya menjadi prosiklis. Pemerintah harus membatasi pengeluarannya selama masa resesi, karena jumlah penghasilan pajaknya akan merosot pada masa itu. Selama masa pemulihan perekonomian, ketika penghasilan pajak mulai menanjak, pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah bergerak bersama dengan perekonomian, menambah dan mengurangi pengeluarannya sejalan dengan situasi.

Belum lama berselang orang-orang biasanya menerima pandangan bahwa pemerintah yang bijaksana harus selalu menyeimbangkan anggaran belanjanya; dan sesungguhnya, sekarang pun masih banyak orang yang sangat meyakini hal ini. Pandangan ini berdasarkan pada suatu analogi dengan perilaku yang nampaknya bijak bagi setiap rumah tangga. Rasanya sungguh bodoh dan tidak bijaksana kalau suatu keluarga secara terus menerus mengeluarkan lebih banyak dari pada penghasilannya saat itu.

d. Kebijakan Fiskal dengan Fungsi pengeluaran Swasta yang Stabil

Suatu masalah yang relatif mudah akan dihadapi oleh para penentu kebijakan fiskal, jika fungsi pengeluaran sektor swasta untuk keperluan konsumsi, investasi dan ekspor neto sudah pasti dan tidak berubah. Apa yang kemudian diperlukan adalah suatu perubahan fiskal yang tuntas akan menghapus senjang inflasi atau resesi yang ada.

Perubahan tarif pajak dan pengeluaran. Penurunan tarif pajak atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva AD ke kanan, sehingga kenaikan GNP. Kenaikan tarif pajak atau

pengurangan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva AD ke kiri, sehingga menurunkan jumlah GNP.

Pajak dan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menghapus senjang GNP, dengan jalan menggeser kurva AD. Perubahan anggaran belanja berimbang. Kebijakan lain yang tersedia bagi pemerintah adalah mengubah anggaran belanja berimbang dengan cara mengubah pengeluaran dan pajak secara berimbang. Katakan saja pemerintah menaikkan tariff pajak sehingga ada penghasilan tambahan sebesar Rp 1 trilyun, yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran agregat akan tetap tak berubah jika, dan hanya jika, uang Rp 1 trilyun yang diambil oleh pemerintah sektor swasta tadi, digunakan oleh sektor swasta juga. Seandainya hal ini yang terjadi, kebijakan pemerintah tersebut akan mengurangi pengeluaran sendiri sebesar Rp 1 trilyun. Pemerintah agregat, dan karena itu pendapatan nasional serta kesempatan kerja tidak akan berubah.

Namun kasus ini bukanlah yang biasa terjadi. Jika pajak tambahan sebesar Rp 1 trilyun ini dikumpulkan dari sektor rumah tangga, maka mereka biasanya cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk membeli barang-barang produksi dalam negeri sebesar kurang dari Rp 1 trilyun. Bila kecendrungan mengkomsumsi marjinal adalah sebesar 0,75, maka pengeluaran untuk konsumsi akan turun hanya sebesar Rp 750 milyar. Bila pemerintah membelanjakan seluruh Rp 1 trilyun untuk barang produksi dalam negeri, maka pengeluaran agregat akan meningkat sebesar Rp 250 milyar. Dalam hal ini, kenaikan anggaran belanja berimbang berupa kenaikan pengeluaran pemerintah memiliki akibat yang bersifat ekspansif, karena ia menggeser fungsi pengeluaran agregat ke atas dan karena itu juga menggeser kurva Aggregate Demand ke kanan.

Kenaikan anggaran belanja berimbang berupa kenaikan pengeluaran pemerintah akan membawa akibat yang bersifat ekspansif pada pendapatan nasional, dan penurunan anggaran belanja berimbang akan membawa akibat yang bersifat kontraktif.

Multiplier anggaran belanja berimbang mengukur akibat-akibat tadi. Besarnya multiplier dihitung dengan cara membagi perubahan pendapatan dengan perubahan anggaran belanjanya. Jadi, jika pengeluaran ekstra pemerintah sebesar

Rp 1 triliun (yang dibayar oleh pajak) menaikkan pendapatan sebesar Rp 500 milyar, maka multiplier anggaran belanja berimbang adalah 0,50; jika pendapatan meningkat Rp 1 triliun, multiplier adalah 1,00.

Sekarang bandingkan besarnya multiplier untuk anggaran belanja berimbang dan kenaikan peneluaran pemerintah yang dibiayai melalui defisit anggaran. Dengan kenaikan peneluaran yang dibiayai oleh defisit anggaran, tidak ada kenaikan tarif pajak, sehingga tidak terjadi pengurangan pengeluaran konsumsi untuk mengimbangi kenaikan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi, dengan kenaikan pengeluaran pada anggaran belanja berimbang, akan terjadi kenaikan tarif pajak yang mengimbangi kenaikan pengeluaran tersebut, sehingga terjadi penurunan konsumsi. Dengan demikian, multiplier anggaran belanja berimbang adalah jauh lebih kecil daripada multiplier pada anggaran defisit dengan tarif pajak yang tetap.

6.3 Utang Luar Negeri

Salah satu utang Luar negeri Indonesia sebesar 411,5 miliar dollar Amerika Serikat pada Kuartal 1 2022 turun dibandingkan posisi pada Kuartal sebelumnya yang sebesar 415,7 miliar dollar Amerika Serikat bila dibandingkan secara tahunan posisi ueland di Kuartal 1 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,1% year-on-year lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Kuartal sebelumnya yang sebesar 0,3% year on Year pemerintah hingga akhir Maret 2022 sebesar 196,2 miliar dollar Amerika Serikat menurun dari posisi Kuartal sebelumnya sebesar 200,2 miliar dollar Amerika Serikat secara tahunan pemerintah terkontraksi 3,4% year-on-year melanjutkan kontraksi pada Kuartal sebelumnya sebesar 3% year on Year penurunan tersebut terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara atau SBN sudah jatuh tempo baik domestik maupun SDN salah.

Selain itu adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode januari hingga Maret 2022 yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral di samping itu volatilitas di pasar keuangan Global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN domestik ke instrumen lain sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN

domestik penarikan pada Kuartal 1 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah termasuk upaya. Penanganan covid-19 dan program ekonomi nasional yang Salah satu 2022 tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terjaga di Kisaran 33,7% turun dibandingkan rasio pada Kuartal sebelumnya sebesar 35%.

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 periode yang sama dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 kemarin ini adalah laporan per bulan Mei 2022 kemarin kita akan *full screen* untuk melihat disitu ada dinamika pemirsa pada bulan Maret sampai dengan Juli 2021 seperti konstan begitu angkanya kemudian melonjak di bulan Agustus September kemudian mulai turun di bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 naik lagi di bulan Februari 2022 dan terakhir turun di angka 411.517 juta US Dollar. Hutang Indonesia ini bisa dikatakan dari berbagai sektor bukan hanya utang pemerintah kalau kita berbicara utang Indonesia tetapi juga dari utang swasta dan jumlah ini pemirsa angka 411.517 juta jalan ini turun 4,2 miliar dolar Amerika dibandingkan Kuartal sebelumnya jika di bandingkan juga dengan akhir Maret 2021, memberitahukan Indonesia juga turun 1,1% penurunan utang ini terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara sudah jatuh tempo baik domestik maupun valas ada pula pelunasan yaitu atau pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari sampai dengan Maret 2022 yang sebagian besar ini adalah pinjaman bilateral. Selain itu bisa menurun dan utang luar negeri Indonesia atau Thailand terjadi pada utang pemerintah Bank Sentral maupun swasta Bank Indonesia juga mencatat struktur atau uang luar negeri urusan luar negeri Indonesia yang masih sehat dalam kondisi terkendali Hal ini terlihat dari rasio Indonesia terhadap PDB di kisaran 33,7%.

Selain itu Indonesia juga dikatakan sehat karena ini tetap didominasi oleh uelen berjangka panjang sebanyak 87,9% dari total utang luar negeri Indonesia kemudian banyak sekali kalau kita melihat angkanya begitu banyaknya hutang Indonesia dengan angka 411.517 juta per bulan Maret 2022 kemarin atau kalau kita konversikan dengan kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar hari ini sebesar 6102 triliun buat apa saja kita akan lihat tempat berikutnya yang pertama adalah utang Indonesia ini digunakan untuk membangun fasilitas umum yang endingnya adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia begitu

kemudian kedua adalah untuk bantuan sosial dan juga untuk subsidi kita tahu pandemi covid-19 menggerus ekonomi hampir semua negara termasuk negara-negara maju sekalipun itu adalah Amerika Serikat untuk itu supaya pemerintah Indonesia ini juga tetap ingin masyarakatnya aman begitu keadaan ekonominya mereka harus terpaksa menaikkan jumlah rasio hutangnya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kemudian ada juga memberikan subsidi dan yang keempat adalah untuk gaji PNS jadi setidaknya adalah hal-hal atau alokasi dari porsi Utang Republik Indonesia kita berikutnya akan melihat pemirsanya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani terkait dengan kondisi Utang Indonesia. Hal ini disampaikan pada bulan Januari 2022 oleh Sri Mulyani ia mengatakan kalau belanja dalam keadaan baik, kemudian menjadi infrastruktur juga bagus maka SDM berkualitas buat Indonesia ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi hutangnya termasuk SBSN atau surat berharga Syariah negara pasti kita bisa bayar.

Kalau kita melihat diagram batangnya jumlah utang Indonesia akan terus menurun di setiap periode waktu yang ada kenaikan tetap akan kembali turun ini yang menandakan bahwa Indonesia bisa membayar hutangnya berikutnya adalah percaya dengan strategi ekonomi Indonesia kita akan menuju ke yang lebih baik. Berikutnya ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para ekonom memberikan sambutan dalam kegiatan peresmian pembukaan saraf yang 100 ekonomi Indonesia yang pertama adalah soal industri jadi nantinya ke depan Indonesia tidak lagi ekspor bahan mentah tetapi sudah bahan setengah jadi dan lebih bagus adalah sudah bahan yang jadi begitu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. kemudian soal digitalisasi UMKM ada sebanyak 15,5 juta UMKM dari sekitar 60 juta UMKM ini sudah masuk dalam platform digital akan semua dana akan didorong untuk masuk ke platform digital terakhir adalah strategi ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengatur keuangan.

6.3.1 Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya

Nasib Indonesia sejak adanya utang luar negeri mengalami perubahan dan segar atau utang dalam jumlah besar mulai merambah sektor-sektor penanaman modal utama terutama sektor industri manufaktur dan ekstraksi bahan mentah dengan model perencanaan pembangunan bertahap jangka panjang ala Rostow perekonomian

Indonesia Nasional pun mulai melaju bahkan pernah sedemikian pesatnya mencapai angka pertumbuhan rata-rata 7 sampai 9% pertahun terutama pada dasawarsa 1980 menjadikan negeri ini masuk dalam kelompok negara-negara industri baru bersama para macan Asia lainnya Korea Hongkong Taiwan Singapura Malaysia dan Thailand pada saat negara-negara berkembang lainnya di Amerika Latin dan Afrika dilanda kesulitan keuangan serius yang kemudian melahirkan krisis hutang dunia bahkan Indonesia kemudian terus tercatat sebagai salah satu negara yang mampu dan dengan setia melakukan utang sehingga dijuluki sebagai anak manis dari membayar cicilan pokok dan bunganya.

Tabel 6.1 : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Lembaga Keuangan	11,937	14,919	18,326	17,212	21,400	19,233	18,447	19,208	19,422	18,564	18,503
	1.1 Bank	11,057	13,496	16,805	15,658	19,936	18,133	17,295	17,533	17,601	18,133	17,423
1. Utang Jangka Pendek / Short Term Debt	1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	880	1,422	1,520	1,555	1,464	1,100	1,153	1,676	1,821	431	1,079
	<i>Nonbank Financial Corporations</i>											
≤ 1 tahun / Year	2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan /	11,480	18,979	18,513	18,818	19,990	16,525	21,298	25,025	26,362	25,017	26,525
	<i>Nonfinancial Corporations</i>											
	Total	23,417	33,897	36,839	36,031	41,390	35,758	39,746	44,233	45,784	43,581	45,028
	1. Lembaga Keuangan	6,020	9,651	12,404	15,165	20,422	23,764	21,615	21,354	25,531	28,073	27,670
	1.1 Bank	3,325	4,970	6,212	8,773	11,737	13,787	12,952	12,767	16,766	17,213	17,575
2. Utang Jangka Panjang / Long Term Debt	1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank /	2,695	4,681	6,192	6,392	8,685	9,978	8,662	8,587	8,765	10,859	10,095
	<i>Nonbank Financial Corporations</i>											
> 1												

<i>tahun / Year</i>												
	2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan / <i>Nonfinancial Corporations</i>	54,352	63,184	77,002	91,365	101,781	108,600	100,362	106,259	117,839	129,038	137,735
	Total	60,372	72,835	89,407	106,530	122,203	132,364	121,977	127,613	143,371	157,111	165,405
	1. Lembaga Keuangan	17,957	24,570	30,730	32,378	41,822	42,997	40,062	40,563	44,953	46,637	46,173
	1.1 Bank	14,382	18,466	23,018	24,431	31,673	31,920	30,247	30,300	34,367	35,346	34,999
TOTAL (1 + 2)												
	1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank / <i>Nonbank Financial Corporations</i>	3,575	6,103	7,713	7,947	10,149	11,077	9,815	10,263	10,586	11,291	11,174
	2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan / <i>Nonfinancial Corporations</i>	65,833	82,162	95,515	110,183	121,771	125,125	121,661	131,284	144,202	154,055	164,260
	Total	83,789	106,732	126,245	142,561	163,592	168,123	161,722	171,847	189,155	200,692	210,433

Sumber : Bank Indonesia :Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vo. 10 Tahun 2020

Indonesia terjadi krisis moneter maka timbullah prakarsa Bank Dunia IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya memberikan Dana Bantuan dan pinjaman baru dalam jumlah besar kemudian ternyata justru semakin membuka borok-borok sistem perekonomian Indonesia yang selama ini sebagian besarnya dibiayai oleh hutang luar negeri. Citra tentang Indonesia yang selama ini tidak ada masalah dengan hutang luar negeri selama 32 tahun dikaburkan dengan istilah bantuan pembangunan serta merta mengalami perubahan mulailah bermunculan analisis-analisis terbuka dan berani memperlihatkan data telanjang tentang berbagai penyakit hutang luar negeri yang pernah dialami oleh semua negara pengutang beras dan bermasalah di seluruh dunia adalah jumlahnya yang fantastik sampai Juli 1999 jumlah utang luar negeri Indonesia telah mencapai angka 150 us dolar suatu jumlah yang mencatat rekor sediaan hutang terbesar diantara semua negara pengutang berat di dunia ketiga melampaui rekor fantastic yang pernah dicapai oleh Meksiko Brazil dan Argentina pada dasawarsa utang 1980 hari. Jika tolak ukur Bank Dunia digunakan bahwa jumlah utang luar negeri lebih besar dari benda dapatan di mana Hutang perkapita rata-rata US\$ 377 sementara pendapatan perkapita pertahun dalam nilai aktualnya hanya US\$ 425 maka sebenarnya Indonesia sudah layak dimasukkan dalam kelompok negara-negara miskin pemungutan berat bahkan proyeksi Bank Dunia sendiri pun memperlihatkan jumlah utang luar negeri Indonesia tetap besar dan tidak lebih kecil dibandingkan 10 tahun lalu US\$ 49,3 miliar pada tahun 2010 itu pun masih dengan asumsi jika keadaan perekonomian bisa dipulihkan secepatnya Sejak saat itu

Kedua semua indikator utama ekonomi makro dalam hubungannya kemampuan membayar kembali hutang luar negeri yang selama ini dijadikan alasan untuk memuji Indonesia dan ternyata banyak yang dikabulkan rasio pembayaran hutang Indonesia ternyata sudah mencapai 54% bahkan sudah di atas 30% sejak tahun 1985 artinya melampaui ambang batas wajar dan sehat yang dipersyaratkan oleh bank dunia dan IMF sendiri dan lebih gawat lagi Indonesia ternyata sudah mengalami defisit dalam transaksi hutang hutang luar negerinya itu bahkan sudah berlangsung sejak tahun 1987 sebesar Rp. 2,04 triliun terus dan bertambah tidak pernah surplus lagi sampai tahun 1998 lalu dengan angka US\$ 12,6 Miliar bahkan Bank Dunia

sendiri memproyeksikan akan tetap defisit meskipun terus mengecil jumlahnya sampai tahun 2006 nanti dengan angka US\$ 4,59 miliar .

Amerika Utara dan Jepang yang menjadi kiblatnya selama ini Indonesia telah mengerahkan segenap sumber dayanya membangun sektor industri yang sangat berorientasi pada pasar ekspor dalam industri barat berteknologi tinggi dan padat modal yang sebenarnya tidak banyak manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan penguatan basis produksi ekonomi mereka. Retorika fundamental ekonomi kita kuat yang berusaha yang diyakinkan oleh rezim Soeharto ternyata keropos dan ambruk total ketika krisis ekonomi Asia Timur dan Tenggara mencapai Indonesia pertengahan 1997 yang lalu dalam sekejap hampir semua sektor industri yang banyak dikembangkan selama 32 tahun seperti industri manufaktur bisnis properti jasa perbankan pabrik pesawat terbang dan lain-lain itu semua berantakan sementara harga-harga komoditi ekspor utama tetap melimpah. Data Bank Dunia memperlihatkan bahwa antara tahun 1980 sampai 1997 pada harga konstan dalam tahun 1990 harga-harga komoditi ekspor andalan Indonesia selama ini terus anjlok di pasar dunia

DAFTAR PUSTAKA

- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-5.pdf>
Bank Indonesia :Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol 10.
Tahun 2020
- Devi, S. I. 2016. *Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia*. Medan. Universitas Negeri Medan.
- George, Susan, 1992. *The Debt Boomerang*, New Jersey: Westview Press.
- Jhingan, M.L., 1983. *The Economic of Development and Planning*, 16th Edition, New Delhi: Vicas Publishing House, Ltd
- Lindert, H. P. 1994. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, T. H. T. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Widharma, I. W. G . 2013. *Utang Luar negeri Pemerintah Indonesia: Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh*. Skripsi. Bali. Universitas Udayana.
- Yuniarti, D. 2005. *Uji Kausalitas Utang Luar Negeri dan Capital Flight di Indonesia, 1974-2002*. Jurnal Ekonomi Vol 10 No 3. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

BAB 7

SEKTOR DAN KEBIJAKAN MONETER

Oleh Sari Utami

7.1 Sektor Perekonomian Di Indonesia

Perdagangan merupakan sektor unggulan karena Indonesia ada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Sektor kunci kimia dan pupuk dan pestisida adalah sektor kunci karena Indonesia ada sumberdaya bahan baku yang melimpah dan tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Jumlah industri meningkat, dan produk dari industri tersebut telah diekspor ke negara lain. Mesin, alat-alat, dan listrik merupakan sektor kunci pabrikan yang bergerak dibidang ini dan menjadi peluang kerja. Industri karet dan plastik karena Indonesia memiliki sumberdaya dan ladang karet serta biji plastik yang jumlahnya jumlahnya. dan industri kertas, barang dan karton karena sumber daya melimpah kertas dan luas hutan kayu. Sektor Jasa merupakan sektor kegiatan jasa meliputi pemerintahan umum dan pertahanan, baik pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, jasa kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa perbengkelan, jumlah sektor jasa melimpah, kegiatan yang ada di sektor ini mencakup kegiatan pembuatan, pembangunan, pemasangan, dan perbaikan berat maupun ringan berbagai jenis konstruksi seperti bangunan tempat tinggal dan tempat tinggal, jalan, jembatan, pelabuhan, dll Angkutan darat karena luas wilayah daratan dan angkutan ini adalah sarana transportasi utama dalam perekonomian karena dengan kondisi Indonesia yang harus masuk ke pelosok desa, moda transportasi ini sangat efisien. Sektor Listrik, gas, dan air, sektor air bersih mencakup pengelolaan, pemurnian, dan kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, yaitu layanan bersih melalui pipa ke sektor lain sebagai pemakai. Sektor Perternakan, sektor pertanian, pertambahan pertambahan hewan dan peternakan hasil-hasil. Pertambahan hewan meliputi anak dan populasinya, selisih populasi. Data pemotongan dan populasi hewan terdiri dari ditjen peternakan, departemen, dan data ekspor dan impor hewan terdiri dari BPS.

Dengan lebih banyak informasi tentang sektor ekonomi Indonesia, diharapkan pemerintah lebih menekankan pada pencapaian daya saing, meskipun negara masih berfokus pada daya saing absolut dan komparatif. Tapi dengan era globalisasi ini maka Indonesia harus menciptakan keunggulan kompetitif dengan fokus atau melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. (Lismuba & Mukhyi., 2013)

7.2 Kebijakan Moneter

Banyak kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan pakaian rumah sampai dengan hiburan seperti menonton bioskop atau pergi berlibur untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut kita memerlukan uang tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan kita harus mengeluarkan uang Rp500.000, tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama harganya naik jadi 2 kali lipat dengan uang yang ada saat ini. Kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita, artinya nilai uang kita telah berkurang separuhnya kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh dan inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Di sekitar banyak sekali kasus kemiskinan, kemudian juga banyak terjadi pengangguran. Nah, kenapa Bank Indonesia itu tidak mencetak uang lebih banyak saja? Yang sebanyak-banyaknya biar rakyat lebih mudah untuk mendapatkan uang. Jikalau uang dicetak sebanyak-banyaknya terus kita memegang uang yang banyak hasilnya adalah kemampuan membeli kita itu sangat tinggi dan barang yang

kita butuhkan itu lebih mudah untuk didapatkan. Kalau uang banyak yang beredar akan beresiko terjadinya inflasi yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang untuk itu harus ada yang namanya kebijakan moneter.

Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga dengan kata lain Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain yaitu harga bahan makanan atau harga barang, akibat kebijakan atau Bank Indonesia juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil caranya bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan tim pengendalian inflasi daerah dapat mempengaruhi tingkat inflasi Bank Indonesia tersebut dan akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga (BI Rate), jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita bisa memahami jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan sebaliknya juga jika Bank Indonesia menurunkan kebijakan ini semua dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.

7.3 Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah untuk membawa perekonomian kembali ke keadaan yang diinginkan (lebih baik) dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Manfaat dari kondisi yang lebih baik termasuk peningkatan output dan, dalam beberapa kasus, stabilitas harga (inflasi terkontrol). Dimana Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat, berdampak pada menurunnya daya beli. Sering pula diikuti oleh menurunnya tingkat tabungan dan atau tingkat investasi karena konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Dalam ilmu ekonomi, ada dua macam inflasi: inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga (*cost-push inflation*) dan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga (*deman-pull inflation*). (Ajuna, 2017)

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung, perlu dilakukan restrukturisasi sektor keuangan yang sangat penting. Seperti dikatakan sebelumnya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia maupun negara-negara lain terutama disebabkan oleh dua faktor, yang keduanya terkait dengan masalah mata uang(a) Pertama, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. (b) Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.(Purwanto, 2017)

Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan pemeliharaan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti peningkatan suku bunga, peningkatan operasi pasar, dan peningkatan cadangan aset dan simpanan terkait. Dalam praktiknya, kebijakan moneter setiap negara berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan jenis transaksi yang terjadi dalam perekonomian negara tersebut.(Hiya & Siregar, 2022)

Kebijakan moneter menurut Suryono tahun 2000 jadi beliau mengatakan bahwa kebijakan moneter ini diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat suku bunga jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan dalam kebijakan moneter dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bisa juga dengan mempengaruhi penawaran uang di masyarakat juga ada dari Sukirno tahun 2012 beliau kebijakan moneter ini adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah jumlah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga

dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.(Bank Indonesia, 2015)

Penggunaan uang merupakan faktor penting dalam ekonomi. Namun, perbedaan dalam sistem ekonomi akan menghasilkan perspektif yang berbeda tentang produksi moneter. Sistem ekonomi konvensional berbeda dari sistem ekonomi Islam dalam hal produksi moneter. Sistem moneter Islam merupakan sub sistem atau bagian dari sistem ekonomi Islam yang ingin dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah mewujudkan dan mewujudkan kemashlahatan. *Maqashid Syariah* mengedepankan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu memajukan keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia, dan mengedepankan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu memajukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus bagi orang-orang tertentu.(Novitasari, 2020)

Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas keuangan untuk membuat ekonomi riil dan harga melalui mekanisme transmisi yang terjadi. Untuk itu, investor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transmisi di negaranya. Mekanisme transmisi moneter dapat bekerja melalui berbagai saluran seperti suku bunga, agregat moneter, kredit, tukar nilai, aset harga, dan ekspektasi Akibatnya, pemahaman transmisi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan aktivitas moneter dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor riil dan harga di masa depan.(Ascarya, 2012)

Perubahan jumlah uang yang beredar dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Moneter dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) ekspansif moneter dan (a) Ekspansif moneter (*Monetary expansive policy*). Ini adalah metode untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia. Upaya ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) saat perekonomian sedang mengalami resesi atau depresi. Ini juga dikenal sebagai manajemen keuangan jangka panjang. (b) Monetering Kontrak (Kebijakan kontraktif moneter). Ini adalah metode untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia. Hal ini dilakukan ketika perekonomian sedang mengalami inflasi. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan moneter.(Purwanto, 2017)



Gambar 7.1 : Kesimpulan Pengertian Kebijakan Moneter

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022

Jadi dari beberapa kesimpulan dari pengertian di atas maka, kebijakan moneter ini bisa diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah dalam hal ini bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian atau moneter negara jadi kebijakan moneter di sini meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral atau Bank Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga yang ada dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian itu.

Dengan kata lain kebijakan moneter bisa kita artikan sebagai tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar suatu perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang diukur dari kesempatan kerja, kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Jadi menggunakan kebijakan moneter ini pemerintah akan mencari langkah-langkah untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian, dimana dalam jumlah uang yang beredar itu ada banyak sehingga menyebabkan harga-harga naik dan terjadilah inflasi.

Ketika kita berbicara tentang kebijakan moneter maka kita bisa menyebut bahwa kebijakan itu adalah sebagai sebuah kebijakan

pemerintah untuk mengatur perekonomian secara makro melalui pengaturan jumlah uang beredar. Diantara kelebihan sektor moneter ini bahwa kebijakan moneter ini tidak menimbulkan masalah dalam perekonomian konvensional yang menerapkan sistem konvensional misalkan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan fiskal menambah pengeluaran pemerintah maka itu akan menimbulkan masalah *crowding-out* yang mana akan menyebabkan salah satunya tingkat suku bunga naik. Meskipun dalam ekonomi Islam tentunya tidak akan terjadi hal seperti itu karena dalam ekonomi Islam suku bunga sendiri itu adalah sesuatu yang diharamkan artinya tidak diterapkan sama sekali.

7.4 Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

- a. Kebijakan Ekspansi Moneter, Ini juga dikenal sebagai kebijakan jangka panjang, karena pemerintah menggunakannya untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika terjadi depresi ekonomi dan deflasi, pemerintah akan menggunakan kebijakan ini (kenaikan nilai mata uang). Penyebab depresi ekonomi dan Deflasi antara lain meningkatnya jumlah orang yang ingin membeli barang tertentu. Bila ini terjadi, pemerintah akan mengambil tindakan untuk menstabilkan perekonomian agar terus tumbuh. Tujuan ekspansi moneter adalah untuk menstabilkan perekonomian agar nilai uang tetap stabil sesuai dengan harapan, tujuan, dan kepentingan pelaku ekonomi. Arus uang yang beredar seimbang dengan barang dan jasa yang beredar di masyarakat yang dimaksud. Kegiatan ini dapat meningkatkan neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Jika dari pihak menurunkan suku bunga yang rendah maka pengusaha terutama pengusaha pengekspor barang dapat meningkatkan jumlah ekspor dan mengembangkan usahanya.
- b. Kebijakan Moneter Kontraktif Kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini bisa karena terjadinya Inflasi. Kebijakan ini bisa disebut kebijakan uang ketat. Bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Kebijakan suku bunga naik atau turunnya bisa dilihat dari

permintaan masyarakat. Dari sana Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang tapi sesuai permintaan dari masyarakat dari situ bisa tercapainya target dari Bank Indonesia. Reaksi dari bank Indonesia dilihat dari bagaimana permintaan masyarakat sendiri apabila permintaan uang menurun yang terjadi adalah bank Indonesia akan mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat, begitu sebaliknya apabila permintaan uang meningkat maka Bank Indonesia menambah penwaran uang yang beredar. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu semakin banyak pendapatan dari masyarakat maka permintaan uang masyarakat akan meningkat.

7.5 Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas rupiah. Tujuan ini senada dengan apa yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Stabilitas rupiah antara lain mempengaruhi harga barang dan jasa, yang keduanya dipengaruhi oleh inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia meningkatkan laju kebijakan moneter dengan memfokuskan pada inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) melalui modifikasi sistem moneter (*free floating*). Pentingnya stabilitas nilai dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan yang stabil tidak dapat dilebih-lebihkan. (Bank Indonesia, 2015)



Gambar 7.2 : Tujuan Kebijakan Moneter (*Single Objective*)

Sumber: (Bank Indonesia, 2015), h. 10.

Oleh karena itu, Bank Indonesia juga melakukan riset kebijakan moneter dalam rangka mengurangi volatilitas kebijakan moneter, daripada menaikkan kebijakan moneter ke level yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, Bank Indonesia berkeinginan untuk melakukan operasi moneter melalui pengembangan sasaran-sasaran moneter (seperti beredarnya suku bunga) dengan tujuan utama memerangi sasaran laju inflasi yang diberlakukan pemerintah. Dari segi operasional, sasaran moneter tersebut di atas menggunakan berbagai instrumen, antara lain pengoperasian pertukaran mata uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing, penetapan simpanan minimum, penetapan pagu kredit, dan penetapan pagu kredit. penetapan batas kredit. Bank Indonesia juga dapat melakukan operasi moneter sesuai dengan prinsip syariah.(Purwanto, 2017)



Gambar 7.3 : Tujuan Kebijakan Moneter (*Multiple Objectives*)
 Sumber: (Bank Indonesia, 2015), h. 10.

Adapun Beberapa tujuan dari Kebijakan Moneter secara umum yaitu:

1. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi
 artinya itu suatu keadaan dimana perekonomian yang berjalan itu sesuai dengan harapan dan tujuan serta tujuannya berkesinambungan. Ketika suatu ekonomi itu stabil secara sederhana bisa digambarkan sebagai suatu keadaan dimana

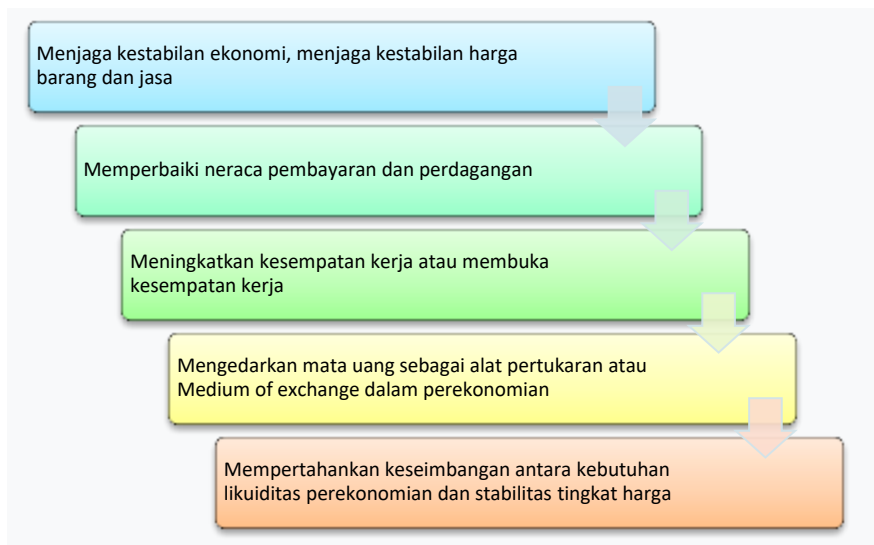
uang yang beredar itu sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Jadi jangan sampai uang yang beredar itu banyak tapi barang dan jasa yang berlaku di pasar itu sedikit, Menyebabkan arus ekonominya itu tidak lancar karena interaksi dan keseimbangan antara harga barang keseimbangan antara barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar itu jadi indikator dimana suatu perekonomian itu stabil atau tidaknya. Menjaga kestabilan harga menjadi uang dan barang dan jasa

itu akan menimbulkan harga menghasilkan kesepakatan harga dan ketika ekonomi stabil ekonomi stabil itu harga barang dan jasa itu akan stabil juga gitu sedangkan ketika keadaan ekonomi yang stabil harga di pasaran itu akan selalu aktif atau naik turun dan lebih parahnya lagi perekonomian ketika harga itu naik naik terus kayak gitu terjadi ketika ekonomi stabil itu Harga pasti stabil juga tapi ketika perekonomian stabil harganya itu bakalan turun naik turun naik turun naik turun naik terus kayak .

2. Memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan.
3. Meningkatkan kesempatan kerja atau membuka kesempatan kerja

Jadi ketika ekonomi stabil di mana keadaan perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa para pengusaha dan investor ini akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau suatu negara dan dengan begini perusahaan ini bakalan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja untuk mengembangkan perusahaannya dan ketika harga barang atau perputaran barang dan jasa dengan uang yang seimbang maka ekonomi perekonomian akan seimbang berjalannya sehingga menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja ini juga banyak beda dengan ketika tidak seimbang pertukaran barang dan jasa nya sia pemerintah perusahaan juga pastinya akan bangkrut dan tidak akan butuh tenaga kerja buat mereka.

4. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau *Medium of Exchange* dalam perekonomian.
5. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.



Gambar 7.4 : Tujuan Kebijakan Moneter

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022

7.6 Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter terdiri dari: (Bank Indonesia, 2015).



Gambar 7.5 : Instrumen Kebijakan Moneter

Sumber: (Bank Indonesia, 2015)

Instrumen kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar terdiri dari:(Marzuki, 2021)

Gambar 7.6 : Instrumen Kebijakan Moneter



Gambar 7.6 : Instrumen Kebijakan Moneter

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022

Adapun penjelasan dari beberapa instrumen kebijakan moneter di atas sebagai berikut:(Purwanto, 2017) (Kholiq, 2016)

1. Kebijakan diskonto (*Discounto Rate*)

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bak umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada system bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabahnasabahnya. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdangan. Dan yang kedua adalah dengan member pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan

minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral: (i) dengan memberikan pinjaman atau (ii) dengan membeli surat-surat tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada bank sentral, maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas nama pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bunga (*Bank Rate*). Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan murunkan suku diskonto. Dengan penurunan suku bunga diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya kegiatan ekonomi Negara akan

menurun. Instrumen diskonto ketika terjadi inflasi kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dengan naiknya tingkat suku bunga masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu bunga yang tinggi akan mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikurangi.

2. Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*)

Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*). Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembeliannya itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut maka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi Negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah: 1) Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh

bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi. 2) Dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan itu. Dalam teori, bank sentral dapat secara efisien dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar. Di sebagian Negara operasi pasar terbuka tidak dapat dilakukan oleh karena pasar uang dan pasar modalnya belum berkembang dan oleh sebab itu jumlah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi.

3. Kebijakan Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat dalam bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Contoh,

misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seperti ini operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan member efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.

4. Penetapan Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia memiliki suatu wewenang dalam mencapai tujuannya untuk mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi suatu acuan Bank Umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh sebab itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan.

5. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Otoritas moneter berusaha untuk memberikan suatu arahan serta petunjuk untuk mengendalikan peredaran uang beredar. Proyek ini diluncurkan oleh bank sentral bukan dengan membatasi jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh bank, tetapi dengan memungkinkan komunikasi berkelanjutan dengan bank yang bersangkutan. Bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukkseskan tindakan tersebut dalam pertemuan ini. Dari pertemuan ini, bank akan belajar tentang banyak langkah yang harus diambil agar inisiatif pemerintah saat ini mencapai hasil dan hasil yang diinginkan. Ada banyak perbedaan dari satu waktu dan berikutnya dalam hal prosedur yang harus diikuti oleh bank. Ada beberapa alasan mengapa penting bagi bank untuk melaksanakan tugas terkait kredit tertentu secara tepat waktu.

Namun, ada hal-hal tertentu yang sedang dilakukan yang membantu meningkatkan jumlah uang yang tersedia dan tidak hanya jenis bisnis dan investasi yang dilakukan oleh bank. Ini berarti bahwa ketika menggunakan pertimbangan moral untuk melakukan transaksi keuangan, bank dapat

melakukan transaksi kuantitatif, tetapi mereka juga dapat melakukan transaksi kualitatif. Dengan mendirikan bank moral, Anda dapat membujuk bank untuk menambah atau menambah jumlah rekening yang mereka miliki, dengan cara menambah jumlah rekening yang mereka miliki di sektor tertentu, atau untuk membuat perubahan jumlah uang yang mereka pegang di suatu negara pada sektor tertentu. Sampai titik di mana cadangan bank sentral habis oleh transaksi antar bank, masing-masing bank sangat menderita. Karena itu, keberhasilan pekerjaan yang dimotivasi secara moral meluas sampai ke titik di mana transaksi antar bank melakukan pekerjaan yang diamanatkan oleh bank sentral.(M. Ridhano, 2021)

Secara umum tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga kestabilan dari jumlah mata uang yang beredar baik itu secara internal ataupun secara eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata dan menstabilkan kegiatan ekonomi. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam hubungan setiap manusia.(Purwanto, 2017)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُرُونَ

Terjemah Kemenag 2019

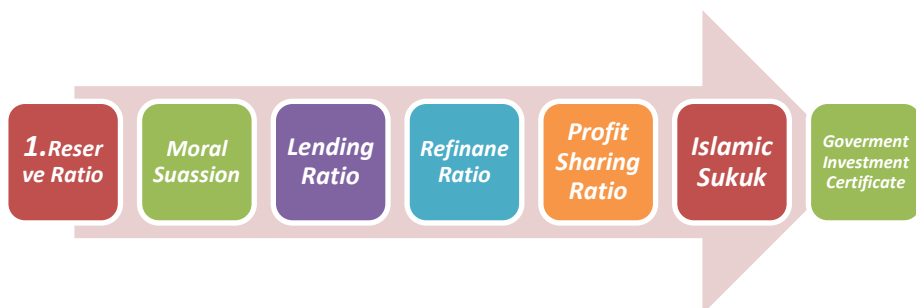
152. Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil) mengatakan bahwa kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya harus menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan Meskipun tujuan

akhirnya sama, metode pelaksanaannya berbeda dari tujuan akhir. konvensional, khususnya dalam pemilihan target dan instrumen. Perbedaan utama antara kedua jenis instrumen ini adalah bahwa prinsip syariah tidak membolehkan keuntungan apa pun dibuat berdasarkan nominal atau tingkat pengembalian (suku bunga). Karena itu, jika sesuai dengan target pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.(Purwanto, 2017)

Seperti yang dikatakan sebelumnya, instrumen moneter Islam didasarkan pada hukum Islam. Hampir setiap instrumen moneter, apakah itu instrumen moneter tradisional atau surat moneter, berisi bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung suku bunga (suku bunga bank, suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka dengan suku bunga tetap) tidak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter syariah. Namun, beberapa instrumen moneter konvensional, seperti Giro Wajib Minimum, plafon kredit keseluruhan dan selektif, bujukan moral, dan pergeseran basis moneter, dapat digunakan untuk mengendalikan uang dan kredit, menurut beberapa ekonom Islam. Tidak ada sistem moneter dalam ekonomi Islam, maka bank sentral tidak dapat memanipulasi tingkat diskonto.(Novitasari, 2020)

Di bawah ini ada beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol dan mengawasi jumlah uang beredar dalam suatu sistem ekonomi. Secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, sebagai berikut: (Hiya & Siregar, 2022) (Kholiq, 2016)



Gambar 7.7 : Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2022

1. *Reserve Ratio*

Suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

2. *Moral Suassion*

Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikururkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

3. *Lending Ratio*

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).

4. *Refinance Ratio*

Sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

5. *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang

beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

6. *Islamic Sukuk*

Obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

7. *Government Investment Certificate*

Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate.

8. *Reksadana Syariah*

Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang. Sehingga Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Menurut UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan Reksadana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana Syariah misalnya tidak menginvestasikan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, seperti membangun pabrik minuman keras yang mengandung alkohol, beternak babi, dan sebagainya.

7.7 Sasaran Operasional Kebijakan Moneter

Salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku

bunga sebagai sasaran operasional. Berkaitan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa: i) terdapat suatu keyakinan yang cukup kuat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga menjadi semakin penting dibandingkan dengan transmisi melalui jumlah uang beredar sehingga penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan; ii) terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga (deposito berjangka satu bulan dan kredit modal kerja); dan iii) suku bunga PUAB dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran operasional karena memiliki kaitan yang erat dengan suku bunga deposito, mencerminkan kondisi likuiditas di pasar uang, dan sekaligus dapat dipengaruhi oleh instrumen OPT khususnya suku bunga SBPU.(Warjiyo & Zulverdi, 2003)



Gambar 7.8 : Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Sumber: (Bank Indonesia, 2015)

Terdapat beberapa syarat bagi efektivitas sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional, yaitu: i) Sasaran akhir kebijakan moneter sebaiknya diprioritaskan pada pengendalian underlying/core inflation, yaitu komponen inflasi yang diyakini benar-benar dipengaruhi faktor-faktor moneter; ii) Untuk meminimalkan pengaruh negatif

tekanan-tekanan eksternal terhadap efektivitas kebijakan moneter, sistem nilai tukar yang fleksibel (mengambang) menjadi pilihan utama dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap; iii) Anggaran pemerintah harus “fully budget” dalam arti setiap defisit/surplus anggaran harus setiap saat dibiayai/diserap oleh instrumen utang pemerintah; iv) Untuk memelihara kestabilan permintaan di pasar uang, kinerja sistem pembayaran harus terus-menerus ditingkatkan.(Warjiyo & Zulverdi, 2003)



Gambar 7.9 : Sasaran Operasional Kebijakan Moneter
 Sumber: (Bank Indonesia, 2015)

7.8 Sasaran dan Strategi Kebijakan Moneter Islam

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, system keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lainnya. system keuangan pada zaman Rasullulah digunakan *bimetallic satandard*, yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Sebuah pertanyaan awal yang mesti dijawab adalah apakah keberadaan *fiduciary money* dalam ekonomi islam diperbolehkan? Adakah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar fiduciary money dengan menghilangkan pengaruh suku bunga dan instrumen lain yang dilarang dalam syariah? Dalam Al-Qur'an

maupu Sunnah tidak ditemukan secara spesifik keharusan untuk menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai standard nilai tukar uang (*full-bodied monometallic standard*). (Jannah et al., 2020) Khalifah bin Khatab (23/644), telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang. Oleh beberapa fuqaha terkemuka keberadaan uang fiducier ini juga mendapatkan dukungan seperti Ahmad Ibn Taimiyah (505/1328). Merujuk dari pendapat para fuqaha ini tidak ditemukan akan keharusan memakai emas dan perak full-bodied money merupakan sebuah kelaziman. Namun disamping membolehkan uang fiducier, Ibn Taimiyah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan kehilangan uang dinar dan emas dari peredaran kerana adanya hukuman Gresham. Imam Al-Ghazali (1058-1111) memperbolehkan menggunakan uang yang tidak dikaitkan dengan emas/perak selama pemerintha mampu menjaga nilainya. (Monicha & Hamid, 2019)

Kesetabilan makro ekonomi merupakan hasil dari sebuah upaya yang konsisten dan integral yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan dan fiskal. Di bidang moneter, strategi kenijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan secara kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dngan tetap memberikan ruang gerak pada kestabilan pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Di bidang perbankan, restrukturisasi dan reformasi sector perbankan terus dilakukan untuk memperbaiki struktur menuju system perbankan yang tangguh yang ikut memebrikan kontribusinya dalam menciptakan stabilitas system keuangan. (Ajuna, 2017)

7.9 Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain: (Husnansyah, 2016)

1. Mazhab pertama (Iqtishaduna) Pada masa awal islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-

perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa. Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran islam yang melarang praktek riba.

2. Mazhab Kedua (*Mainstream*) Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran melarang praktek penumpukan uang (*money hoarding*) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*idle*) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah

instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

7.10 Kebijakan Moneter Tanpa Bunga

Perkembangan bank syariah di Indonesia berdampak pada pengembangan mekanisme kebijakan moneter yang berbeda dengan bank konvensional. Tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor sebanyak 2.934 (OJK 2015). Sehingga suku bunga berbasis riba tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah yang mengharamkan riba. Maka pemerintah melalui UU No. 3 Tahun 2004 bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional dan syariah secara bersamaan demi mendukung lembaga perbankan syariah. Langkah utama dimulai dengan pengenalan instrumen moneter baru pada Februari 2000, dengan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dengan sistem pemberian bonus. Penentuan tingkatan bonus merupakan rate kebijakan moneter syariah (Ascarya, 2012). Namun kemudian diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad ju'alah pada tahun 2008. Dengan demikian penggunaan suku bunga pada kebijakan moneter konvensional dapat diganti dengan bagi hasil, fee, atau margin. Tingkat imbalan hasil SBIS mengacu kepada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan, namun bila SBI satu bulan tidak digunakan lagi, dapat mengacu kembali kepada SBIS dengan tenor terpendek. (Triwahyuni, 2021) Langkah ini merupakan terobosan baru bagi Bank Indonesia, sebagai bentuk respon positif pemerintah dalam menyambut pangsa bank syariah yang terus berkembang pesat. Berangkat dari hal tersebut, mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dibahas lebih mendalam untuk mengetahui alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter syariah serta negara mana yang telah menerapkan kebijakan tersebut. (Hiya & Siregar, 2022)

Bunga sesungguhnya merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor

riil dan moneter. Dalam perekonomian islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (profit and sharing), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka akan meningkat pula.(Hiya & Siregar, 2022)

Namun, tidak adanya instrumen bunga di dalam ekonomi islam menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan sistem bunga ini. Maklum dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrumen bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menafikan kehadiran bunga jelas akan menimbulkan tanda yang besar. Sistem keuangan islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil.(Purwanto, 2017) Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.(M. Ridhano, 2021) Dalam perekonomian islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaga adalah sistem perbankan islam. Pada perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen

bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi.(Purwanto, 2017)

Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi, antara lain:(Aisyah Nasution, 2020)

1. Karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan resiko tertentu, akan mendiamkan uangnya tidak produktif tersimpan.
2. Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang, apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Kenali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan nada orang yang menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja.
4. Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan.

Karena itu, kebijakan moneter yang diinformasikan dalam sebuah perekonomian islam, adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Harusnya disadari, untuk mewujudkan sasaran islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus sejalan seirama.

7.11 Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perubahan, sistem keuangan inilah yang paling dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah di gunakan *bimetallic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat.(Novitasari, 2020) Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relative stabil dengan nilai kurs

dinar-dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara suplay dan demand. Misalkan pada pemerintahan Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.(Kholiq, 2016)

Disamping nilai tukar pada dua pemerintahan ini, pada masa yang lain nilai tukar dinar dan dirham mengalami berbagai fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai 1:50 instabilitas dalam nilai tukar uang ini akan mengakibatkan terjadinya *bad coins to drive good coins out of circulations* atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik,(Sari, 2019) dalam literatur konvensional peristiwa ini disebut sebagai *hukum Gresham*. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328 M), dimana mata uang logam yang beredar terbuat dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak peristiwa ini terjadi bila uang dari jenis dinar (emas) dan (dirham) menghilang dari peredaran karena adanya perbedaan nilai kurs dengan daerah lain. Sebagai contoh bila kurs diwilayah pemerintahan Bany Mamluk 1:20 antara dinar-dirham, sedangkan di daerah lain 1:25 maka emas yang berada di daerah Bany Mamluk akan dibawa ke daerah lain yang akan dapat ditukarkan dengan 25 fulus, tentu saja perbedaan nilai ini akan mengakibatkan emas dipedaran akan menghilang. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.(Amri, 2018)

7.12 Manajemen Kebijakan Moneter

Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan.(Jannah *et al.*, 2020)

Dalam teori Keynes telah dikenal bahwa adanya permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. Pergerakan suku bunga merupakan refleksi

pergerakan permintaan uang spekulatif. Semakin tinggi permintaan uang untuk spekulasi, maka semakin rendah tingkat bunga yang berlaku dipasar. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan uang spekulatif menurun, maka suku bunga akan relatif meningkat. Penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, menghilangkan insentif orang untuk memegang uang idle sehingga mendorong orang untuk melakukan :(Kholiq, 2016)

- Qard (meminjamkan harta kepada orang lain)
- Penjualan (muajjal)
- Mudarabah

Para pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar, jadi semakin tinggi permintaan uang untuk investasi di sektor riil atau kebutuhan akan persediaan dana untuk investasi semakin besar maka, tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan akan relatif menurun. Karena besarnya tingkat actual return ini tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga maka akan menjadikan permintaan uang akan lebih stabil.(M. Ridhano, 2021)

7.13 Prinsip Kebijakan Moneter Islam

Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.(Wahyudi, 2013)

Dalam Islam kebijakan moneter berpijak pada prinsip dasar ekonomi Islam yang terdiri dari:(Jannah et al., 2020)

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan pemilik Allahlah yang mutlak.
2. Manusia adalah penguasa (kholifah) dunia, namun dia bukan pemilik eksklusif.

3. Segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah karena kekuasaan Allah, dan karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan untuk dimiliki oleh saudara yang lebih beruntung.
4. Situasi tidak dapat diulang atau diceritakan kembali.
5. Situasi harus diselesaikan.
6. Mengurangi kesenjangan antar individu dalam bidang ekonomi dapat mengurangi konflik antar negara.
7. Menetapkan kewajiban yang wajib dan sukarela bagi semua individu, terutama bagi masyarakat miskin.

Dalam hal teknologi, mata uang Islam harus didasarkan pada riba dan uang kertas. Dalam Islam, riba, termasuk deposito bank, sangat dilarang. Dengan tambahan pengharaman ini, maka bunga bank yang selama ini menjadi instrumen kunci dalam pengelolaan moneter tidak diperlukan lagi. Dalam Islam, pengelolaan uang didasarkan pada seperangkat prinsip. (Novitasari, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nasution, S. 2020. " *Dual Banking System* " Untuk Mencapai Sasaran Akhir Periode 2012-2019.
- Ajuna, L. H. 2017. Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(1), 104–117. <https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>
- Amri, H. 2018. Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan. *Islamic Banking*, 3(2), 1–16.
- Ascarya, A. 2012. Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Bank Indonesia. 2015. Kebijakan moneter Paper. *Kebijakan Moneter*. [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan Moneter.pdf](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan%20Moneter.pdf)
- Hiya, N., & Siregar, S. 2022. Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4307>
- Husnansyah, F. 2016. Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Interest Rate Channel dan Asset Price Channel Di Indonesia Pada Masa Inflation Targeting Framework (ITF). *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 16.
- Jannah, N., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Negeri, U. I., & Utara, S. 2020. *Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*. 8–12. [file:///C:/Users/USER/Downloads/Diktat Nurul Jannah.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Diktat%20Nurul%20Jannah.pdf)
- Kholiq, A. 2016. *Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*.
- Lismuba, I. M., & Mukhyi., A. 2013. Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input-Output. *PESAT: Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur Dan Teknik Sipil*, 5, 8–9.
- M. Ridhano, Y. 2021. *Analisis Kebijakan Moneter Dan Transaksi Uang Elektronik Terhadap Inflasi Di Indonesia Dalam Persepektif Islam*. 6.
- Marzuki, S. N. 2021. Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 201–216.
- Monicha, E., & Hamid, M. S. 2019. *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah*. <http://repo.iainbukittinggi.ac.id/id/eprint/245>

- Novitasari, C. 2020. *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1–25.
- Purwanto, H. 2017. Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Sari, U. W. 2019. *PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD MUSYA'RAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2019 (STUDI. 13(2)*, 9–25.
- Triwahyuni, T. 2021. Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–210. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>
- Wahyudi, A. 2013. Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>
- Warjiyo, P., & Zulverdi, D. 2003. Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(1), 25–53. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i1.159>

BAB 8

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Oleh Ayu Pradaning Ratri

8.1 Pendahuluan

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari sisi internal dan sisi eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor riil seperti produksi, konsumsi dan investasi, dan perkembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang beredar. Sementara kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor riil, fiskal dan moneter. Itu semua bisa dilihat melalui neraca pembayaran.

Neraca pembayaran di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Selain itu, neraca pembayaran menjadikan tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi ekspor impor serta memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan. Dengan kata lain, neraca pembayaran sangat banyak membantu pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, perdagangan, dan pembayaran internasional.

8.2 Pengertian Neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain (Nopirin, 2013). Menurut *Balance of payment manual* (BPM) yang diterbitkan IMF (1993) definisi neraca pembayaran internasional (*Balance of payment*) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu negara dan penduduk luar negeri (*rest of the world*) untuk suatu periode tertentu biasanya satu tahun. (Kuncoro, 2015). Sedangkan menurut Amir Machmud (2016), neraca

pembayaran juga merupakan ikhtisar transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing dan transaksi keuangan dan neraca lalu lintas modal serta keuangan dan item-item keuangan.

Neraca pembayaran merupakan salah satu komponen yang juga penting dalam proses pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang karena menyangkut dua aliran sumber daya keuangan yaitu:

- (a) Arus dana investasi asing dan sumber dana lainnya. Arus ini masuk melalui sarana modern perusahaan multinasional
- (b) Arus sumber daya pemerintah berupa bantuan luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral

Mari kita bahas komponen-komponen neraca pembayaran di Indonesia satu persatu, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, transaksi finansial.

8.2.1 Transaksi Berjalan

Menurut Bank Indonesia (2008) transaksi berjalan (*current account*) mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa (*goods and service*), pendapatan (*income*) dan transfer berjalan (*Current transfer*) dengan bukan penduduk. Komponen transaksi berjalan adalah neraca perdagangan, transaksi jasa-jasa, pendapatan primer dan pendapatan skunder dan transfer berjalan. Perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor riil yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor tercermin pada perkembangan ekspor dan impor baik barang maupun jasa pada transaksi berjalan. Demikian pula transfer, seperti hibah dari luar negeri kepada pemerintah yang merupakan bagian dari penerimaan anggaran negara tercatat dalam transaksi berjalan.

Namun transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan.

8.2.2 Transaksi Barang

Neraca perdagangan adalah transaksi ekspor dan impor barang (komoditas) atau dinamakan dengan istilah perdagangan nyata. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan neraca (yaitu perbedaan antara ekspor dan

impor) perdagangan barang berwujud. Transaksi ini digolongkan menjadi dua yaitu migas dan non migas.

Adanya proses penerimaan pembayaran maka semua ekspor barang termasuk ke dalam transaksi kredit. Sedangkan impor barang termasuk ke dalam transaksi debit karena ada kewajiban pembayaran kepada negara lain. Apabila nilai neraca positif berarti ekspor barang melebihi impor, dimana negara akan mengalami surplus neraca perdagangan. Atau sebaliknya nilai neraca negatif berarti impor barang melebihi ekspor, dimana negara akan mengalami defisit di neraca perdagangan.

8.2.3 Transaksi Jasa

Transaksi Jasa dikenal dengan perdagangan tidak nyata. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri (ekspor) dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia (impor). Contohnya: kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, pendapatan dari investasi modal dan beberapa kegiatan jasa lainnya.

Nilai transaksi jasa suatu negara positif apabila transaksi jasa lebih banyak menjual jasa ke luar negeri dan membelinya dari negara lain. Nilai transaksi jasa suatu negara negatif apabila transaksi jasa lebih banyak membeli jasa dari luar negeri dan menjual jasa ke luar negeri.

8.2.4 Pendapatan Primer

Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran yang diartikan sebagai perolehan atau hasil berasal dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. Contoh: kupon, diskon dan bunga.

8.2.5 Pendapatan Sekunder

Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran, yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder berupa transfer penghasilan atau remitansi TKA/TKI dan transfer-transfer lainnya contoh: hadiah, hibah, jasa dan uang.

8.2.2 Transaksi Modal

Transaksi modal biasanya digunakan untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi, dan transfer modal.

Transaksi modal tidak memiliki kontribusi dalam neraca perdagangan sehingga transaksi ini jarang digunakan. Transaksi modal dibagi menjadi dua, yaitu transfer modal dan aset keuangan non produksi

Cara menghitung transaksi modal dengan menjumlahkan nilai bersih yang diperoleh dari transfer modal dan aset *non produced non financial assets*. Di sebelah sisi kredit diwakili oleh transaksi aliran modal masuk (*capital inflow transaction*), sedangkan sisi debit diwakili oleh transaksi aliran modal keluar.

8.2.3 Transaksi Finansial

Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi porto folio, derivatif finansial dan investasi lainnya. Adanya komponen-komponen yang dikategorikan transaksi finansial sebagai berikut:

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan investor dengan menanamkan modal yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan indonesia atau luar negeri.

b. Investasi portfolio (*Portfolio Investment*)

Investasi portfolio adalah investasi yang keuntungan di dapat dari investasi di surat-surat berharga. Investasi ini bersifat jangka pendek.

c. Derivatif Finansial

Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang di dapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option (*warrant*) dan derivatif lainnya (*forward, future, dan swap*).

d. Investasi lainnya

Investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam tiga kategori sebelumnya. Pada sisi kewajiban, investasi lainnya meliputi pinjaman luar negeri baik itu pemerintah atau swasta dan hutang dagang (*trade credit*) yang didapatkan dari eksportir barang dan jasa di luar negeri. Pada sisi aset, investasi lainnya contohnya simpanan penduduk yang ada di perbankan luar negeri dan piutang dagang eksportir Indonesia kepada pembeli di luar negeri.

8.3 Fungsi Neraca Pembayaran

Kondisi masuk dan keluarnya dana yang terjadi pada neraca pembayaran dapat memperlihatkan bahwa neraca pembayaran berfungsi sangat baik. Suatu negara harus memperhatikan transaksi ekonomi agar berjalan dengan sebagaimana mestinya bahkan dapat diusahakan untuk berjalan ke arah yang menguntungkan. Neraca pembayaran memiliki fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional
- b. Sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara.
- c. Sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara.
- d. Sebagai data-data keuangan internasional.
- e. Sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor mengalami keuntungan dan bisa tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran tepat waktu
- f. Sebagai alat untuk mencatat anggaran yang dikeluarkan dalam transaksi internasional.

8.4 Tujuan Neraca Pembayaran

Penyusunan neraca pembayaran yang dilakukan setiap negara memiliki tujuannya masing-masing. Setiap tujuan akan selalu memberikan manfaat bagi suatu negara. Adapun tujuan-tujuan dari penyusunan neraca pembayaran sebagai berikut;

- a) Untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara
- b) Untuk mengetahui aliran sumber daya yang ada di setiap negara, sehingga terlihat apakah negara tersebut pengespor barang atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal
- c) Untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara
- d) Untuk mengetahui penyusunan anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Dengan memperhatikan neraca pembayaran tahun lalu maka dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya.
- e) Untuk mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Apakah negara tersebut mampu dan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suatu negara lain
- f) Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi
- g) Untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara.

8.5 Metode Pencatatan Neraca Pembayaran

Pencatatan transaksi dalam neraca pembayaran mempergunakan prinsip *double entry system*, artinya setiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit dengan nilai yang sama. Neraca pembayaran disajikan dalam bentuk vertikal yaitu dari atas ke bawah sehingga tidak tampak sisi debit atau kredit. Berdasarkan konvensi, pencatatan pada sisi kredit diberi tanda plus (+) sedangkan pencatatan pada sisi debit diberi tanda minus (-).

Setiap transaksi yang mengakibatkan adanya pengurangan aset atau penambahan kewajiban dicatat pada sisi kredit sedangkan transaksi yang mengakibatkan penambahan aset atau pengurangan kewajiban dicatat pada sisi debit. Kita bisa melihatnya, dibawah ini tentang transaksi dalam neraca pembayaran.

Tabel 8.1 : Pencatatan Transaksi dalam Neraca Pembayaran

	Kredit	Debit
Kewajiban	↑	↓
Aset	↓	↑

Sumber: F.X Sugiyono,2001.

Berdasarkan prinsip pencatatan diatas, transaksi yang dicatat pada sisi debit dan kredit antara lain sebagai berikut;

a. Sisi Debet

- 1) Impor barang
- 2) Jasa-Jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk (import jasa)
- 3) Pemberian hadiah kepada bukan penduduk (transfer)
- 4) Penjualan kekayaan yang dimiliki bukan penduduk
- 5) Pembelian surat-surat berharga milik bukan penduduk
- 6) Penanam modal langsung oleh penduduk di luar negeri
- 7) Pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk
- 8) Pembayaran utang kepada bukan penduduk
- 9) Pembelian emas milik bukan penduduk

b. Sisi Kredit

- 1) Ekspor barang
- 2) Jasa-jasa yang diberikan penduduk kepada bukan penduduk
- 3) Penerimaan hadiah dari bukan penduduk
- 4) Penjualan kekayaan milik penduduk oleh bukan penduduk
- 5) Penjualan surat berharga milik penduduk kepada bukan penduduk
- 6) Penanaman modal langsung oleh bukan penduduk
- 7) Pinjaman yang diberikan bukan penduduk
- 8) Pembayaran utang oleh bukan penduduk
- 9) Penjualan emas milik penduduk

Neraca pembayaran dapat dikatakan surplus apabila transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri (transaksi kredit). Atau jika jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang

dilakukan oleh suatu negara. Surplus bisa terjadi bila negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih untuk melakukan pembangunan secara nasional pada suatu negara

Sedangkan neraca pembayaran seimbang apabila transaksi pembayaran ke luar negeri (transaksi debit) jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri (transaksi kredit).

Dan apabila neraca pembayaran defisit, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika negara terus menerus mengalami defisit maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit berkembang. Cara mengatasi defisit yaitu membatasi komoditas impor dan meningkatkan komoditas ekspor dengan bantuan pemerintah. Peningkatan komoditas ekspor tergantung dari kualitas barang, tingkat harga dan nilai kurs yang berlaku. Pemerintah ikut andil dalam peningkatan ekspor yaitu diversifikasi ekspor, subsidi dan premi ekspor, devaluasi, pengendalian harga dalam negeri dan perjanjian internasional.

8.6 Neraca Pembayaran Indonesia

Setelah kita mengetahui neraca pembayaran, maka kini kita membahas Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Neraca Pembayaran Indonesia adalah statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Sedangkan transaksi Neraca Pembayaran Indonesia terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal dan transaksi finansial. Sedangkan statistik Neraca Pembayaran merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi lainnya seperti pendapatan domestik bruto (PDB), dan jumlah uang yang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Penyesuaian statistik neraca pembayaran Indonesia dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian
- b. Mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain
- c. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan
- d. Mengetahui permasalahan utang luar negeri

- e. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar
- f. Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa
- g. Sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional (*national account*) (Bank Indonesia,2008).

Transaksi yang dicatat di NPI memperlihatkan perubahan pemberian (tanpa imbalan), timbul atau hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja atau penyediaan modal.

Berikut ini contoh transaksi yang dicatat dalam NPI

- (1) Penjualan dan pembelian barang dengan negara lain seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi
- (2) Pemberian/ penggunaan jasa kepada/dari negara lain seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing dan pemakaian jasa pengangkutan kapal laut asing oleh perusahaan domestik.
- (3) Pendapatan atas investasi seperti dividen dan bunga, yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di indonesia dan penduduk indonesia yang berinvestasi di luar negeri
- (4) Investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang seperti pembelian sertifikat bank indonesia (SBI) oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik
- (5) Pemberian/penerimaan uang, barang dan jasa tanpa ada imbalan langsung seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dari negara asing.

Jasa adalah transaksi penyediaan jasa antara penduduk dan bukan penduduk. Ada 12 jenis jasa yang terdapat dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), bisa dilihat dibawah tabel ini:

Tabel 8.2 : Jasa- Jasa di Dalam Neraca Pembayaran Indonesia

No	Nama	No	Nama
1	Transportasi	7	Komputer
2	Travel	8	Royalti
3	Komunikasi	9	Personal
4	Konstruksi	10	Kultural
5	Asuransi	11	Rekreasi
6	Keuangan	12	Pemerintah

Sumber: diolah sendiri, 2022.

8.3 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia

Pada sebelum krisis ekonomi, neraca perdagangan mengalami defisit jika kita mengeluarkan transaksi ekspor dan impor minyak dan gas bumi (migas), sedangkan neraca perdagangan migas akan menunjukkan surplus. Sedangkan neraca jasa Indonesia selalu menunjukkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya sehingga defisit.

Baik neraca perdagangan maupun neraca jasa, akan menunjukkan defisit pada neraca jasa nonmigas dan surplus pada neraca jasa migas. Defisit pada neraca jasa terutama berkaitan erat dengan pengeluaran untuk pembayaran bunga utang dan biaya transportasi impor barang.

Transaksi berjalan secara umum selalu menunjukkan defisit dan transaksi modal pada umumnya mengalami surplus karena masih terdapatnya kebutuhan dana dari luar negeri.

Kemudian terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 2001, sehingga neraca pembayaran Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan. Neraca perdagangan non migas menunjukkan defisit telah berubah menjadi surplus. Surplusnya terkait dengan besarnya penurunan kegiatan impor non migas.

Neraca jasa non migas maupun migas juga tetap menunjukkan defisit. Sedangkan transaksi berjalan mengalami perubahan menjadi surplus. Kondisi ini terjadi karena dampak dari penurunan kegiatan

impor non migas. Sedangkan transaksi berjalan migas tetap menunjukkan surplus.

Pada saat krisis ekonomi, transaksi modal menunjukkan defisit. Efek dari penurunan secara keseluruhan aliran dana dari luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Sementara pembayaran pokok pinjaman tetap tinggi. Transaksi modal juga berkaitan dengan cukup tinggi nya risiko investasi pada periode tersebut, sehingga mengakibatkan turunnya investasi asing di Indonesia

Terjadi lagi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang memberikan tekanan yang cukup signifikan pada kinerja neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran selama tahun 2008 mengalami defisit sebesar US\$ 1,9 miliar, namun demikian transaksi berjalan masih mampu mencatat surplus US\$ 0,1 miliar. Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik kinerja neraca pembayaran tahun 2009 dan 2010 mengalami perbaikan. Adanya kenaikan, transaksi berjalan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing mencatat sebesar US\$ 10,2 miliar dan US\$ 6,3 miliar.

Kemudian Bank Indonesia mencatat bahwa NPI sepanjang tahun 2019 mencatat adanya surplus yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar US\$4,7 miliar. Perkembangan tersebut di dorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, neraca perdagangan yang mengalami surplus. Neraca perdagangan surplus karena turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor seperti B20. Sedangkan pada tahun 2020, NPI mengalami defisit karena adanya pandemi Covid 19, yang mengakibatkan perekonomian seluruh dunia mengalami penurunan yang luar biasa. Adanya pengurangan arus modal masuk dari sisi kewajiban, penurunan neto investasi langsung akibat dari kenaikan arus modal keluar di sisi aset terkait akuisisi salah satu perusahaan asing sektor manufaktur (Murdo dan Junaidi, 2020). Kemudian pada tahun 2021 NPI mulai mengalami kenaikan atau surplus di segala sisi, apakah di neraca perdagangan, transaksi berjalan, transaksi modal atau jasa. Pada tahun 2022, NPI banyak ditopang oleh kinerja ekspor non migas yang semakin baik. Adanya defisit neraca perdagangan yang dipengaruhi oleh kenaikan impor merespons terjadinya peningkatan permintaan mobilitas masyarakat dan tingginya harga minyak dunia. Diharapkan kedepannya BI bisa mencermati dinamika perekonomian

global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2008. *'Laporan Perekonomian Indonesia, Jakarta*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2015. *'Indikator Ekonomi, Cetakan Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Machmud, Amir. 2016. *'Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta*
- Murdo, Ilham Tri dan Junaidi Affan. 2020. *'Impact of Covid 19 On The Indonesian Economy From Balance Of Payments Side, Journal of Actuak Economics and Business . Volume 17 No.2*.
- Nopirin. 2013. *'Ekonomi Moneter Buku 2.BPFE, Yogyakarta*.
- Purnama, S. G. (2018 *'Diktat Dasar Kesehatan Lingkungan, pp. 1–97*.
- Sugiyono,F.X. 2001. *'Neraca Pembayaran, Metodologi, Penerapan dan Perkembangan, Bahan Mengajar pada Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank)Angkatan XXIX (tidak dipublikasikan), Institut Bankir Indonesia, Jakarta*.

BAB 9

PELAKU-PELAKU EKONOMI

Oleh Ria Rahmawati

9.1 Rumah Tangga Konsumen

Kegiatan pokok ekonomi terdiri dari produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut ada beberapa pihak yang menjalankan yaitu, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang/ jasa. Orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Orang/ badan usaha ini yang menjalankan kegiatan ekonomi disuatu negara.

Rumah Tangga Konsumen (RTK) (Agung; 2019) merupakan pelaku ekonomi yang mengkonsumsi atau menghabiskan nilai guna barang/ jasa. Barang/ jasa diperoleh dari rumah tangga produsen, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam melakukan konsumsi, rumah tangga konsumen harus mengeluarkan pengorbanan berupa uang dan waktu.

9.1.1 Peran Rumah Tangga Konsumen

Peran sebagai produsen. Rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi, sebagai pemilik faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal dan skill. Faktor produksi ini yang akan digunakan rumah tangga produsen untuk proses produksi.

a. Alam

Alam dalam kegiatan ekonomi dapat berupa tanah, air, barang tambang, hutan atau yang lainnya. Alam merupakan sumber daya yang telah disediakan oleh alam semesta yang dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Balas jasa yang akan diperoleh oleh rumah tangga konsumen atas penyediaan faktor produksi alam berupa sewa.

b. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan orang yang akan dimanfaatkan tenaganya untuk kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen sebagai penyedia tenaga kerja yang akan digunakan oleh rumah

tangga produsen dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang/ jasa. Tenaga kerja yang disediakan dapat berupa **tenaga** kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan/ profesional. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki skill/terlatih/khusus, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Balas jasa yang akan diterima berupa upah/ gaji.

c. Modal

Modal digunakan sebagai faktor produksi turunan. Modal dapat berupa uang, gedung, mesin yang mendukung kegiatan produksi lebih mudah dan berkembang. Balas jasa penyediaan modal berupa bunga.

d. Skill

Skill atau kewirausahaan merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola kegiatan produksi supaya dapat berjalan efektif dan efisien. Skill merupakan faktor produksi turunan yang dapat membantu produksi untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan dengan produsen-produsen yang lain. Balas jasa dari penyediaan skill/ wirausaha berupa laba.

Peran sebagai konsumen. Balas jasa dari penyediaan faktor produksi digunakan untuk membeli barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumen merupakan kelompok pelaku ekonomi yang paling banyak mengkonsumsi berbagai macam barang. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan.

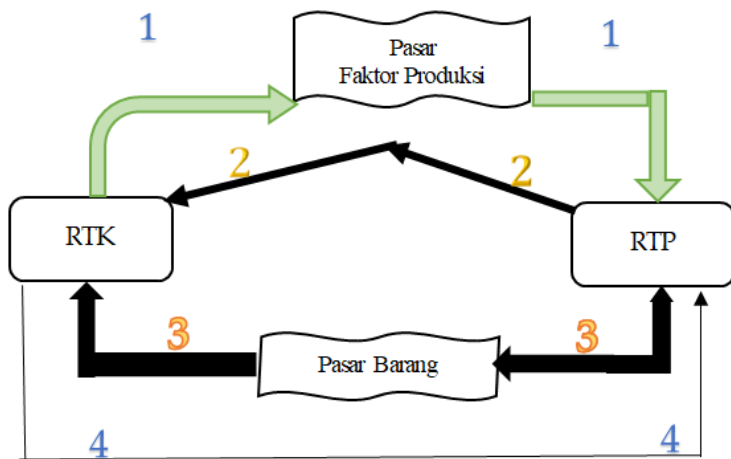
9.2 Rumah Tangga Produsen

Rumah Tangga Produsen (RTP) merupakan orang/ badan yang kegiatannya adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Rumah tangga produsen memanfaatkan faktor-faktor produksi dari RTK untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain melakukan proses produksi RTP juga menentukan pembelian barang modal. Rumah tangga produsen dapat mengajukan kredit untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya dalam kegiatan produksi. Rumah tangga produsen membayarkan pajak terhadap pemerintah atas penjualan atau badan usahanya.

9.2.1 Peran Rumah Tangga Produsen

Peran sebagai produsen. Rumah tangga produsen mengkombinasikan faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal, skill) untuk menghasilkan barang/ jasa. Rumah tangga produsen berusaha menghasilkan barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil produksi sebagai pendapatan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kegiatan produksi barang/ jasa.

Peran sebagai konsumen. Peran rumah tangga produsen sebagai konsumen yaitu, menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen (alam, tenaga kerja, modal, skill). Menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang/ jasa, kemudian dijual ke masyarakat. Rumah tangga produsen akan mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai dalam menggunakan faktor produksi tersebut.



Gambar 9.1 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 2 Sektor
(sumber: Gilarso; 2004)

Nomor 1. Arus faktor-faktor produksi dari RTK berupa alam, tenaga kerja, modal dan skill yang akan dibeli oleh RTP.

Nomor 2. Arus balas jasa yang diterima oleh RTK dari RTP dari penggunaan faktor produksi yaitu; sewa, upah, bunga dan laba.

Nomor 3. Arus hasil produksi berupa barang/ jasa dari RTP ke RTK

Nomor 4. Arus uang, yaitu pembelian barang/ jasa dari RTK kepada RTP

9.3 Rumah Tangga Negara

Rumah tangga negara (RTN) adalah pelaku ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Rumah tangga negara melakukan produksi untuk menyediakan barang/ jasa yang tidak disediakan oleh RTP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Rumah tangga negara juga memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian. Membuat kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter atau kebijakan non fiskal dan non moneter (T.Puji; 2021).

Rumah tangga negara memiliki beberapa kegiatan dalam perekonomian yaitu: memungut pajak dari RTK dan RTP, menerbitkan uang, mengendalikan perekonomian, melakukan pinjaman luar negeri, menggunakan faktor produksi serta membeli hasil produksi dari RTP.

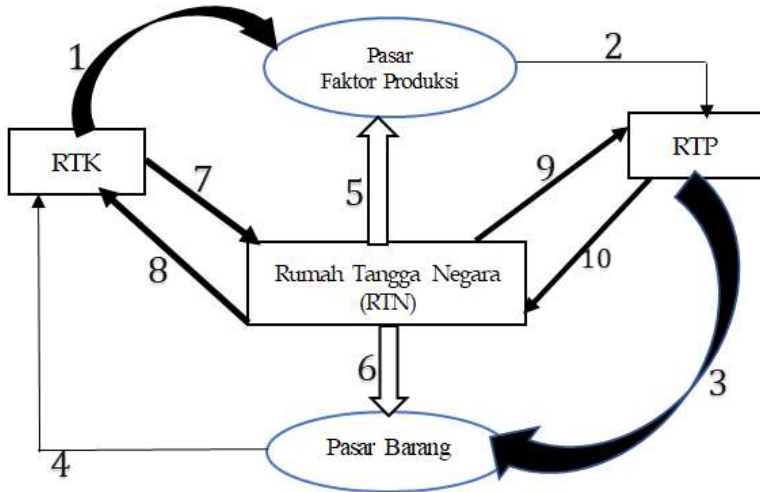
9.3.1 Peran Rumah Tangga Negara

Peran sebagai produsen. Rumah tangga negara memproduksi barang-barang yang dibutuhkan konsumen tetapi tidak disediakan oleh RTP. Memproduksi melalui BUMN dengan menguasai faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti PT pertamina untuk menghasilkan bahan bakar minyak yang dibutuhkan masyarakat.

Peran sebagai konsumen. Rumah tangga negara memerlukan faktor produksi untuk menghasilkan barang/ jasa. Rumah tangga negara dapat membeli faktor produksi dari RTP untuk menghasilkan barang/ jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran sebagai pengendali perekonomian. Jalannya perekonomian supaya sesuai dengan tujuan dan harapan bersama perlu adanya campur tangan pemerintah dalam pengendalian kondisi. Negara dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang membantu tertatanya kondisi perekonomian yang stabil. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan terkait pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya menetapkan harga tertinggi dan harga terendah barang/ jasa. Kebijakan moneter yaitu pengaturan terkait jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank indonesia, untuk meminimalkan terjadinya inflasi, sehingga harga

barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Rumah tangga negara juga dapat menetapkan kebijakan dalam perdagangan internasional, serta mengawasi jalannya perekonomian.



Gambar 9.2 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 3 Sektor
(sumber: Gilarso; 2004)

Nomor 1. Arus faktor produksi ke RTP.

Nomor 2. Arus penggunaan faktor produksi oleh RTP (pembelanjaan RTP).

Nomor 3. Hasil produksi berupa barang/ jasa.

Nomor 4. Pembelanjaan RTK berupa barang/ jasa.

Nomor 5. RTN (pemerintah) belanja pegawai

Nomor 6. RTN belanja barang/ jasa

Nomor 7. Pembayaran pajak dari RTK ke RTN

Nomor 8. Pemberian Subsidi/ pensiun kepada RTK

Nomor 9. Pemberian subsidi

Nomor 10. Pembayaran pajak dari RTP ke RTN

Ada dua pengeluaran yang dilakukan rumah tangga negara (pemerintah) yaitu; pengeluaran rutin (membayar gaji tenaga kerja, belanja barang, dan pembayaran utang), pengeluaran proyek-proyek pembangunan. Sedangkan penerimaan berasal dari pajak yang dipungut dari RTK dan RTP.

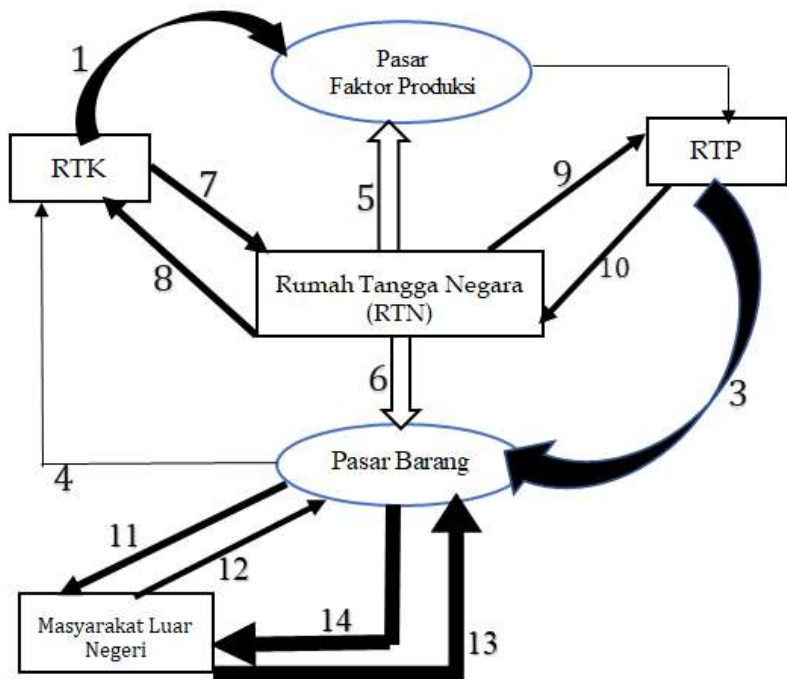
9.4 Masyarakat Luar Negeri

Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, sehingga antarnegara saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat negaranya. Hal ini menjadikan antarnegara melakukan hubungan perdagangan untuk saling melengkapi. Semua negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, dikarenakan keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki.

Era globalisasi menjadikan negara satu dan yang lain untuk saling menjalin komunikasi supaya dapat mengikuti perkembangan global. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri seperti; menyediakan barang/ jasa yang dapat diekspor ke negara lain, mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, menyalurkan pinjaman melalui investasi produktif, perantara uang antarnegara dari kegiatan perdagangan.

9.4.1 Peran Masyarakat Luar Negeri

Masyarakat luar negeri memiliki beberapa peran dalam kegiatan ekonomi yaitu menyediakan barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan antarnegara, melakukan ekspor akan membantu pemasukan pemerintah karena mendapatkan devisa, aliran arus uang untuk menambah modal atau kegiatan yang lain.



Gambar 9.3 : Lingkaran Kegiatan Ekonomi 4 Sektor
(sumber: Gilarso; 2004)

Nomor 11. Arus kegiatan ekspor barang/ jasa dari dalam negeri ke masyarakat luar negeri.

Nomor 12. Penerimaan uang berupa devisa hasil kegiatan ekspor.

Nomor 13. Arus impor (masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri).

Nomor 14. Arus uang pembayaran dari kegiatan impor.

Para konsumen membeli barang-barang kebutuhan/ barang konsumsi bisa dari produk dalam negeri atau produk luar negeri, sedangkan para produsen dapat membeli faktor-faktor produksi dari negara sendiri atau dari masyarakat luar negeri untuk kegiatan produksinya. RTP juga dapat menjual hasil produksinya di dalam negeri atau ke luar negeri. Untuk RTN (pemerintah) dapat menjalin hubungan dengan masyarakat luar negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakatnya dan untuk kegiatan yang lain. Masyarakat luar negeri memiliki peran sebagai sasaran pasar untuk

menjual barang-barang dalam negeri, sehingga pemerintah mendapat penghasilan.

9.5 Pelaku Ekonomi Sektor Formal

9.5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (UUD No.19 tahun 2003) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN menjadi pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh BUMN adalah menghasilkan barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Kegiatan konsumsi yang dilakukan BUMN adalah membeli barang/ jasa yang disediakan oleh RTK berupa faktor-faktor produksi untuk menjalankan tugas atau kegiatannya. Kegiatan distribusi dalam BUMN yaitu, menyalurkan hasil-hasil produksi ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Beberapa contoh barang/ jasa yang dihasilkan oleh BUMN yaitu, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Pos Indonesia. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah (UUD No.19 tahun 2003),

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

9.5.2 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjalankan usaha sesuai aturan pemerintah. BUMS selain menghasilkan barang/ jasa juga berorientasi mencari laba

dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya BUMS mengandalkan modal dan pengelolaan usaha.

Keberadaan BUMS ini membantu pemerintah dalam penyediaan barang/ jasa bagi masyarakat. Perkembangan BUMS didukung oleh pemerintah didasari oleh (Agung: 2019);

- a. BUMS meningkatkan daya kreasi, inovasi serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
- b. BUMS mengembangkan berbagai macam barang/ jasa yang tidak disediakan oleh pemerintah karna keterbatasan pengelolaan sumber daya.
- c. BUMS membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan adanya kesempatan kerja yang lebih luas.

BUMS sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Berbagai sektor ekonomi BUMS seperti; perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, otomotif, dan jasa. Beberapa peran BUMS yaitu;

- a. Meningkatkan kapasitas produksi nasional
- b. Memperluas kesempatan kerja
- c. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional
- d. Meningkatkan pendapatan nasional

9.5.3 Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian, menjadi semboyan untuk membangun perekonomian menjadi kokoh dengan adanya koperasi yang memiliki asas kekeluargaan. Koperasi dalam UU Nomor 25 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1). Koperasi sebagai unit usaha bersama untuk mengelola kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan anggota khususnya serta mensejahterakan masyarakat.

Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai pelaku ekonomi (Undang-Undang Nomor 25 1992) yaitu;

- a. Membangun serta mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi untuk para anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kegiatan ekonomi disuatu negara harus dijalankan bersama-sama oleh para pelaku ekonomi supaya tujuan perekonomian negara dapat berjalan maksimal. Setiap pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya, menyalur hasil produk serta sebagai konsumen. Sinergi antar pelaku ekonomi akan memperkuat perekonomian dalam memenuhi kebutuhan dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Feryanto. 2019. *Pelaku Ekonomi*. Klaten: Cempaka Putih,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian,
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>, diakses
8 september 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara [https://www.dpr.go.id/jdih/index/
id/202](https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/202) diakses 8 september 2022.
- T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- T. Puji Rahayu. 2021. *Memahami Pelaku Kegiatan Ekonomi*. Semarang:
Muatiara Aksara.

BAB 10

UTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Oleh Nugroho SBM

10.1 Pendahuluan

Utang atau pinjaman luar negeri memegang peran penting di perekonomian beberapa negara, baik negara sedang berkembang maupun negara-negara maju. Di samping perannya yang penting, utang luar negeri juga mempunyai dampak positif maupun negatif bagi perekonomian suatu negara. Seringkali dampak negatifnya yang lebih ditonjolkan oleh para pengkritik sehingga sering menimbulkan kontroversi. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Utang luar negeri juga memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Bab ini akan mengupas tentang utang luar negeri. Khususnya di Indonesia. Hal yang akan dibahas antara lain: pengertian dan jenis-jenis utang luar negeri, fungsi atau peran utang luar negeri dalam perekonomian, dampak positif dan negatif utang luar negeri, indikator batas aman utang luar negeri, kebijakan untuk pengelolaan atau manajemen utang luar negeri yang baik, dan masalah-masalah utang luar negeri Indonesia serta kebijakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

10.2 Jenis Utang Luar Negeri

Utang luar negeri bisa digolongkan berdasarkan beberapa kriteria :

1. Berdasar bunga, Cicilan dan Lamanya Jatuh Tempo, utang luar negeri bisa digolongkan menjadi:
 - a. Utang Lunak, yaitu utang luar negeri yang bunga dan cicilannya ringan serta jatuh tempo pengembaliannya relatif lama atau panjang
 - b. Utang komersial, yaitu utang luar negeri yang bunga dan cicilannya tinggi dan jangka waktu jatuh temponya singkat.
2. Berdasarkan syarat-syaratnya, utang luar negeri bisa digolongkan menjadi:

- a. Utang tak bersyarat (*untied Loans*), yaitu utang luar negeri yang diberikan tanpa syarat apapun dari negara atau lembaga yang memberikan utang
 - b. Utang bersyarat (*tied loans*), yaitu utang luar negeri yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu dari negara atau lembaga pemberi utang. Syarat-syarat tersebut misalnya keharusan menggunakan tenaga ahli dan bahan baku dari negara pemberi utang pada proyek-proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri tersebut.
3. Berdasarkan pemberinya, utang luar negeri bisa digolongkan menjadi:
- a. Utang luar negeri dari konsorsium yaitu utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga atau negara di dalamnya. Contoh: utang luar negeri yang diberikan oleh IMF, Bank Dunia, dan lain-lain
 - b. Utang luar negeri yang diberikan oleh satu negara atau satu lembaga tunggal saja. Contohnya utang luar negeri dari AS, Jepang, dan lain-lain.
4. Berdasarkan penerimanya, utang luar negeri bisa digolongkan menjadi:
- a. Utang luar negeri pemerintah, yaitu utang luar negeri yang diterima oleh pemerintah
 - b. Utang luar negeri swasta yaitu utang luar negeri yang diterima oleh perusahaan swasta atau perorangan

10.3 Fungsi atau Peran Utang Luar Negeri

Ada beberapa fungsi atau peran utang luar negeri dalam perekonomian suatu negara. Beberapa fungsi atau peran tersebut antara lain adalah:

1. Sebagai Penutup Defisit Anggaran Pemerintah (APBN): utang luar negeri digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah (APBN) yaitu menutup lebih besarnya pengeluaran pemerintah (*government expenditure* atau biasa disingkat G) dibanding penerimaan utama dari dalam negeri yaitu dari pajak atau Taxes yang biasa disingkat Tx. Jadi fungsi utang luar negeri sebagai penutup G-Tx Gap.

2. Sebagai Penutup Kesenjangan Antara Tabungan (Saving atau S) dengan Investasi (Investment atau I), atau biasa disebut sebagai penutup S-I Gap. Dalam hal ini utang luar negeri digunakan untuk menutup gap atau kesenjangan antara tabungan dalam negeri dengan kebutuhan untuk investasi.
3. Sebagai Penutup Defisit Neraca Pembayaran Internasional atau International Balance of Payment. Utang luar negeri digunakan untuk menutup defisit neraca pembayaran internasional akibat ldefisit dalam neraca perdagangan (Impor lebih besar dari ekspor), neraca jasa (Impor jasa lebih besar dari ekspor jasa), nerca modal (arus modal ke luar lebih besar dari arus modal masuk)

10.4 Dampak Positif dan Negatif Utang Luar Negeri

Pembahasan dan analisis tentang utang luar negeri biasanya hanya menyoroti tentang dampak negatif dari utang luar negeri. Tetapi sebenarnya utang luar negeri mempunyai dampak positif dan negatif. Berikut akan dikemukakan tentang dampak positif dan negatif dari utang luar negeri.

10.4.1 Dampak Positif Utang Luar Negeri

Utang luar negeri mempunyai dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Beberapa dampak positif utang luar negeri tersebut antara lain:

1. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lebih baik dari pajaka dan pencetakan uang. Pajak dalam teori ekonomi sering disebut sebagai kebocoran (leakages) dalam sirkulasi kegiatan ekonomi karena pajak mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan oleh konsumen. Konsekuensinya jika tidak dikembalikan dalam sirkulasi kegiatan ekonomi lewat pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang sama maka hal tersebut akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sumber pembiayaan lain yaitu dengan pencetakan uang akan menyebabkan inflasi. Inflasi mempunyai dampak negatif anantara lain menurunkan daya beli masyarakat, membuat maraknya spekulasi, dan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan (karena dengan inflasi masyarakat berpendaoatan tinggi punya asset yang nilainya naik seperti

bangunan dan tanah sementara masyarakat miskin yang hanya punya uang tunai akan menurun nilainya).

2. Sebagai bentuk pengakuan negara lain atas kemampuan negara debitur (pengutang) dalam membayar hutang dan juga kinerja perekonomian negara debitur (pengutang). Utang luar negeri yang diberikan oleh pihak kreditur bisa dipandang sebagai pengakuan atau pandangan positif negara atau pihak kreditur atas kemampuan negara debitur untuk membayar kembali utang luar negeri yang diberikan. Di sisi lain pengakuan tersebut juga menunjukkan pengakuan bahwa kinerja perekonomian negara debitur adalah baik sehingga sanggup membayar kembali utang luar negeri yang telah dibayarkan.
3. Sebagai perekat hubungan antar negara. Dengan utang luar negeri maka hubungan ekonomi dan politik antar dua negara menjadi semakin erat. Sebagaimana diketahui dalam era globalisasi maka tidaklah mungkin negara-negara di dunia menutup diri. Berdasarkan teori perdagangan internasional maka setiap negara tidak perlu memproduksi sendiri semua barang dan jasa kebutuhannya sendiri. Negara disarankan hanya memproduksi barang dan jasa yang dia mempunyai keunggulan komparatif atau dengan kata lain yang dia bisa menghasilkan dengan biaya yang lebih murah dibanding negara-negara lain. Barang dan jasa yang lain akan lebih murah diimpor dari negara lain. Maka negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan menikmati keuntungan dari perdagangan internasional daripada menutup diri atau melakukan proteksi. Hutang luar negeri antar negara-negara di dunia akan lebih mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan internasional antar negara tersebut.
4. Sebagai penekan bagi kebijakan domestik yang kurang baik. Seringkali tekanan dari negara-negara dan lembaga pemberi utang luar negeri diperlukan untuk mengurangi kebijakan-kebijakan di dalam negeri yang kurang baik. Contoh kebijakan yang kurang baik tersebut misalnya kebijakan untuk meredam kebebasan berpendapat, praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

10.4.2 Dampak Negatif Utang Luar Negeri

Di samping mempunyai dampak yang positif maka utang luar negeri juga mempunyai dampak yang negatif. Beberapa dampak negatif utang luar negeri tersebut antara lain ialah:

1. Membebani APBN. Ketika menerima utang luar negeri, suatu negara memang akan mendapatkan dana dan mendapatkan beberapa manfaat seperti telah diuraikan di depan. Namun pada giliran berikutnya yaitu ketika harus membayar bunga dan cicilan maka hal tersebut akan membebani Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN). Seringkali utang luar negeri yang semula diharapkan sebagai pelengkap dari pembiayaan dari dalam negeri justru akhirnya menjadi sumber yang utama daari pembiayaan pembangunan suatu negara.
2. Pengeluaran untuk hal-hal lain yang lebih strategis dan penting menjadi berkurang. Pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri – bagaimanapun- akan mengurangi alokasi untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya lebih strategis dan penting, antara lain: pengeluaran untuk subsidi berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lain-lain), pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
3. Dapat dipengaruhi oleh negara pemberi utang luar negeri dalam pengambilan kebijakan. Seperti telah disebut di depan maka negara atau lembaga pemberi utang luar negeri dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara pengutang. Di satu sisi ini bisa membawa dampak positif bila kebijakan yang dikritisi oleh kreditur adalah kebijakan yang tidak baik. Namun jika kebijakan yang dikritisi itu merupakan kebijakan yang sudah baik maka hal tersebut tentu akan berdampak negatif bagi negara-negara pengutang (debitur).
4. Negara debitur (pengutang) dapat dicap atau diasosiasikan sebagai negara gagal. Negara gagal yang tidak dapat membangun negaranya atas dasar kekuatan sendiri karena selalu tergantung kepada utang luar negeri. Di samping itu negara yang selalu tergantung pada utang luar negeri bisa dicap atau diasosiasikan sebagai negara miskin yang tidak bisa maju.

10.5 Indikator Batas Aman Utang Luar Negeri

Utang luar negeri jika tidak dibatasi bisa membawa dampak negatif baik bagi negara pemberi utang luar negeri maupun bagi negara penerima utang luar negeri.. Batasan jumlah utang luar negeri yang aman lebih ditujukan bagi negara penerima utang luar negeri. Jika jumlah utang luar negeri yang diterima oleh negara debitur (pengutang) aman dan utang tersebut bisa dikembalikan dengan lancar maka negara dan lembaga pemberi utang luar negeripun juga akan ada di posisi aman.

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan sebagai acuan jumlah utang luar negeri yang dikategorikan aman bagi negara penerima utang luar negeri. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. *Debt Service Ratio* (DSR)

Debt Service Ratio atau disingkat DSR adalah rasio antara bunga dan cicilan utang terhadap nilai ekspor suatu negara. Batas aman DSR ini menurut Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF adalah 30 persen. Artinya bunga dan cicilan utang luar negeri suatu negara tidak boleh melebihi 30 persen dari hasil ekspornya. DSR ini mengandung arti bahwa pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri adalah dari hasil ekspor karena baik bunga dan cicilan utang luar negeri maupun hasil ekspor dalam bentuk valuta asing.

2. *Debt to GDP Ratio*

Debt to GDP Ratio merupakan rasio antara bunga dan cicilan utang luar negeri terhadap pendapatan nasional atau Gross Domestic Product. Konsensus internasional batas aman Debt to GDP ratio ini adalah 60 persen. Artinya bunga dan cicilan utang luar negeri suatu negara tidak boleh melebihi 60 persen dari pendapatan nasionalnya.

10.6 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Utang Luar Negeri

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya utang luar negeri. Faktor tersebut bisa berasal dari negara pemberi utang luar negeri atau kreditur dan bisa berasal dari negara penerima utang luar negeri. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Ketersediaan Dana Dari Negara Kreditur

Negara-negara kreditur biasanya adalah negara-negara maju. Negara maju biasanya mempunyai banyak dana yang bisa dipinjamkan pada negara-negara sedang berkembang. Baik secara bilateral, multilateral, maupun secara sindikasi. Motivasi pemberian utang luar negeri ada banyak: karena motivasi sosial-kemanusiaan, motivasi ekonomi, maupun motivasi politik.

2. Besarnya Pengeluaran Pemerintah Negara Debitur

Besar kecilnya pengeluaran pemerintah dari negara penerima utang luar negeri atau debitur berdasar beberapa penelitian makin besar pengeluaran pemerintah dari negara debitur maka makin besar pula utang luar negeri yang dibutuhkan dan diterima negara debitur. Ada 2 (dua) penjelasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, seperti telah dijelaskan di depan maka pengeluaran pemerintah pertama-tama akan ditutup dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak. Jika penerimaan dalam negeri kurang maka kekeurangan tersebut akan ditutup dengan salah satunya dari utang luar negeri. Jika pengeluaran pemerintah semakin besar, sedangkan penerimaan dalam negeri relatif tetap maka makin besar kebutuhan dan pembiayaan dari utang luar negeri. Kedua, fenomena tersebut disebabkan oleh yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai efek pendekan ke luar (*crowding out*). Penjelasan apa yang disebut pendesakan ke luar atau *crowding out* adalah sebagai berikut: pengeluaran pemerintah karena kekurangan dana dari dalam negeri ditutup dengan antara lain penerbitan surat utang negara (SUN) atau obligasi negara. Supaya obligasi ini menarik untuk dibeli masyarakat maka suku bunganya harus menarik atau harus lebih tinggi dari suku bunga tabungan dan deposito. Hal ini akan membuat suku bunga domestik mengalami kenaikan. Naiknya suku bunga domestik akan membuat suku bunga luar negeri lebih rendah sehingga pengusaha akan lebih tertarik untuk meminjam atau berutang ke pihak luar negeri dibanding mengambil kredit dari dalam negeri.

3. Suku Bunga

Suku bunga juga mempengaruhi jumlah utang luar negeri khususnya utang komersial dari pihak swasta. Pengusaha swasta akan memutuskan apakah mengambil kredit atau utang dari di dalam negeri ataupun dari luar negeri akan tergantung suku bunga mana yang lebih murah antara suku bunga dalam negeri ataupun suku bunga luar negeri. Jika suku bunga luar negeri (biasanya yang digunakan London Inter Bank Of Rate Interest atau LIBOR atau Singapore Inter Bank Rate of Interest atau SIBOR) lebih murah atau lebih rendah maka pengusaha akan meminjam dari luar negeri sehingga utang luar negeri swasta akan meningkat.

4. Nilai Tukar atau Kurs Mata uang Domestik Terhadap mata Uang Asing

Nilai tukar atau kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing juga akan sangat mempengaruhi besarnya utang luar negeri suatu negara. Jika mata uang domestik mengalami penurunan atau depresiasi terhadap mata uang luar negeri maka beban cicilan dan bunga utang luar negeri yang tidak dilindungi dengan lindung nilai tukar (hedging) akan meningkat tanpa adanya utang luar negeri yang baru. Hal ini terjadi di Indonesia ketika awal krisis moneter 1997 dimana banyak pengusaha swasta yang tidak bisa membayar utang luar negeri karena utang luar negerinya tidak dilindungi dengan mekanisme lindung nilai tukar bertambah besar cicilan dan bunganya tanpa ada penambahan utang luar negeri baru.

5. Kemampuan Membayar Negara Debitur

Kemampuan membayar utang luar negeri dari negara yang menerima utang luar negeri atau negara debitur juga berpengaruh terhadap besarnya utang luar negeri negara debitur. Negara atau lembaga kreditur tentu akan mempertimbangkan kemampuan negara debitur untuk membayar kembali utang luar negeri dalam memberikan utang luar negerinya. Tentu makin besar kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utang luar negerinya maka akan makin besar utang luar negeri yang diterimanya. Ada 2 (dua) ukuran atau indikator yang menunjukkan kemampuan suatu negara untuk membayar utang luar negerinya. Pertama, *Debt Service Ratio* (DSR) atau disingkat DSR yaitu rasio antara bunga

dan cicilan utang terhadap nilai ekspor suatu negara. Batas aman DSR ini menurut Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF adalah 30 persen. Artinya bunga dan cicilan utang luar negeri suatu negara tidak boleh melebihi 30 persen dari hasil ekspornya. DSR ini mengandung arti bahwa pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri adalah dari hasil ekspor karena baik bunga dan cicilan utang luar negeri maupun hasil ekspor dalam bentuk valuta asing. Kedua, *Debt to GDP Ratio* yang merupakan rasio antara bunga dan cicilan utang luar negeri terhadap pendapatan nasional atau Gross Domestic Product. Konsensus internasional batas aman Debt to GDP ratio ini adalah 60 persen. Artinya bunga dan cicilan utang luar negeri suatu negara tidak boleh melebihi 60 persen dari pendapatan nasionalnya.

6. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Suatu Negara

PDB merupakan cerminan kondisi perekonomian suatu negara. Makin tinggi PDB suatu negara menunjukkan makin baik kondisi ekonomi suatu negara. Makin baik kondisi ekonomi suatu negara maka akan makin kecil kebutuhannya akan utang luar negeri. Maka pengaruh PDB terhadap utang luar negeri adalah negatif. Makin tinggi PDB suatu negara akan makin kecil jumlah utang luar negerinya.

7. Jumlah Utang Luar Negeri Sebelumnya dari Negara Debitur

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa besarnya utang luar negeri suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah utang luar negeri sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fenomena “gali lubang tutup lubang”, maksudnya banyak negara sedang berkembang menambah utang luar negerinya karena sebagian dari utang luar negeri baru digunakan untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri yang lama.

8. Daya Serap Utang Luar Negeri Debitur

Yang dimaksud daya serap adalah seberapa besar kemampuan negara debitur atau penerima utang luar negeri untuk memanfaatkan utang luar negeri yang diterimanya. Daya serap ini akan tercermin dari realisasi utang luar negeri dibanding komitmennya dan realisasi penggunaan utang luar negeri tersebut untuk berbagai hal misalnya untuk pembangunan

infrastruktur. Negara atau lembaga kreditur atau pemberi utang luar negeri biasanya akan melihat seberapa besar daya serap utang luar negeri yang diberikan untuk memberikan utang luar negeri berikutnya. Semakin kecil daya serap suatu negara terhadap utang luar negeri yang diberikan akan makin kecil utang luar negeri berikutnya yang diberikan karena negara kreditur akan menganaggap negara debitur tidak mampu memanfaatkan utang luar negeri yang diberikan dengan baik.

9. Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Negara Debitur

Mutu sumber daya manusia (SDM) negara penerima utang luar negeri atau debitur juga sering menjadi pertimbangan negara kreditur atau pemberi utang luar negeri untuk memberikan utang luar negeri. Mutu SDM yang dicerminkan biasanya dari jumlah penduduk yang berpendidikan menengah dan tinggi akan mencerminkan kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan utang luar negeri yang diberikan. Makin baik mutu SDM suatu negara akan makin besar jumlah utang luar negeri yang diterimanya.

10 Keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara Debitur

Keberadaan SDA negara-negara debitur juga menjadi daya tarik atau pertimbangan negara atau lembaga kreditur untuk memberikan utang luar negeri. Makin banyak SDA yang terdapat di negara-negara calon debitur akan makin besar peluang untuk mendapatkan utang luar negeri. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, karena keberadaan SDA dianggap cerminan kondisi ekonomi suatu negara yang pada akhirnya akan mencerminkan kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utang luar negeri yang diberikan. Kedua, negara kreditur akan memberikan utang luar negeri yang sifatnya mengikat dengan syarat negara yang memiliki SDA untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA kepada negara-negara atau lembaga kreditur.

10.7 Manajemen atau Pengelolaan Utang Luar Negeri yang Baik

Ada beberapa ciri pengelolaan atau utang luar negeri yang baik. Pengelolaan utang luar negeri yang baik akan menghindarkan negara-negara debitur (pengutang) dari jeratan utang (*Debt Trap*). Jeratan utang atau *Debt Trap* adalah isyilah yang digunakan dimana negara debitur (pengutang) tidak bisa melepaskan diri dari utang luar negeri. Biasanya ditandai dengan negara tersebut mengambil utang luar negeri baru tetapi sebagian dipotong untuk membayar utang luar negeri yang lama, atau dalam istilah populernya “Gali Lubang Tutup Lobang”.

Beberapa ciri pengelolaan utang luar negeri yang baik antara lain adalah:

1. Jumlah utang luar negeri harus sesuai dengan kemampuan suatu negara untuk membayarnya kembali. Untuk itu negara-negara yang berhutang hendaknya mentaati ukuran-ukuran agar utang luar negeri aman yaitu dari *Debt Service Ratio* (DSR) maksimal 40 persen dan *Debt to GDP ratio* maksimal 60 persen.
2. Penggunaan utang luar negeri hendaknya untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian pada umumnya. Pengeluaran yang produktif contohnya adalah untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong peningkatan investasi swasta yang akan mempunyai dampak pengganda (*multiplier*) yang besar dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan dengan demikian menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Ada beberapa negara yang mengambil kebijakan dalam penggunaan utang luar negeri ini untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar bunga dan cicilan atau istilahnya yang bisa *Cost Recovery*. Contohnya adalah untuk pembangunan jalan tol, pasar, dan lain-lain.
3. Pengawasan yang baik terhadap penggunaan utang luar negeri supaya tidak menjadi lahan untuk melakukan korupsi. Banyak kasus di beberapa negara utang luar negeri menjadi lahan

korupsi dengan melakukan mark up, kolusi dalam pengadaan atau tender pembangunan proyek.

4. Sebagian besar utang luar negeri merupakan utang luar negeri yang tak terikat (*untied loans*). Yang dimaksud utang luar negeri tak terikat adalah utang luar negeri yang tidak terikat syarat apapun dari negara atau lembaga kreditur (pemberi utang). Seperti telah dibahas di depan, banyak utang luar negeri yang sifatnya adalah utang luar negeri yang terikat (*tied loans*) dengan tujuan untuk mengutungkan negara atau lembaga kreditur atau pemberi utang luar negeri. Syarat-syarat yang dimaksud misalnya adalah harus menggunakan tenaga ahli dan bahan dari negara pemberi utang luar negeri. Banyak kasus tenaga ahli yang dikirim untuk pendamping utang luar negeri tersebut adalah tenaga ahli yang sudah pensiun atau yang di negara asalnya tidak dipakai. Demikian pula bahan baku atau mesin yang dikirim sebagai syarat penerima utang luar negeri sudah out of date atau ketinggalan jaman. Dengan demikian keuntungan negara atau lembaga kreditur akan berlipat ganda yaitu dari cicilan, bunga serta gaji dari tenaga ahli yang akan kembali ke negara pemberi utang serta dari penjualan mesin dan bahan baku yang juga hasilnya akan kembali kepada negara kreditur atau pemberi utang. Maka ada yang mengatakan bahwa memberikan utang luar negeri merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu penting bagi negara-negara debitur untuk menarik utang luar negeri yang tak terikat dalam proporsi yang besar dari total utang luar negerinya.

5. Utang Luar Negeri didiversifikasi dalam berbagai mata uang asing.

Tujuan dari diversifikasi mata uang asing dari utang luar negeri adalah untuk mencegah resiko fluktuasi nilai tukar atau kurs. Jika utang luar negeri hanya dalam satu saja mata uang asing maka ketika mata uang domestik mengalami penurunan (depresiasi) terhadap mata uang asing tersebut maka cicilan dan bunga utang luar negeri akan semakin besar tanpa adanya penambahan utang luar negeri baru. Hal ini tentu akan membebani negara-negara debitur (pengutang). Dengan diversifikasi mata uang asing maka resiko bertambahnya

cicilan dan bunga utang luar negeri karena fluktuasi kurs bisa diminimalkan.

6. **Utang Luar Negeri Didiversifikasi Dalam Jatuh Temponya**
Yang dimaksud diversifikasi jatuh temponya adalah komposisi utang luar negeri jatuh temponya merupakan utang luar negeri dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Maksudnya utang jangan- terutama- menumpuk di utang luar negeri jangka pendek saja maka akan kurang menguntungkan karena akan menyusahkan mendapatkan valuta asing untuk membayar dan waktu yang sangat pendek tidak menguntungkan dalam pemanfaatan utang luar negeri tersebut.
7. **Utang Luar Negeri Harus dilindungi Dengan Mekanisme Lindung Nilai Tukar (Hedging)**
Resiko fluktuasi nilai tukar disamping bisa diatasi dengan diversifikasi dalam mata uang asing juga dapat diatasi dengan mekanisme lindung nilai tukar atau hedging. Hanya saja memang hedging membutuhkan biaya yang agak besar. Namun dibanding dengan resiko yang akan dihadapi dengan adanya fluktuasi kurs di masa depan maka biaya tersebut sebenarnya relatif murah.

10.8 Masalah-Masalah Utang Luar Negeri Indonesia dan Kebijakan untuk Mengatasinya

10.8.1 Masalah-Masalah Utang Luar Negeri Indonesia

Ada beberapa masalah yang terkait dengan utang luar negeri baik di masa lalu maupun di masa kini. Beberapa masalah tersebut adalah:

1. **Banyak utang luar negeri yang merupakan utang luar negeri bersyarat (*tied loans*)**
Pengalaman di jaman Orde Baru banyak utang luar negeri yang bersyarat sesuai dengan kemauan lembaga dan negara yang memberikan utang luar negeri kepada Indonesia. Misalnya saja utang yang diberikan oleh lembaga IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) yang kemudian dibubarkan dan diganti dengan CGI. CGI pun melakukan hal yang sama sehingga juga bubar. Pada jaman Krisis Moneter 1998 yang membuat Presiden Soeharto lengser, lalu IMF membantu Indonesia dengan syarat-

syarat yang diajukan dalam nota kerjasama (Letter of Intent atau LOI). Jadi kembali Indonesia menerima utang luar negeri bersyarat. Ternyata syarat-syarat yang diajukan tersebut ketika diterapkan tidak cocok dengan kondisi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Indonesia tak bisa segera keluar dari krisis sehingga akhirnya pemerintah Indonesia Orde Reformasi membatalkan kerjasama atau LOI dengan IMF dan memutuskan melunasi seluruh utang luar negeri bersyarat dengan IMF.

2. Banyak Utang Luar Negeri yang Penggunaannya Tidak tepat sasaran atau tidak produktif

Hal ini terjadi khususnya di Jaman Orde Baru dimana utang luar negeri banyak dikorupsi dan tender yang dilakukan untuk proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri hanya untuk kalangan yang dekat dengan istana atau keluarga Presiden Soeharto saja. Proyek-proyek tersebut juga di naikkan biayanya (dimark up) untuk keuntungan pemborongnya. Akibatnya banyak proyek yang dibiayai dari utang luar negeri misal jembatan, jalan, ataupun gedung-gedung sekolah yang rusak sebelum waktunya. Utang luar negeri yang penggunaannya tidak produktif ini kemudian diwariskan ke Orde Reformasi sampai sekarang.

3. Banyak Utang Luar Negeri yang Tidak Dilindungi Dengan Lindung Nilai Tukar

Pada krisis ekonomi yang dimulai dari krisis moneter tahun 1998 banyak perusahaan mengalami kesulitan karena utang luar negerinya tidak dilindungi dengan lindung nilai tukar atau hedging. Akibatnya mereka harus menanggung bunga dan cicilan utang luar negeri yang meningkat tanpa adanya utang luar negeri baru.

4. Sebagian besar utang luar negeri Indonesia dalam denominasi Dolar AS

Akibatnya ketika rupiah mengalami devaluasi terhadap dolar AS maka bunga dan cicilan utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikan tanpa adanya utang luar negeri yang baru.

5. Utang Luar Negeri Banyak Menumpuk di Utang Luar Negeri Komersial dan Jangka Pendek

Akibatnya baik perusahaan maupun pemerintah kesulitan untuk menggunakannya secara optimal dan waktu jatuh tempo

yang bersamaan. Jatuh tempo yang bersamaan juga membuat kebutuhan valuta asing dalam jumlah besar dalam waktu yang sama. Krisis moneter 1997/1998 salah satunya disebabkan karena jatuh temponya utang luar negeri baik swasta maupun pemerintah secara bersamaan. Jatuh tempo utang luar negeri secara bersamaan menyebabkan kebutuhan dolar AS sangat besar di waktu yang bersamaan yaitu sekitar Juli 1997. Akibat berikutnya adalah nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami depresiasi .

10.8.2 Kebijakan Pengelolaan Utang Luar Negeri untuk Mengatasi masalah-Masalah dalam Utang Luar Negeri Indonesia

Ada beberapa kebijakan yang sudah dan seyogyanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi beberapa permasalahan utang luar negeri seperti telah disebutkan di depan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya utang luar negeri bersyarat maka pemerintah Indonesia lebih banyak melakukan utang-utang luar negeri tak bersyarat. Utang tak bersyarat tersebut bunga dan cicilannya lebih tinggi tetapi hal itu lebih baik dibanding Indonesia mengambil utang luar negeri bersyarat.
2. Untuk warisan utang luar negeri yang tidak produktif peninggalan jaman Orde Baru ada yang mengusulkan dikategorikan saja ke dalam utang haram (Odious Debt). Jenis hutang seperti itu bisa dinegisiasikan untuk dihapus supaya tidak membebani APBN
3. Untuk antisipasi penggunaan utang luar negeri yang sekarang ini sudah dibentuk lembaga-lembaga untuk mengawasinya termasuk adanya KOMITE Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk mencegah dan menindak KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam berbagai bidang termasuk program dan proyek yang dibiayai dari utang luar negeri bebas KKN.
4. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selalu menganjurkan bahwa utang luar negeri khususnya utang swasta harus dilindungi dengan lindung nilai tukar (hedging). Tujuan lindung nilai tukar ini agar pengalaman pada krisis moneter tahun 1997/1998 tidak

terulang. Pengalaman buruk tersebut adalah banyak utang luar negeri khususnya swasta yang tak dilindungi dengan mekanisme lindung nilai tukar. Akibatnya ketika terjadi krisis dan nilai tukar rupiah terdepresiasi secara tajam terhadap dolar AS maka banyak perusahaan mengalami kesulitan karena harus membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang lebih besar tanpa adanya utang luar negeri baru.

5. Kebijakan pengelolaan utang luar negeri Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomer 117/PMK.08/ tahun 2022 Tentang tata cara Pengadaan iPinjaman Luar Negeri Tunai telah mengatur bahwa pinjaman atau utang luar negeri Indonesia harus didiversifikasikan menurut denominasi mata uang asing maupun menurut jangka waktu jatuh tempo. Hal ini sudah benar dilakukan untuk mengantisipasi resiko fluktuasi nilai tukar atau kurs serta jatuh temponya utang luar negeri secara bersamaan yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terdepresiasi tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Keputusan Menteri Keuangan Nomer 117/PMK.08/ tahun 2022 Tentang tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai, tersedia di https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d43ce4d8-60e5-4ee3-aa75_0e13ffc2f197/117~PMK.08~2022Per.pdf
- Edy Suandi Hamid. 2004. Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia, UII Press, Edisi Khusus, Yogyakarta
- Supriyanto ; Sampurna, Agung F. 1999. Utang Luar Negeri Indonesia : Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Atmadja, Adwin. 2000. "Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya" Journal Pusat Penelitian Universitas Kristen Petra, Jakarta
- Jhingan, ML. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, diterjemahkan oleh Guritno, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Ekonomi Pembangunan, BPFE-UGM, Jogjakarta
- Nugroho SBM. 2012. Utang Luar Negeri, Bahan Kuliah, tersedia di <https://www.slideshare.net/nugrohosbm/utang-luar-negeri>
- Racbini, Didik J. 1995. Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang, Grasindo, Jakarta
- Radhi, Fahmi. 2009. "Beban Utang Luar Negeri Dalam Perekonomian Indonesia" Economic Review, Mubyarto Institut, Jogjakarta.
- Wahyudin Arfan. 2016. Analisis Determinan Utang Luar Negeri Indonesia, Skripsi pada Universitas Islam Muhamadiyah Makassar (Tidak diterbitkan), tersedia di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6036/1/Wahyudin%20Arfah.pdf>

BAB 11

DAYA SAING DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNATIONAL

Oleh Natalia Artha Malau

11.1 Pengertian Perdagangan International

Perdagangan dengan negara lain dapat terjadi karena adanya keuntungan yang diperoleh oleh kedua negara. Dalam melakukan perdagangan, ada pertimbangan dalam kegiatan pembelian barang/jasa antar negara antara lain yaitu dapat membeli barang ataupun jasa harga yang lebih murah daripada memproduksi sendiri, memperoleh barang dengan kualitas yang lebih baik, mampu memenuhi selera konsumen yang tinggi dengan biaya lebih murah, barang yang akan dibeli belum diproduksi di negara tersebut. Dan sebaliknya ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam menjual barang/jasa ke negara lain. Misalnya dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada ketika menjual di dalam negeri, menjual barang/jasa yang belum atau tidak diproduksi negara lain. Kegiatan pembelian dan penjualan antar negara akan mampu mendorong perluasan pasar dan produktifitas. Basri dan Munandar (2010) mengatakan bahwa perdagangan international dapat dilakukan ketika ada perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara, dan produksi yang dilakukan biasanya dalam jumlah yang besar.

Definisi perdagangan international adalah perdagangan dalam bidang ekonomi yang dilakukan antarnegara. Kegiatan ini yaitu kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan international merupakan kegiatan tukar menukar barang/jasa dimana masing-masing negara memiliki kebebasan dalam menentukan keuntungan ataupun masuk ke dalam perdagangan tersebut. Adanya biaya produksi yang berbeda antar negara menyebabkan harga komoditas yang diperdagangkan pun berbeda, sehingga ada negara yang mampu menjual dengan harga yang lebih murah karena negara tersebut mampu memproduksi komoditas secara efisien. Perbedaan biaya produksi antara lain karena factor perolehan biaya bahan baku dan factor jumlah kombinasi factor

produksi maupun kualitas dari komoditas akhir itu sendiri. Dengan melakukan perdagangan international berarti melakukan aktivitas penjualan dan pembelian yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian Kerjasama (Huala Adolf, 2011). Perdagangan internasional bisa terjadi karena negara sudah pasti tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi semua kebutuhan negara.

11.2 Teori perdagangan International

Perdagangan international memiliki beberapa teori yang menjadi dasar dalam melakukan perdagangan.

1. Teori merkantilisme,

Teori ini menyatakan bahwa negara itu untuk menjadi kuat harus melakukan ekspor sebanyak mungkin dan impor sesedikit mungkin, sehingga kekayaan suatu negara dapat bertahan. Dan kekayaan suatu negara itu dibandingkan dengan nilai emas atau nilai perak.

2. Teori keunggulan Mutlak,

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. Teori menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi ketika memberikan suatu keuntungan bagi negara, karena ada perbedaan efektivitas dan efisiensi yang terjadi dalam memproduksi suatu barang/jasa. Misal, dua negara sama-sama memproduksi kain, akan tetapi negara A mampu memproduksi 5 meteran roll kain dalam waktu 1 jam, sementara negara B hanya memproduksi Kain sebanyak 3 meteran roll dalam jangka waktu 1 jam. Akibatnya negara A akan melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah daripada negara B. Di sisi lain, ada kemungkinan negara B memiliki efektifitas efisien dalam produksi barang lain. Untuk itu, maka kedua negara bisa melakukan hubungan perdagangan international agar ketidakmampuan setiap negara dalam memproduksi barang yang lebih sedikit bisa terpenuhi ketika perdagangan terjadi.

3. Teori Keunggulan komparatif,

Teori keunggulan komparatif (Comparative advantage) adalah teori David Ricardo. Teori ini menyempurnakan teori Adam Smith. Dalam teori ini menyatakan bahwa ketika kedua negara

masih kurang efisien dalam memproduksi barang/jasa, negara-negara tersebut masih bisa melakukan hubungan perdagangan yang memberikan keuntungan. Misalnya negara A kurang efisien dalam memproduksi, maka negara A sebaiknya melakukan spesialisasi terhadap barang/jasa tersebut, mengimpor barang/jasa yang memiliki kerugian absolut yang besar. mengekspor barang/jasa yang memiliki kerugian absolut terkecil. Produksi yang memiliki Kerugian absolut terkecil inilah yang merupakan keunggulan komparatif suatu negara.

Keunggulan komparatif bisa dilihat dari perbandingan biaya dan juga bisa dilihat dari perbandingan produksi. Teori keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya didasarkan atas nilai suatu produk yang ditentukan oleh jumlah jam kerja dalam memproduksinya.

Dari tabel di bawah ini, menurut teori adam Smith yang memproduksi dengan efisien hanya Negara A. akan tetapi menurut keunggulan komparatif David Ricardo dapat dihitung besarnya efisiensi yang di dapat oleh negara A atau negara B, sehingga negara A dan B masih bisa melakukan perdagangan international yang sama-sama menguntungkan kedua negara. Dari perhitungan efisiensi di bawah ini, tenaga kerja negara A memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam memproduksi 1 kg tepung ($3/6$ jam kerja yaitu $\frac{1}{2}$ jam) daripada produksi 1 meter kain ($4/5$ jam kerja). Jadi dari perhitungan ini, maka Negara A akan melakukan spesialisasi dalam hal produksi gula dan mengekspor produk tepung ke negara B.

Tabel 11.1 : Lamanya Jam kerja dalam Memproduksi Barang/Jasa pada negara A dan Negara B

Negara	Produksi	Produksi
	1 kg tepung	1 meter kain
Nagara A	3 jam kerja	4 hari kerja
Negara B	6 jam kerja	5 hari kerja

Sebaliknya, tenaga kerja negara B memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam memproduksi 1 meter kain ($5/4$ jam

kerja) daripada produksi 1 kg tepung ($6/3$ jam kerja). Jika dilihat dari nilai perhitungannya, maka Negara B akan melakukan spesialisasi dalam hal produksi kain meteran dan akan mengekspor kain meteran ke negara A. demikian maka kedua negara bisa melakukan perdagangan internasional dengan fokus pada keuntungan absolutnya.

Tabel 11.2 : Perbandingan Efisiensi Tenaga Kerja Negara A dan Negara B

Negara	Produksi 1 kg tepung	Produksi 1 meter kain
Negara A : Negara B	$3/6$ jam kerja	$4/5$ hari kerja
Negara B : Negara A	$6/3$ jam kerja	$5/4$ hari kerja

Lalu yang kedua ada Keunggulan komparatif yang berdasarkan produksi kedua negara oleh setiap tenaga kerja, keunggulan komparatif ini bisa dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 11.3 : Produksi Tepung dan Kain per Tenaga Kerja pada negara A dan negara B

Negara	Banyaknya Produksi per Tenaga kerja	Banyaknya Produksi per Tenaga kerja
Negara A	$1/3$ kg tepung	$1/4$ meter kain
Negara B	$1/6$ kg tepung	$1/5$ meter kain

Dan untuk melihat perbandingan produktivitas tenaga kerja negara A dan negara B maka bisa dilihat pada tabel berikut. Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa dalam produksi gula, tenaga kerja Negara A memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja negara B, daripada negara A memproduksi kain, dan sebaliknya.

**Tabel 11.4 : Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja
Negara A dan Negara B**

Tepung	Produksi Tepung	Produksi Kain
Nagara A : Negara B	$1/3 : 1/6 = 6:3 = 2$	$1/4 ; 1/5 = 5/4$
Negara B : Negara A	$1/6 : 1/3 = 3/6 = 1/2$	$1/5 : 1/4 = 4/5$

4. Teori Heckscher Olin (H-O),
Teori ini dibuat oleh ekonom Swedia Eli Heckscher dan Bertin Olin. Teori ini mengemukakan bahwa ketika negara memiliki faktor produksi yang banyak dan berkualitas sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah maka Negara tersebut harus melakukan ekspor, sebaliknya ketika biaya produksi cukup tinggi dan faktor produksinya tidak mudah didapatkan maka negara harus memutuskan melakukan impor.
5. Teori Permintaan timbal balik
Teori ini dikenal sebagai lanjutan teori David Ricardo, dan yang memaparkannya adalah John Stuart Mill. Teori ini melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat diputuskan seberapa banyak barang yang akan diekspor ataupun diimpor.
6. Teori Mazhab Neo Klasik,
Teori ini memiliki pendapat bahwa keuntungan perdagangan tidak didasarkan pada tenaga kerja maupun biaya, akan tetapi dilihat dari marginal utilitynya.

11.3 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Persaingan di pasar internasional, perkembangannya semakin ketat dikarenakan tantangan dan sistem perdagangan yang multilateral. Sistem produksi global semakin mengalami peningkatan dimana semakin rumit sistem produksi yang dilakukan. Asal dari faktor-faktor produksi barang jadi bersumber dari beberapa negara.

Daya saing produk suatu negara harus memiliki faktor pendukung yang kuat sehingga terjadi transformasi keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Penciptaan keunggulan produk melalui penciptaan produk-produk yang memiliki differensiasi yang berkualitas merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan keunggulan kompetitif.

Faktor pendukung yang penting dalam mendorong perdagangan internasional adalah ketersediaan Sumber daya, perbedaan factor produksi, kebutuhan untuk kerjasama antar negara, dan tujuan menaikkan siklus ekonomi.

Sementara menurut Michal Porter (2006), ada empat factor yang mempengaruhi peningkatan keunggulan kompetitif yaitu factor produksi, factor permintaan dalam negeri, keterkaitan industri dalam mendukung ketersediaan brg/jasa serta kebijakan pemerintah terkait dalam strategi dan upaya pengembangan struktur industry.

11.4 Liberalisasi perdagangan International

Kebijakan pemerintah di banyak negara pada masa ini mendorong perdagangan secara bebas antar negara, melalui pengurangan pembatasan atau pengurangan hambatan bahkan penghapusan batasan/hambatan dalam perdagangan barang dan jasa. Adapun berbagai hambatan perdagangan itu antara lain adalah tarif yang mencakup biaya masuk dan lainnya dan non tarif, hambatan ini berupa perizinan dan kuota barang/jasa yang masuk ke suatu negara.

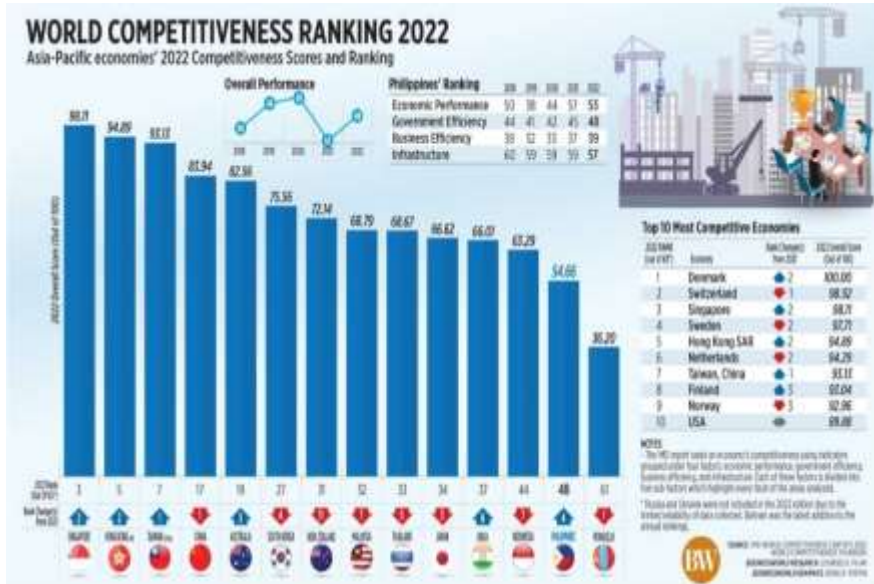
Trade liberalization merupakan kebalikan dari proteksionisme, dimana sistem ini penuh dengan regulasi dan hambatan yang sangat ketat dari suatu negara dalam melakukan perdagangan antar negara. Sistem liberalisasi perdagangan ini akan mendorong perdagangan barang/jasa antar negara secara bebas. Ada beberapa pro dan kontra dalam penerapan sistem perdagangan bebas ini. Di satu sisi, liberalisasi dapat mengurangi kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan di suatu negara. Pasar domestic dipenuhi oleh barang impor yang lebih murah, sehingga banyak perusahaan dalam negeri tidak mampu untuk berkompetensi, beberapa industry dalam negeri tidak dapat bertumbuh akibatnya penciptaan lapangan pekerjaan akan rendah, sehingga terjadilah pengangguran structural. Sisi yang lainnya menyatakan bahwa ketika terjadi perdagangan bebas akan terjadi efisiensi dan biaya konsumen akan turun. Penerapan perdagangan tanpa biaya akan mengurangi biaya yang dimasukkan pada harga akhir

produk. Liberalisasi juga mendorong negara-negara untuk memiliki spesialisasi dalam keunggulan komparatifnya, keuntungannya adalah hasil yang didapat lebih besar dan mampu meningkatkan skala ekonomi. Hal ini akan menarik minat investor luar negeri, sehingga terjadi tranfer aliran modal, teknologi, dan knowledge.

11.5 Daya saing Indonesia

Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II 2022 mencapai 5,44 % (yoy) dibandingkan pencapaian triwulan tahun sebelumnya sebesar 5,01% (yoy), pertumbuhan ini terjadi pasca pandemic Covid 19 yang melanda seluruh dunia selama hampir 2 tahun . Kinerja ekonomi berakselerasi didukung oleh permintaan domestic , dalam hal ini konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Serta pertumbuhan yang meningkat dari lapangan usaha di seluruh wilayah. Walaupun struktur perekonomian Indonesia masih didukung oleh kekuatan ekonomi Pulau Jawa yang kontribusinya sebesar 56,55 %. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan tertinggi ada di daerah Sulawesi-Maluku-Papua, yang diikuti oleh Provinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Balinusra. Perlambatan ekonomi global akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor. Pertumbuhan ekspor didukung oleh permintaan mitra dagang utama, meningkat sebesar 19,74 % (yoy). Sementara impor pertumbuhannya sebesar 12,34% (yoy). Pertumbuhan impor ini seiring dengan kinerja dari permintaan rumah tangga dan ekspor yang terus membaik di tengah pelonggaran atau membaiknya aktivitas dari masyarakat.

Indeks kompetensi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2018 untuk berbagai kategori karena ketahanan ekonomi Indonesia cukup tinggi yang terlihat dalam aktivitas masyarakat serta dunia usaha yang semakin meningkat tercermin dalam pertumbuhan ekonomi secara riil.c Akan tetapi sebelum pandemic Covid 19, peringkat Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa kategori. Penurunan daya saing Indonesia terjadi karena adanya ketidakpastian dalam kondisi global.



Gambar 11.1 : Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2022
Sumber : bworldonline.com

Berbagai krisis menyebabkan adanya kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara yang berdampak pada daya saing ekonomi. Selain krisis pangan, komoditas dan energi, daya saing negara juga ditentukan oleh perbedaan intensitas kasus Covid 19 dan kebijakan yang dilakukan untuk menanganinya, peristiwa politik negara lain seperti invasi Ukraina juga turut mempengaruhi.

Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada di posisi 44, merosot dari posisi 37 pada tahun sebelumnya (World Competitiveness Yearbook). Peringkat pertama di ditempati oleh negara Denmark dan peringkat terakhir posisi urutan 69 ditempati oleh negara Venezuela.

Dalam mendorong peningkatan daya saing, perlu prioritas dalam sector keuangan khususnya pertumbuhan kredit dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak akibat pandemic covid 19. Selain itu, perlu penguatan dalam sector sumber daya yaitu bidang Kesehatan dan pendidikan serta penetapan regulasi yang tepat dan efektif, contohnya di bidang energi dan telekomunikasi. Realisasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja perlu masif dilaksanakan di

seluruh wilayah untuk mendorong kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha.

11.6 Perkembangan Perdagangan International Indonesia

Perdagangan international Indonesia tahun 2016 cukup signifikan walau terjadi penurunan sedikit. Neraca Perdagangan surplus USD 50,6 juta, dengan ekspor non migas mencapai USD 10.500,2 juta, sementara nilai impor Indonesia tahun 2016 sebesar USD 10.449,6 juta. Sementara pada masa pandemic global Covid 19, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang juga secara global, dimana hal ini terjadi akibat penerapan pembatasan ekspor secara ketat.

Akhir 2019, terjadi deficit pada neraca perdagangan sebanyak US\$ 0,03 miliar, bahkan total keseluruhan deficit pada tahun 2019 sebesar US\$ 3,2 miliar. Sementara total deficit pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 8,7 miliar. Hal ini disebabkan nilai impor melebihi nilai ekspor sepanjang tahun 2018.

Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tren positif mulai bulan Mei 2020 sampai dengan tahun 2022, Surplus perdagangan sebesar US\$ 0,93 Milyar. Pertumbuhan ekspor Indonesia Januari 2022 sebesar 25,31% (yoy) dengan nilai US\$ 19,16 Miliar, sementara dari sisi impor terjadi pertumbuhan 36,77% (yoy) sebesar US\$ 18,23. Peningkatan impor ini berasal dari kegiatan produksi yang semakin tinggi pasca pandemik.



Grafik 11.1 : Perkembangan neraca Perdagangan
 Sumber : Katadata,2019

Perdagangan international memiliki kinerja yang baik ke arah positif didorong oleh berbagai kebijakan dan strategi pemerintah yang disesuaikan dengan kebijakan pengendalian Covid 19. Neraca Perdagangan Indonesia pada tahun 2022 bukan agustus tercatat US\$ 5,76 Miliar, dengan nilai ekspor meningkat dan mencapai US\$27,91 miliar dan impor juga meningkat bernilai US\$ 22,15 miliar. Surplus neraca perdagangan ini berasal dari komoditas non migas, yaitu bahan bakar mineral, besi dan baja. Sementara komoditas migas deficit, dengan komoditasnya yaitu hasil minyak, gas dan minyak mentah.

Tahun 2022, negara yang memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia dan memberikan sumbangan surplus terbesar adalah negara India, lalu diikuti oleh negara Serikat dan juga Negara Filipina di

urutan ketiga memberikan surplus terbesar. Komoditas utama hubungan perdagangan dengan India adalah lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral dan bahan kimia anorganik. Dengan nilai surplus sebesar 1,81 miliar di bulan agustus 2022. Hubungan perdagangan Indonesia dengan AS mencapai surplus di nilai US\$2,58 miliar, dengan komoditas perdagangan terbesar adalah mesin dan elektrik, lemak minyak hewan nabati pakaian dan aksesoris. Sementara surplus perdagangan dengan Filipina tercatat US\$ 1,09 miliar, dengan komoditas utama bahan bakar mineral kendaraan, besi dan baja.

Hubungan perdagangan international Indonesia juga ada yang mengalami defisi. Hubungan defisit terbesar ada dengan Australia, Tiongkok dan Thailand. Komoditasnya antara lain serelia, bahan bakar mineral, komoditas mesin da, elektrik dan perlengkapan, dan komoditas plastik



Grafik 11.2 : Neraca Perdagangan Indonesia Total Tahun 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Ediana RAE, D., & Joseph, C. P. R. 2007. "Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia", Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Basri, F dan Munandar, H. 2010. "Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif", Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Budiyanti, E. 2016. "Kebijakan Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Perspektifnya dalam Mendukung Perekonomian Nasional, dalam Alhusain dkk, Reformulasi Kebijakan Sektor Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi", Jakarta: Balai Pustaka
- Feridhanusetyawan, T. & Pangestu, M. 2003. "Indonesian Trade Liberalization: Estimating The Gains", Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Huala, Adolf. 2011. "Hukum perdagangan International", Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Kakar, Z. K. & Khilji, B. A. 2011. "Impact of FDI and Trade Openness on Economic Growth: A Comparative Study of Pakistan and Malaysia", Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII.
- Mohsen, A. S. & Chua, S. Y. 2015. " Effects of Trade Openness, Investment and Population on the Economic Growth: A Case Study of Syria", Hyperion Economic Journal,
- Porter, M.E. & Kramer, M.R. 2006. "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", Harvard Business Review, December 2006.
- Tambunan, T. 2004. "Globalisasi dan Perdagangan Internasional", Jakarta: Ghalia Indonesia.

BAB 12

PENGARUH KURS RUPIAH TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh Sri Nawatmi

12.1 Pendahuluan

Hampir semua negara di dunia menganut perekonomian terbuka, termasuk Indonesia. Keterbukaan ekonomi salah satunya bisa diukur dari perbandingan antara aktivitas ekspor impor dengan total pendapatan nasional. Semakin besar nilai rasionya maka semakin terbuka perekonomian negara tersebut. Konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian adalah semakin peka terhadap sektor luar negeri akibat adanya globalisasi.

Globalisasi menimbulkan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Apa yang terjadi di suatu negara bisa berdampak pada negara lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari krisis 1997. Krisis tersebut bermula dari melemahnya nilai tukar baht Thailand yang kemudian menjalar ke negara-negara lain termasuk Indonesia, dengan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian krisis tahun 2008 yang terjadi di Amerika yang kemudian menjalar ke berbagai negara termasuk negara-negara Eropa dengan efek yang luar biasa besar karena hampir seluruh negara Eropa menurun pertumbuhan ekonominya bahkan negatif. Negara yang mampu mempertahankan kondisi ekonominya hanya Inggris dan Jerman sedangkan negara-negara Eropa lainnya mengalami resesi yang cukup parah, apalagi Yunani. Belum selesai efek negatif dari krisis 2008, muncul pandemic Covid 19, yang penyebarannya sangat cepat ke berbagai negara di dunia. Dampaknya juga luar biasa, aktivitas ekonomi menurun drastis di berbagai negara. Dampak Covid 19 belum selesai muncul perang Rusia-Ukraina. Akibat campur tangan banyak negara (NATO), perang yang diharapkan

bisa segera selesai, ternyata sampai saat ini masih terus berlanjut. Hal tersebut berdampak pada perekonomian global.

Adanya globalisasi memang ada sisi positif dan negatifnya. Oleh karena itu, setiap negara harus mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi sehingga negara tetap mampu mempertahankan perekonomiannya agar tidak mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut menjadi masalah yang sulit untuk dihindari. Efek dari globalisasi menyebabkan kasus yang terjadi di suatu negara cepat sekali menjalar ke negara-negara lainnya, terutama jika negara tersebut adalah negara besar.

12.2 Kurs Rupiah

Kurs atau nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan satu sama lain (Mankiw, 2011). Kurs dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kondisi ekonomi yang stabil (Salvator, 2016).

Dari berbagai mata uang yang ada di dunia, terbagi antara mata uang kuat (*hard currency*) dengan mata uang lemah (*soft currency*). Mata uang kuat adalah mata uang yang tidak mudah berubah atau mata uang yang relatif stabil nilainya sehingga sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Mata uang kuat biasa dimiliki oleh negara-negara maju seperti poundsterling Inggris, yen Jepang, dolar Amerika dan seterusnya. Sedangkan mata uang lemah adalah mata uang yang mudah berubah nilainya sehingga jarang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, kecuali ada kesepakatan bersama penggunaan mata uang dalam perdagangan luar negerinya seperti di antara negara-negara ASEAN.

Kurs atau nilai tukar mata uang suatu negara bisa melemah atau terjadi depresiasi nilai tukar, bisa juga mengalami penguatan atau apresiasi nilai tukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya apresiasi ataupun depresiasi kurs di antaranya adalah inflasi, suku bunga, pendapatan, maupun jumlah uang beredar. Menguatnya mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain menjadikan harga barang dari Indonesia menjadi lebih mahal di mata orang asing sehingga ada kecenderungan impor negara lain ke Indonesia akan

berkurang sehingga ekspor Indonesia menjadi menurun dan sebaliknya jika mata uang rupiah melemah terhadap mata uang asing maka harga barang kita di mata asing menjadi lebih murah. Dampaknya permintaan asing atas barang Indonesia meningkat atau ekspor Indonesia akan meningkat. Hal itu berarti bahwa melemahnya nilai mata uang suatu negara tidak selalu berdampak negatif bagi negara tersebut jika negara tersebut mampu mengantisipasi sehingga memiliki kemampuan untuk menaikkan produksi. Artinya, pada saat mata uang rupiah melemah, permintaan dunia terhadap produk Indonesia akan mengalami kenaikan, dan jika kenaikan permintaan dunia tersebut tidak bisa diikuti dengan kenaikan produksi dalam negeri maka kesempatan untuk menaikkan ekspor hilang. Tetapi jika Indonesia mampu mengantisipasi dengan meningkatkan produksi maka, itu kesempatan bagi Indonesia untuk menambah pendapatan dengan meningkatnya ekspor Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian melemahnya rupiah berdampak positif bagi perekonomian karena meningkatnya penerimaan negara dari hasil ekspor. Sisi negatif dari melemahnya rupiah adalah hutang luar negeri menjadi semakin besar.

Kurs nominal merupakan harga relatif antara mata uang dua negara, sedangkan nilai tukar mata uang riil (Mankiw, 2011) dirumuskan:

$$\frac{\text{nilai tukar mata uang nominal} \times \text{harga barang domestik}}{\text{Harga barang luar negeri}}$$

Tabel 12. 1 : Perkembangan Kurs Di Indonesia (Agustus 2021 – September 2022)

Periode	Nilai Kurs
Agustus 2021	14.464
September 2021	14.251
Oktober 2021	14.080
November 2021	14.237
Desember 2021	14.384
Januari 2022	14.354
Februari 2022	14.329
Maret 2022	14.341
April 2022	14.351
Mei 2022	14.661

Periode	Nilai Kurs
Juni 2022	14.836
Juli 2022	14.984
Agustus 2022	14.858
September 2022	14.975

Sumber: Bank Indonesia

Berdasar tabel 12.1 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika semakin melemah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena hutang Indonesia sudah sangat tinggi, per juli 2022 sebesar US\$ 185,6 milyar atau Rp 2.765,44 trilyun dengan kurs Rp 14.900/US\$, jika ditambah dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika maka akan semakin membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia.

Ada 4 sistem nilai tukar (Madura, 2008):

1. *Fixed Exchange Rate*. Dengan system nilai tukar tetap, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu. Pemerintah bisa mempertahankan kebijakan nilai mata uangnya tetap pada tingkat yang stabil.
2. *Floating Exchange Rate*. Nilai mata uang ditentukan berdasar permintaan – penawaran mata uangnya dalam pertukaran mata uang internasional.
3. *Managed Floating Exchange Rate*. Nilai tukar ditentukan berdasar permintaan-penawaran, tetapi ada intervensi pemerintah untuk menstabilkan nilai mata uangnya.
4. *Pegged Exchange Rate*. Nilai mata uang domestik diikatkan dengan satu mata uang asing yang nilainya cenderung lebih stabil, misal dolar Amerika.

Perbedaan kurs mata uang suatu negara dengan negara lain pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. “Dalam era ekonomi terbuka seperti sekarang ini, sekuat apapun nilai mata uang suatu negara pasti akan terkena dampak guncangan baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal”. Faktor eksternal misalnya adanya krisis nilai tukar baht Thailand yang kemudian berdampak luas ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

12.3 Pertumbuhan Ekonomi

Membaiknya atau memburuknya perekonomian suatu negara ditentukan oleh produktivitas negara tersebut. Produktivitas diukur dari output (GDP/*Gross Domestic Product*) yang dihasilkan. Tingkat pertumbuhan produktivitas menentukan apakah standar hidup meningkat secara cepat atau secara lambat. Tidak ada yang lebih berkontribusi pada kesejahteraan materi, pengurangan kemiskinan, peningkatan waktu luang, dan kemampuan suatu negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan masyarakat, perbaikan lingkungan, dan seni daripada tingkat pertumbuhan produktivitasnya (Baumol dan Blinder, 2009). Para ekonom setuju, bahwa pertumbuhan yang lebih cepat lebih disukai dari pada pertumbuhan yang lebih lambat. Tetapi pertumbuhan menimbulkan biaya. Tidak selalu pertumbuhan yang lebih cepat itu lebih baik.

Seberapa cepat perekonomian bisa tumbuh, para ekonom sepakat menggunakan konsep pengukuran dari GDP potensial. GDP potensial adalah GDP riil yang perekonomian bisa hasilkan jika angkatan kerja (*labor force*) digunakan secara penuh (*full employment*). GDP menunjukkan nilai keseluruhan pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi dan keseluruhan pengeluaran dalam produksi ekonomi barang dan jasa. Tingkat GDP riil merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan GDP riil menunjukkan kemajuan perekonomian (Mankiw et al, 2011). Untuk memperkirakan potensi GDP secara konseptual menggunakan dua langkah. Langkah pertama, tersedianya tenaga kerja, kapital dan sumber daya lainnya. Kemudian di estimasi berapa output bisa dihasilkan jika input tersebut dimanfaatkan secara penuh. Langkah kedua, mengubah input menjadi output dengan memasukkan unsur teknologi. Semakin maju teknologi maka kemampuan produksi akan semakin besar. Lebih banyaknya kapital atau lebih baiknya teknologi akan meningkatkan GDP potensial. Tingkat pertumbuhan GDP potensial tergantung pada:

1. Tingkat pertumbuhan Angkatan kerja (*labor force*)
2. Tingkat pertumbuhan capital stock nasional
3. Tingkat kemajuan teknologi

Apakah tingkat pertumbuhan GDP potensial sama dengan tingkat pertumbuhan GDP aktual? Pada jangka Panjang, hampir tidak ada perbedaan antara GDP potensial dengan GDP aktual, akan tetapi pada jangka sangat pendek bisa terjadi perbedaan yang sangat tajam khususnya pada saat terjadi fluktuasi siklus. Ketika perekonomian tumbuh lebih lambat dibanding GDP potensialnya maka, akan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran dan sebaliknya ketika perekonomian melaju lebih cepat dari GDP potensialnya maka akan menurunkan pengangguran.

Tabel 12.2 menunjukkan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) riil Indonesia dan laju pertumbuhan PDB sejak tahun 2018 kuartal satu sampai dengan 2022 kuartal dua. Berdasar tabel tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia terpengaruh oleh pandemi Covid 19. Pada masa pandemi covid 19, aktivitas ekonomi sangat terganggu karena tidak boleh ada kerumunan, seandainya ada kerumunan orang, jumlahnya sangat di batasi dan masing-masing orang harus menjaga jarak sehingga banyak usaha yang gulung tikar di masa pandemi. Akibat pandemi, banyak orang yang menganggur dan lapangan kerja sulit di dapat.

Tabel 12.2 : Laju pertumbuhan PDB triwulanan Indonesia (2018Q1 – 2022Q)

Periode	PDB Riil (Milyar Rupiah)	Laju pertumbuhan PDB (%)
2018Q1	2.498.697,5	5,07
2018Q2	2.603.852,6	5,17
2018Q3	2.684.332,2	5,17
2018Q4	2.638.969,6	5,17
2019Q1	2.625.180,5	5,06
2019Q2	2.735.414,1	5,06
2019Q3	2.818.812,7	5,04
2019Q4	2.769.748,1	5,02
2020Q1	2.703.033,0	2,97
2020Q2	2.589.781,1	-1,26
2020Q3	2.720.491,9	-2,03
2020Q4	2.709.740,8	-2,07
2021Q1**	2.684.200,8	-0,70
2021Q2**	2.772.939,4	3,10

Periode	PDB Riil (Milyar Rupiah)	Laju pertumbuhan PDB (%)
2021Q3**	2.815.869,7	3,24
2021Q4**	2.845.858,6	3,69
2022Q1***	2.818.771,6	5,01
2022Q2***	2.923.675,3	5,23

Sumber: Badan Pusat Statistik

** *sangat sementara*

*** *sangat-sangat sementara*

Pertumbuhan PDB triwulanan pada tahun 2018 menunjukan laju yang positif, akan tetapi kemudian mengalami penurunan sejak 2018 kuartal 1, bahkan menjadi negatif sejak 2019 kuartal dua sampai dengan 2021 kuartal satu. Laju pertumbuhan mulai kembali positif sejak 2021 kuartal dua dan semakin meningkat nilainya seiring dengan semakin menurunnya kasus covid 19.

12.4 Pengaruh Kurs Rupiah Terhadap Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut perekonomian terbuka. Artinya Indonesia membuka diri terhadap perdagangan dunia yaitu dengan melakukan aktivitas ekspor impor. Semakin terbuka perekonomian suatu negara maka, negara tersebut akan semakin mudah terkena dampak eksternal akibat efek globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi harus segera diantisipasi agar meminimalkan risiko terhadap perekonomian termasuk kurs.

Kurs mempengaruhi perekonomian melalui harga barang ekspor maupun harga barang impor suatu negara. Jika nilai tukar rupiah melemah terhadap US\$ atau rupiah terdepresiasi maka harga barang kita di mata asing (Amerika) menjadi lebih murah. Akibatnya permintaan terhadap barang dari Indonesia akan meningkat sehingga ekspor Indonesia akan meningkat dan impor akan menurun karena harga barang asing menjadi mahal. Dengan catatan Indonesia mampu memenuhi permintaan pasar yang meningkat tersebut. Dengan demikian, perekonomian Indonesia akan mengalami surplus perdagangan (ekspor > impor). Sebaliknya jika kurs rupiah menguat terhadap US\$ atau terjadi apresiasi rupiah terhadap US\$ maka, harga barang kita akan menjadi lebih mahal di mata asing (Amerika)

sehingga permintaan atas barang kita menurun atau ekspor kita menjadi berkurang (impor meningkat karena harga barang asing menjadi lebih murah bagi kita). Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya defisit perdagangan (ekspor < impor). Akibatnya pendapatan nasional akan menurun, perekonomian bisa melemah.

Kurs merupakan salah satu indikator baik tidaknya perekonomian suatu negara. Kurs yang stabil diharapkan oleh semua negara karena stabilitas kurs akan berdampak stabilitas dalam perdagangan internasional. Bagi negara dengan sistem devisa bebas, stabilnya kurs akan menyebabkan *capital inflow* (arus modal masuk) karena perekonomian yang terbuka menyebabkan arus modal akan mengalir ke tempat yang menguntungkan. Masuknya arus modal ke suatu negara akan menguntungkan negara tersebut terutama jika arus modal yang masuk adalah FDI (*Foreign Direct Investment*). Arus modal yang meningkat akan meningkatkan investasi baik langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya investasi akan meningkatkan perekonomian negara tersebut karena meningkatnya investasi menyebabkan lapangan pekerjaan akan bertambah sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang ada, yang pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, stabilitas kurs harus dijaga agar perekonomian terus tumbuh dan berkembang. Sayangnya, kurs tidak bisa terus menerus stabil, karena nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal (goncangan yang terjadi dari luar negeri) maupun internal (goncangan yang berasal dari dalam negeri). Hal itu berarti nilai tukar bisa berfluktuasi. Fluktuasi nilai tukar terkadang kecil, bisa juga fluktuasinya tajam atau sangat tajam, dan ini yang berbahaya bagi perekonomian bila tidak segera diatasi. Terlalu melemah maupun terlalu menguatnya kurs, berdampak tidak baik bagi perekonomian.

Berdasar krisis tahun 1997 menunjukkan bahwa krisis nilai tukar (kurs) suatu negara bisa berdampak pada negara lainnya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian negara yang bersangkutan. Pada saat terjadi krisis kurs di Thailand, Indonesia tidak mengantisipasi dengan baik. Pada saat itu, pemerintahan Indonesia meyakini bahwa fundamental perekonomian kita bagus sehingga pemerintah merasa yakin tidak akan terkena imbas dari krisis Thailand. Tapi ternyata negara kita akhirnya juga terkena dampaknya. Bahkan Indonesia terdampak paling parah dibandingkan dengan

negara-negara-negara lainnya yang terdampak seperti Malaysia, Korea, Jepang dan negara lainnya. Di saat negara lain yang terdampak sudah pulih kembali perekonomiannya, di Indonesia krisis kurs tersebut justru berubah menjadi krisis multidimensi. Berbagai sektor terkena dampaknya baik di sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian berdampak ke sektor politik dan keamanan. Kerusakan banyak terjadi baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya dan menimbulkan korban nyawa yang kasusnya tidak terslesaikan sampai sekarang, disusul kemudian dengan jatuhnya presiden Suharto digantikan dengan B.J. Habibie.

Adanya globalisasi menimbulkan saling ketergantungan satu negara dengan negara lainnya. Apa yang terjadi pada suatu negara bisa berdampak pada negara lainnya. Berdasar hal tersebut, seharusnya kalau terjadi krisis di suatu negara, maka negara lainnya harus mengantisipasinya sehingga dampaknya bisa diminimalkan. Contohnya adalah krisis KPR di Amerika tahun 2008, yang mana Indonesia sudah mengantisipasi dan berdasar pengalaman pada krisis 1997 maka dampak dari krisis 2008 tidak terlalu berat bagi perekonomian Indonesia.

Krisis nilai tukar yang berkembang menjadi krisis ekonomi, pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi melemah, yang jika tidak segera diatasi bisa menyebabkan resesi ekonomi. Akibat dari resesi, laju inflasi meningkat pesat akibat gangguan produksi atau bisa juga karena inflasi yang diimpor (*imported inflation*), bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun, produksi berkurang, pengangguran semakin meningkat, kemiskinan akan semakin bertambah, keamanan menurun, yang akhirnya berdampak pada kondisi politik di negara tersebut.

Fluktuasi nilai tukar rupiah sebenarnya merupakan muara dari akumulasi permasalahan ekonomi yang dialami di sektor moneter, perbankan dan sektor riil. Usaha menstabilkan kurs rupiah tidak akan berhasil jika tidak dilakukan pembenahan terhadap seluruh kelemahan aspek perekonomian nasional baik sistem, perangkat maupun peraturan (Miranda dan Doddy, 1998). Untuk mempercepat stabilitas kurs maka manajemen kurs yang tepat perlu diterapkan. Hanya saja masih menjadi perdebatan manajemen kurs yang mana yang cocok bagi suatu negara. Apakah kurs yang flexibel cukup memadai bagi perekonomian Indonesia, apakah mengisolasi kurs suatu negara

dari perekonomian global misal dengan dengan kontrol devisa seperti Malaysia cocok diterapkan di Indonesia?

12.4.1 Sistem Nilai Tukar dan kaitannya dengan Sistem Devisa

Model yang menjelaskan transmisi kebijakan moneter pada perekonomian terbuka dengan menerapkan sistem *fixed exchange rate* atau *floating exchange rate* adalah model Mundell (1968) – Fleming (1962). Asumsi dari model tersebut adalah suatu negara menganut sistem devisa bebas dengan skala ekonomi relatif kecil. Implikasinya, pertama, di negara tersebut suku bunga internasional, tingkat harga internasional dan tingkat pendapatan internasional merupakan variabel eksogen. Kedua, suku bunga dalam negeri akan selalu bergerak searah dengan pergerakan suku bunga internasional.

Jika untuk menstabilkan kurs rupiah, dimana sistem kurs yang dipakai adalah *fixed*, maka implikasi kebijakannya adalah Bank Indonesia (BI) tidak dapat mengendalikan jumlah uang beredar (JUB), dan BI harus memelihara cadangan devisa yang memadai. Untuk mempertahankan kredibilitas dari sistem *fixed exchange rate* dan menghindari terkurasnya cadangan devisa, otoritas moneter (BI) dan fiskal (pemerintah) harus menghindarkan diri dari kebijakan yang inflasioner. Jika terjadi kondisi yang inflasioner maka, kebijakan mendevaluasi rupiah menjadi berat tetapi harus diambil sebagai kebijakan jika cadangan devisa memang tidak mencukupi untuk menjaga nilai kurs. Jika itu terjadi maka akan menghambat pelaku ekonomi domestik dan investor asing sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyuburkan perilaku spekulatif.

Jika sistem kurs yang dianut adalah *floating*, BI leluasa untuk mengendalikan JUB karena BI tidak memiliki kewajiban untuk menjaga kurs pada level tertentu. Jika tingkat harga domestik bersifat rigid maka, kebijakan moneter yang ekspansif akan mendorong depresiasi kurs dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga produk dalam negeri akan terdorong naik, perekonomian akan meningkat.

Dornbusch (1976) memperkenalkan pengembangan model Mundell-Fleming untuk sistem kurs mengambang dengan memasukkan konsep dinamik dan *rational expectations*. Model Dornbusch memungkinkan adanya penyesuaian harga, suku bunga dan ekspektasi bertahap di pasar aset sehingga kebijakan moneter hanya berdampak sementara (*transitory*) terhadap tingkat produksi. Pada

jangka panjang, ketika tingkat harga sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan nilai tukar, kebijakan moneter akan bersifat netral terhadap tingkat produksi. Implikasi kebijakan sistem kurs yang mengambang (*floating exchange rate*) adalah dalam jangka pendek, BI leluasa mengendalikan JUB, BI tidak perlu menyediakan cadangan devisa dalam jumlah besar, sekalipun kebijakan ekspansioner akan mampu meningkatkan tingkat produksi, tetap harus memperhatikan kapasitas produksi nasional, jika tidak, akan mendorong laju inflasi. Jika itu terjadi maka akan mengganggu perekonomian.

Di antara kedua sistem kurs (*fixed dan floating exchange rate*) terdapat banyak varian sistem kurs yang bisa digunakan. Perbedaan di antara varian-varian tersebut terletak pada intensitas intervensi BI di pasar valas. Salah satu sistem kurs yang banyak digunakan adalah *managed floating* atau mengambang terkendali. Pada sistem tersebut target nilai tukar sering tidak diumumkan ke publik dan bersifat fleksibel. Sasaran akhir biasanya mempertahankan kurs riil pada level yang mampu menjaga daya saing produk nasional. Sistem ini cukup kredibel jika laju inflasi bisa dipertahankan pada tingkat yang cukup rendah dan pemerintah hati-hati dalam menjalankan kebijakan moneternya. Pada sistem ini tetap membutuhkan cadangan devisa tapi tidak sebesar jika sistemnya *fixed exchange rate*.

12.4.2 Sistem Devisa

Ada dua jenis sistem devisa yaitu sistem devisa bebas dan sistem devisa kontrol. Pada sistem devisa bebas, kegiatan transaksi devisa baik oleh residen atau non residen tidak ada pembatasan dan sebaliknya pada sistem devisa kontrol terdapat pembatasan oleh pemerintah.

Kebijakan devisa suatu negara berhubungan dengan kebijakan kurs yang dianut. Kebijakan devisa bebas biasanya diikuti dengan kebijakan kurs yang lebih fleksibel. Untuk negara dengan sistem devisa terkontrol, sistem kursnya adalah *fixed* seperti China, Chili maupun Malaysia. Adanya kontrol devisa maka, permintaan devisa bisa dikendalikan sedangkan penawaran devisa dapat ditingkatkan khususnya dari aktivitas ekspor, dengan demikian kurs bisa dipertahankan. Manfaat dari sistem kontrol devisa adalah bisa mengisolasi mata uang suatu negara dari tindakan *speculative bubble*, sisi negatifnya, sistem ini bisa menimbulkan *black market*, nilai

tukar *overvalued* dan meningkatkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek dan jika birokrasi tidak bersih akan meningkatkan korupsi (Miranda dan Doddy, 1998).

12.4.3 Fungsi Kurs

Penentuan sistem kurs sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena sistem kurs merupakan alat yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian dari gejolak perekonomian dunia. Fungsi utama dari penentuan sistem kurs, pertama, untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran, dengan sasaran akhir memelihara kecukupan cadangan devisa. Oleh karena itu, kebijakan kurs dilakukan untuk mendorong dan menjaga daya saing ekspor untuk memperkecil *defisit current account*. Kedua, menjaga kestabilan pasar dalam negeri. Kurs dijaga dari tindakan spekulatif yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro. Ketiga, sebagai instrumen moneter, khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Kurs yang mengalami depresiasi atau apresiasi menjadi alat untuk sterilisasi dan ekspansi JUB. Fungsi keempat, kurs menjadi *anchor* nominal dalam mengendalikan inflasi. Banyak negara yang mengalami inflasi kronis menggunakan kurs sebagai *anchor* nominal baik melalui pengendalian depresiasi kurs maupun mematok (*pegged*) kurs suatu negara dengan satu mata uang asing, misalnya rupiah di kaitkan dengan US\$.

12.4.3 Dasar Penentuan Kurs

Yang menjadi dasar pertimbangan penentuan kurs adalah tingkat keterbukaan ekonomi, tingkat kemandirian negara dalam melakukan kebijakan ekonomi dan aktivitas perekonomian suatu negara. Jika suatu negara menerapkan perekonomian yang lebih tertutup maka, *fixed exchange rate* menjadi pilihan utama dan sebaliknya jika perekonomian lebih terbuka, pilihannya adalah kurs yang fleksibel karena dengan sistem kurs yang fleksibel, *capital inflow* bisa disterilisasi melalui sistem tersebut. Jika suatu negara memiliki kemandirian dalam melakukan kebijakan moneter maka, digunakan sistem kurs yang fleksibel. Dari aspek aktivitas ekonomi, semakin besar skala ekonomi suatu negara semakin besar volume transaksi ekonomi maka, permintaan uang akan semakin banyak. Sistem kurs yang tepat

adalah yang fleksibel karena jika sistem yang dipilih adalah *fixed* maka perekonomian negara tersebut akan membutuhkan cadangan devisa yang sangat besar guna menjaga kredibilitas sistem kurs tersebut.

Garber dan Svenson (1994) mengemukakan tentang dasar pertimbangan penentuan kurs dalam hal *underlying shock* pada pasar barang dan pasar uang (IS dan LM). Jika gejolak di pasar barang (IS) relatif lebih besar dari pada gejolak di pasar uang (LM) maka pilihan terbaik adalah sistem kurs tetap. Sebaliknya jika gejolak di pasar barang lebih kecil dibanding gejolak di pasar uang maka, pilihan yang tepat adalah kurs mengambang (*floating exchange rate*). Jika tidak ada yang mendominasi antara IS dan LM, maka pilihan terbaik adalah *managed floating* (mengambang terkendali).

Mana yang terbaik bagi perekonomian suatu negara antara memilih sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*) ataukah sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*) masih belum jelas dan tergantung banyak faktor. Akan tetapi secara umum, sistem kurs yang optimal adalah *managed floating exchange rate system* (sistem kurs mengambang terkendali). Hal ini terjadi karena pada sistem tersebut, *money supply* (penawaran uang) akan bereaksi terhadap kurs, suku bunga dan indikator ekonomi lainnya (Abdul, 2017).

IMF (*International Monetary of Fund*) menyebutkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan untuk memilih sistem kurs yang tepat karena ketepatan dalam memilih sistem kurs akan mempengaruhi perekonomian suatu negara (tabel 12.3).

Tabel 12.3 : Manajemen Kurs

Karakteristik Ekonomi	Implikasi untuk Derajat Fleksibilitas Kurs yang Diinginkan
Ukuran Ekonomi	Semakin besar ekonominya lebih baik menggunakan kurs yang fleksibel
Keterbukaan	Semakin terbuka perekonomian semakin tidak menarik kurs yang fleksibel
Diversifikasi Struktur Produksi/ ekspor	Semakin terdiversifikasi semakin layak kurs yang fleksibel
Konsentrasi Perdagangan	Semakin besar proporsi perdagangan dengan negara

Karakteristik Ekonomi	Implikasi untuk Derajat Fleksibilitas Kurs yang Diinginkan
	yang memiliki perekonomian besar, semakin besar insentif untuk mematok (pegged) ke mata uang negara tersebut
Divergensi inflasi domestik dari inflasi dunia	Semakin berbeda tingkat inflasi suatu negara dari patner dagang utamanya, semakin besar kebutuhan untuk penyesuaian kursnya (tetapi untuk negara yang sangat tinggi inflasinya, kurs yang tetap akan memberikan disiplin kebijakan dan kredibilitas yang lebih besar untuk program stabilisasi)
Derajat ekonomi/ perkembangan keuangan	Semakin besar derajat ekonomi/pengembangan keuangan, yang lebih layak adalah kurs yang fleksibel
Mobilitas tenaga kerja	Semakin besar derajat mobilitas tenaga kerja, ketika upah <i>sticky</i> ke bawah, yang lebih mudah (dan mahal) adalah penyesuaian terhadap eksternal shock dengan sistem kurs tetap
Mobilitas modal	Semakin tinggi derajat mobilitas modal, semakin sulit mempertahankan kurs yang dipatok tetapi kurs dapat disesuaikan
Goncangan dari luar negeri	Semakin lazim guncangan dari luar negeri semakin diinginkan kurs yang fleksibel
Goncangan dari dalam negeri	Semakin lazim goncangan yang terjadi di dalam negeri, semakin menarik kurs yang fixed
Goncangan riil	Semakin besar kerentanan perekonomian terhadap goncangan riil baik yang berasal

Karakteristik Ekonomi	Implikasi untuk Derajat Fleksibilitas Kurs yang Diinginkan
	dari luar atau dalam negeri, semakin menguntungkan menggunakan kurs yang fleksibel
Kredibilitas pembuat kebijakan	Semakin rendah kredibilitas pembuat kebijakan anti inflasi, semakin besar daya tarik dari kurs tetap sebagai jankar nominal

Sumber : Rana (1998)

Para peneliti ekonomi di Bank Indonesia juga memperoleh kesimpulan bahwa sepanjang sasaran akhir pengendalian moneter adalah kestabilan harga (*single target*) maka, manajemen *managed floating* merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kesimpulan didasarkan pada kenyataan bahwa struktur industri di Indonesia banyak mengandung bahan impor sehingga perubahan kurs sangat mempengaruhi kestabilan tingkat harga, di sisi lain, perubahan kurs hanya berdampak terbatas terhadap kinerja ekspor. Dengan kata lain, kurs yang terlalu berfluktuasi akan berdampak sangat buruk terhadap perekonomian dalam negeri (Miranda dan Doddy, 1998).

12.5 Penutup

Sistem kurs yang dianut oleh suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan betul karakteristik ekonomi dan implikasi derajat fleksibilitas kurs yang diinginkan agar terpilih sistem kurs yang cocok untuk suatu negara. Dengan demikian dampak negatif dari penentuan sistem kurs bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Ilman. 2017. Post – Crisis Exchange Rate Policy In Indonesia. Jurnal Tambora Vol. 2 No. 2 August 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2018-2022. Badan Pusat Statistik (bps.go.id)
- Bank Indonesia. 2022. Informasi Kurs. JISDOR (bi.go.id)
- Baumol, William J. dan Alan S. Blinder. 2009. *Macroeconomics Principles and Policy*. South-Western Cengage Learning.
- Dornbusch, Rudiger, and F. Leslie C. H. Helmers. 1995. *The Open Economy: Tools for Policymakers in Developing Countries*. Oxford University Press. New York.
- Dornbusch R. et al. 2003. *Macroeconomics* 9th Edition. Mc. Graw Hill.
- Flemming, J. Marcus. 1962. Domestic Financial Policies Under Fixed and Flexible Exchange Rate. *IMF Staff papers* 9: 369-379. Reprinted in Cooper, Richard N. 1969. *International Finance*. New York Penguin Books.
- Garber, Peter M. and Lars E.O. Svenson. 1994. The Operation and Collapse of Fixed Exchange Rate Regimes. NBER Working Paper No. 4971. Cambridge
- IMF. De Facto Classification of Exchange Rate and Monetary Framework. <http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2006/eng/0706.htm>
- Mundell, Robert A. 1999. Exchange-Rate.
- Madura, Jeff. 2008. *International Financial Management*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah & Peter Wilson. 2011. *Principles of Economics*. An Asian Edition. Cengage Learning.
- Miranda S. Goeltom dan Doddy Zulverdi. 1998. *Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Mundell, Robert A. 1963. Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rate. *Canadian Journal Of Economic and Political Science* 29 (4): 475-485. Doi:10.2307/139336. Dicitak Kembali dalam Mundell, Robert A. 1968. *International Economics*. New York Macmillan.

Rana, Pradumna B. 1998. *The East Asian Financial Crisis—Implication for Exchange Rate Management*. Economics and Development Resources Center Briefing Notes No.5, Asian Development Bank.

Salvatore, Dominick. 2016. *International Economics*. Wiley.

BIODATA PENULIS



Dr. Sabil, SE, MM

Dosen Program Studi Manajeme Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika

Penulis lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 1964. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika . Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Manajemen dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen. Serta melanjutkan S3 Ilmu Ekonomi. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Donal Mon, SE., MM

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen
Universitas Internasional Batam

Penulis lahir di Padang Sibusuk pada tanggal 23 Juni 1978. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen untuk program S1 dan S2, Universitas Internasional Batam. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), melanjutkan S2 pada Jurusan Strategik Manajemen untuk (MSDM), dan merupakan lulusan Doktoral untuk startegik Manajemen. Sebelumnya penulis juga memiliki pengalaman di bidang industri atau praktisi pada perusahaan manufaktur untuk produk Aerospace sejak tahun 2002 - 2020.

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan
Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic
Economics and Finance di Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Dr. Agung Nusantara, SE., MSi.

Dosen Program Studi S1-Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (1989). Melanjutkan S2 pada jurusan yang sama di Universitas Gadjah Mada (1999) dan S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (2013).

Penulis menekuni bidang Teori Ekonomi Mikro dan Makro dan Metode Kuantitatif.

BIODATA PENULIS



Yudhistira Ardana, M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Purbalingga tanggal 02 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi seperti, IIB Darmajaya, STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, STMIK Pringsewu, UIN Raden Intan Lampung dan menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis beberapa periode dipercaya menjadi pengembang Materi Tutor Universitas terbuka tahun 2018 (Pengantar Akuntansi Syariah), 2019 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah), 2020 (Ekonomi Pembangunan Islam), 2021 (Teori Mikro Islam) dan 2022 (Kewirausahaan Syariah dan Teori Ekonomi Makro Islam). Selain itu penulis juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan menjadi anggota pada beberapa organisasi profesi Dosen.

BIODATA PENULIS



Andi Ika Fahrika, S.E., M.Si
Dosen di IAIN BONE

Andi Ika Fahrika, S.E., M.Si, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 20 Juni. Penulis sekarang tinggal Jl. Bali No. 32 Watampone Kabupaten. Bone, Sulawesi Selatan. Penulis pernah bersekolah di Sekolah Dasar SDN No. 23 Macege Watampone, Kab. Bone, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Watampone Kabupaten Bone. Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone, S1 Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, S2 Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, Program Studi Ekonomi Sumber Daya.

Penulis pernah mengajar di Universitas Fajar Makassar, Universitas Indonesia Timur (UIT), UIN Alauddin Makassar, STIE YAPI BONE, dan sampai sekarang mengajar di IAIN BONE. Mata kuliah yang diajarkan, Ekonomi Mikro Konvensional, Ekonomi Makro Konvensional, Ekonomi Moneter, Perbandingan Sistem Ekonomi dan Perekonomian Indonesia

Buku yang telah dibuat oleh penulis adalah Buku Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Buku Teori Ekonomi Mikro, Buku Pengantar Teori Ekonomi Makro, Buku Perbandingan Sistem Ekonomi, Buku Dummy Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Konsumsi 3 Tahun masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Tahun 2011-2013) dan 3 Tahun masa Pemerintahan Joko Widodo

BIODATA PENULIS



Sari Utami, M.E.I.

Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Moneter Islam karena penulis lulus CPNS Tahun 2008 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan formasi Dosen Mata Kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pendidikan penulis berasal dari MAN 1 Watampone jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2004-2007 dan melanjutkan kuliah S1 STAIN Watampone jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2008-2012. Beberapa bulan kemudian penulis melanjutkan kursus Bahasa Inggris di Pare (Jawa Timur) sambil menunggu pendaftaran S2 di Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan kuliah S2 di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) Jogja jurusan Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah pada tahun 2013-2015. Penulis seorang Dosen yang mengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dan juga mengajarkan mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam dalam mengembangkan keilmuan terhadap mata kuliah yang diajarkan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi seperti dana BOPTN LP2M IAIN Bone. Dan Penulis juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya seperti membawakan materi dan aktif sebagai juri pada beberapa olimpiade yang sering dilakukan oleh organisasi kampus seperti RUMAH EKIS dan HMPS-EKSYAR FEBI IAIN Bone. Penulis juga memiliki beberapa jurnal yang sesuai dengan rumpun keilmuannya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi para

mahasiswa, bangsa ataupun negara tercinta. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan wawasan serta petahuan tambahan kepada pembaca.

Email Penulis: sari09bahar@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ayu Pradaning Ratri

Staf Dosen di STIE Balikpapan

Penulis lahir di Balikpapan tanggal 06 Januari 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, STIE Balikpapan. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan akuntansi di Trisakti tahun 2001 dan pendidikan S2 jurusan ilmu ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2004. Sekarang Penulis sedang melanjutkan studi S3 jurusan ilmu ekonomi di Universitas Mulawarman.

Email: ayu@stiebalikpapan.ac.id

BIODATA PENULIS



Ria Rahmawati, M. Pd

Tenaga Pendidik

Penulis lahir di OKU Sumatera Selatan pada bulan desember 1988, saat ini tinggal di kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mengawali karir menjadi tentor ekonomi di Ganesha Operation Yogyakarta, kemudian menjadi dosen LB di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai guru di wilayah Kota Yogyakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada prodi Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta. Memiliki beberapa karya yaitu, (1) jurnal SOCIA (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial) "*Pengembangan Bahan Ajar Berbasis PBL pada Pelajaran Ekonomi untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik SMA*". Vol.13. No.2, 2016 (2) book chapture .2022. *Pendidikan Karakter*. Get Press Indonesia (3) book chapture.2022.*Manajemen Sistem Pendidikan*. Get Press Indonesia

BIODATA PENULIS



Sri Nawatmi

Dosen tetap di Fakultas Vokasi, Program Studi Keuangan dan perbankan, Universitas Stikubank (Unisbank)

Penulis lahir di Boyolali tanggal 27 April 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1991 di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Melanjutkan Pendidikan S2 di perguruan tinggi dan jurusan yang sama dan lulus tahun 2000. Pada tahun 2016, menyelesaikan program S3 DIE (Doktor Ilmu Ekonomi), Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Ekonomi. Menjadi dosen tetap di Fakultas Vokasi, Program Studi Keuangan dan perbankan, Universitas Stikubank (Unisbank) dari tahun 1991 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Natalia Artha Malau, SE,M.Si.
Dosen di Universitas Negeri Manado

Natalia Artha Malau, SE,M.Si. lahir di Pematangsiantar, 26 desember 1981. Lulus dari S1 Program Studi Ekonomi studi pembangunan, FE Universitas Andalas pada tahun 2004, dan kemudian melanjutkan ke tingkat S2 dan lulus Magister Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan dari Universitas Diponegoro tahun 2011. Pada tahun 2004 diterima menjadi dosen Kopertis Wilayah 1 Aceh Sumut, dan sejak itu aktif mengajar di STIE Nusa Bangsa Medan. Dan pada tahun 2015, mulai mengajar penuh, di Universitas Negeri Manado. Saat ini mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNIMA dalam konsentrasi perencanaan pembangunan dan ekonomi moneter.